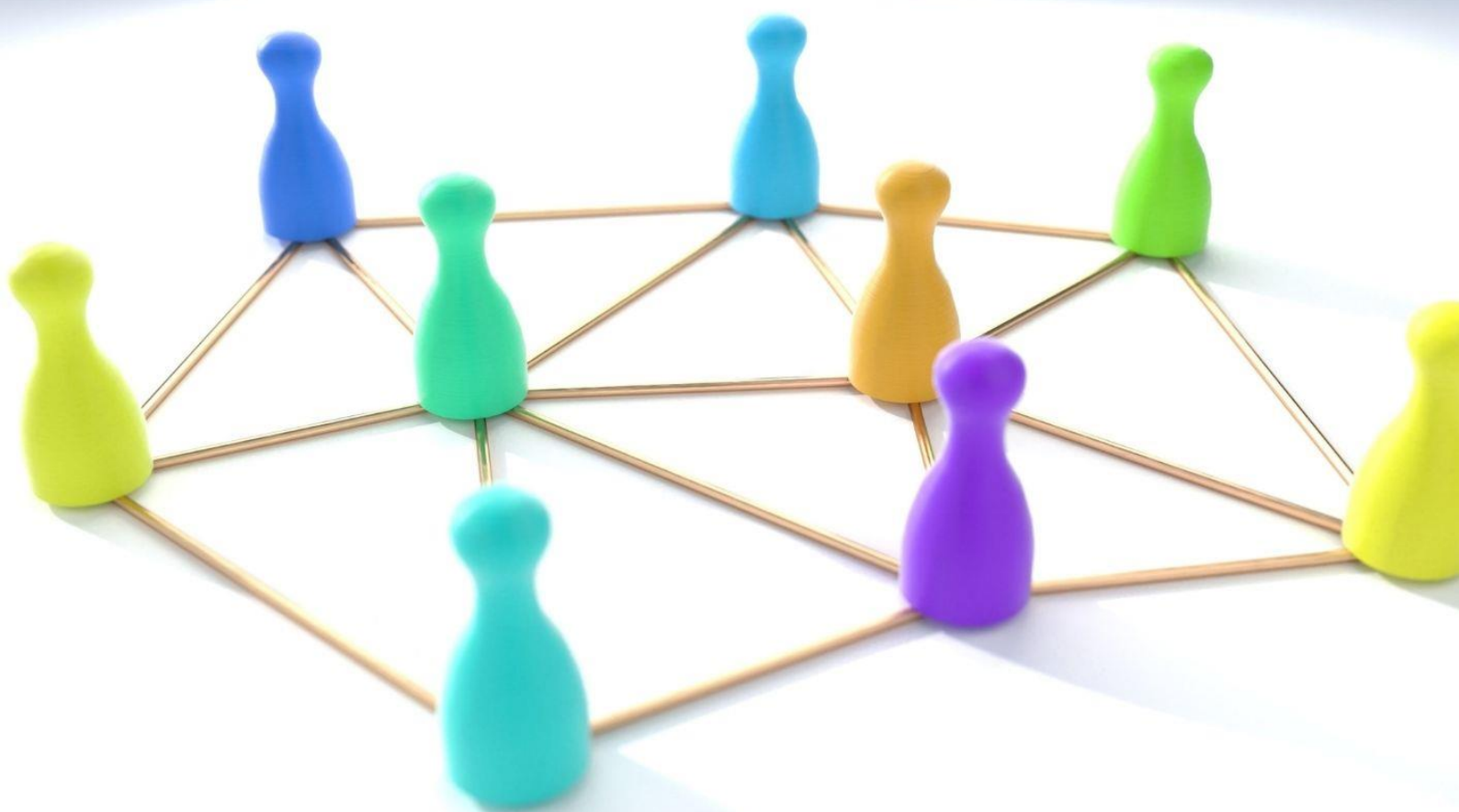


ALUMNI
2021

DIREKTORI ABSTRAK TESIS & DISERTASI KARYASISWA

KEBIJAKAN PUBLIK



Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

DIREKTORI ABSTRAK TESIS & DISERTASI KARYASISWA

KEBIJAKAN PUBLIK

ALUMNI 2021

PENGANTAR

Sehubungan dengan fungsi Pusbindiklatren sebagai penyelenggara pendidikan dan pelatihan perencanaan pembangunan, Pusbindiklatren Bappenas menyediakan program beasiswa pendidikan gelar yang diberikan untuk para PNS perencana dan PNS lain yang bekerja di bidang perencanaan. Terdapat 3 program pendidikan gelar yang ada di Pusbindiklatren, antara lain: Program pendidikan gelar dalam negeri, Program pendidikan gelar luar negeri, dan Program *linkage*.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Karyasiswa (peserta program pendidikan) kepada Pusbindiklatren yaitu dengan menunjukkan hasil karya tulis yang menjadi persyaratan kelulusan di perguruan tinggi masing-masing Karyasiswa. Nama dan beberapa informasi terkait karya tulis alumni Karyasiswa kemudian dikumpulkan dalam sebuah Direktori yang menjadi bahan pertanggungjawaban serta informasi dari Pusbindiklatren kepada publik.

Berbeda dengan Direktori yang ada di Pusbindiklatren sebelumnya, Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa ini merupakan sebuah katalog yang berisikan kumpulan ringkasan hasil karya tulis seluruh alumni Karyasiswa Pusbindiklatren yang lulus di tahun 2021. Ringkasan yang akan disajikan dalam Direktori ini berupa ringkasan abstrak dari tesis maupun disertasi alumni Karyasiswa yang telah berstatus lulus, memperoleh gelar pendidikan, dan telah tercatat pada SIMDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan) Pusbindiklatren.

TUJUAN

Direktori ini disusun dengan harapan agar hasil karya tulis alumni Karyasiswa dapat menjadi bahan referensi bagi pihak lain yang sedang melakukan penelitian di bidang yang serupa. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan dan bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan di Indonesia.

DISCLAIMER

Direktori ini hanya berisi ringkasan karya tulis alumni Karyasiswa berupa abstrak. Dokumen lengkap hasil karya siswa merupakan milik alumni Karyasiswa, Perguruan tinggi dan Pusbindiklatren. Untuk memperoleh dokumen karya tulis secara keseluruhan, mohon dapat menghubungi pihak Pusbindiklatren secara langsung.

PROSEDUR PERMINTAAN AKSES KARYA TULIS ALUMNI

1 Menghubungi Pusbindiklatren melalui **telepon/email**.

2 Mengirimkan **surat resmi** yang ditujukan kepada **Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Perencana** yang menyatakan permintaan izin secara resmi untuk dapat memperoleh akses dokumen hasil karya siswa alumni Karyasiswa Pusbindiklatren.

3 Menunggu **konfirmasi** dan **follow-up** dari Pusbindiklatren melalui **telepon/email** yang telah diberikan ke Pusbindiklatren.

KONTAK KAMI



(021) 31928280 | (021) 31928285



pusbindiklatren@bappenas.go.id



Gd. Pusbindiklatren Bappenas

Jln. Proklamasi No. 70, Menteng, Jakarta Pusat

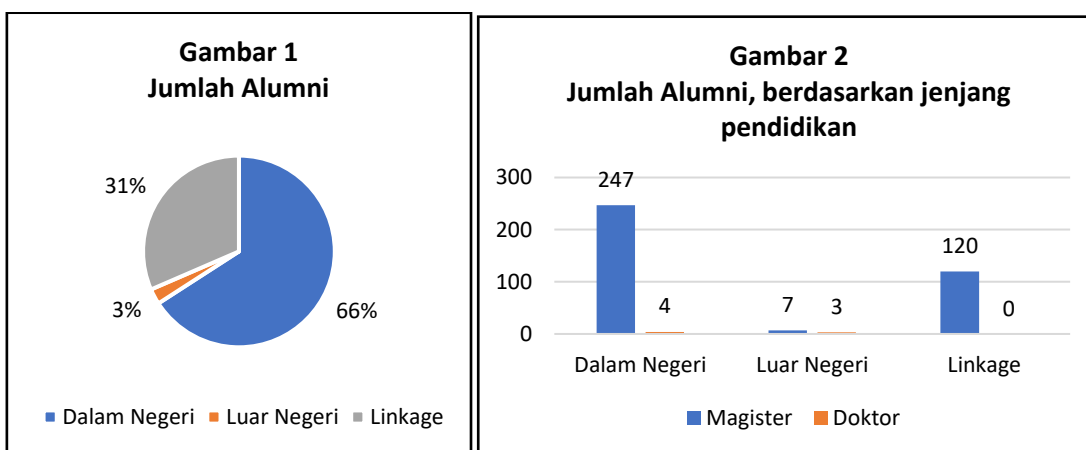
DAFTAR ISI

Pendahuluan	1
Jumlah Alumni dan Karya Tulis	1
Mitra Perguruan Tinggi	2
Analisis	3
Perencanaan	26
Implementasi Kebijakan	37
Monitoring dan Evaluasi	60
<i>Good Governance</i>	88
Kepemimpinan dan Kepala Daerah	108
Demokrasi	118
Kolaborasi	125
Partisipasi.....	140
<i>Smart City</i> dan <i>Smart Governance</i>	152
Lainnya	158

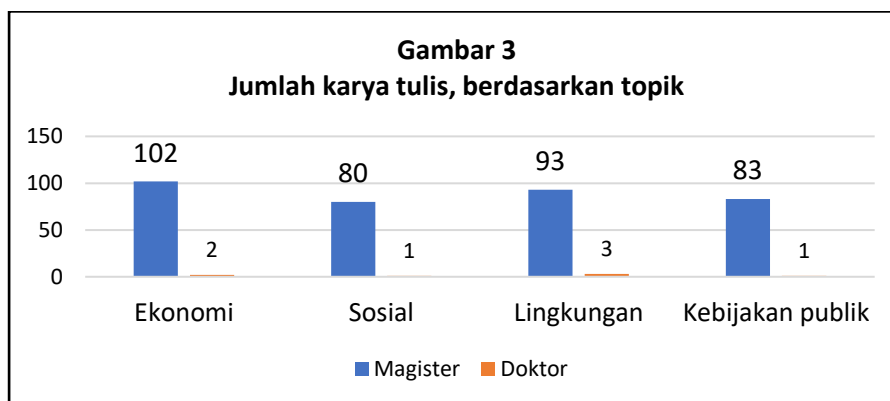
PENDAHULUAN

JUMLAH ALUMNI DAN KARYA TULIS

Pada tahun 2021, jumlah alumni Karyasiswa yang telah dinyatakan lulus dan telah tercatat dalam SIMDIKLAT (Sistem Informasi Pendidikan dan Pelatihan) Pusbindiklatren yaitu sebanyak **381 orang alumni** dengan rincian: **251 alumni** program **dalam negeri**; **10 orang** program **luar negeri**; dan **120 alumni** program *linkage*. Jika dilihat berdasarkan jenjang pendidikan, sebanyak **374 orang** merupakan alumni pada program **Magister/Master (S-2)** dan **7 orang** merupakan alumni pada program **Doktor/Doctoral (S-3)**.

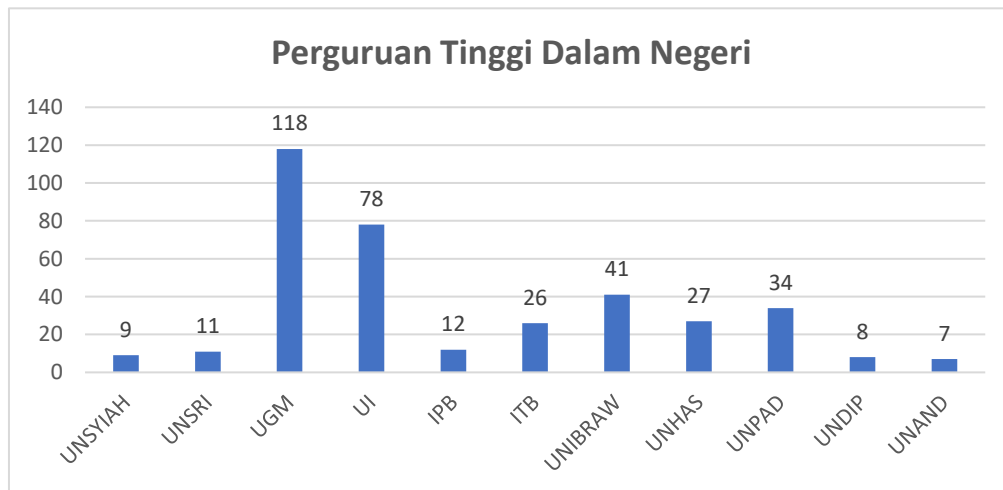


Dari 381 orang alumni, sebanyak 16 alumni yang karya tulisnya tidak mencantumkan Abstrak sehingga hanya 365 karya tulis yang memenuhi syarat dan dapat dimasukkan dalam Direktori Abstrak Tesis & Disertasi Karyasiswa. Direktori tersebut akan terbagi atas 4 topik yang diklasifikasikan berdasarkan topik karya tulis, antara lain: **Ekonomi**; **Sosial**; **Lingkungan**; dan **Kebijakan Publik**. Keempat topik tersebut diperoleh berdasarkan kategori kata kunci serta judul dari karya tulis Karyasiswa.

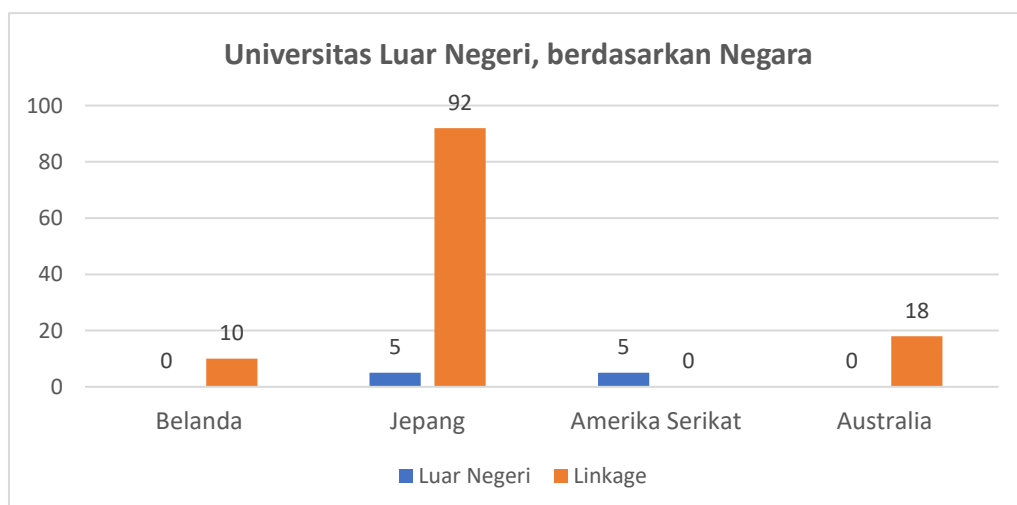


MITRA PERGURUAN TINGGI

Sebanyak **371 alumni** karyasiswa telah dinyatakan lulus oleh sejumlah perguruan tinggi di Indonesia. Alumni tersebut merupakan alumni dari **program dalam negeri** (sebanyak **251 alumni**) dan program **linkage** (sebanyak **120 alumni**). Secara rinci, perguruan tinggi asal alumni Karyasiswa antara lain:



Selain itu, sebanyak **130 alumni** karyasiswa telah dinyatakan lulus oleh sejumlah perguruan tinggi di luar negeri pada tahun 2021. Alumni tersebut merupakan alumni **program luar negeri** (sebanyak **10 alumni**) dan program **linkage** (sebanyak **120 alumni**). Secara rinci, universitas luar negeri tempat para Karyasiswa menempuh pendidikan berada di empat (4) negara, antara lain:



ANALISIS

1. Nama : Oky Patria Sadewa Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Aktor dalam Implementasi Kebijakan Pengendalian Gratifikasi sebagai Upaya Pencegahan Korupsi (Studi pada Pemerintah Kabupaten Banyumas)
Kata kunci : Analisis aktor, Pengendalian gratifikasi, Implementasi, Korupsi
Keywords : *Actor Analysis, Gratification Arrangement, Implementation, Corruption*
-

ABSTRAK

Pemerintah Kabupaten (Pekab) Banyumas adalah salah satu Kabupaten yang dinilai cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan pengendalian gratifikasi. Hal tersebut ditunjukkan dengan komitmen dan penghargaan yang diterimanya sebagai Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) terbaik kedua secara nasional. Proses implementasi kebijakan pengendalian tersebut dipengaruhi oleh beberapa aktor yang ada. Penelitian ini menguji lebih dalam aspek peran aktor-aktor tersebut dengan metode pemetaan power-interest grid dan dianalisis dengan teori model implementasi kebijakan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah bersumber dari wawancara, kajian literatur, observasi dan focus discussion group. Informan dalam penelitian ini adalah wakil ketua UPG Kabupaten, anggota UPG Kabupaten maupun Perangkat Daerah, ketua DPRD, Kepala Dinas, Pegawai Pemkab Banyumas, rekanan, Jaksa dan masyarakat pengguna layanan. Hasil penelitian ini memberikan gambaran siapa saja aktor-aktor yang dianggap relevan dalam proses implementasi kebijakan pengendalian gratifikasi serta posisi dalam pemetaan aktor berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingan yang dimilikinya. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan gambaran atas peran yang telah diberikan terhadap proses implementasi dari masing-masing aktor untuk dapat ditemukan peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan oleh Pemkab Banyumas. Adapun peluang-peluang tersebut antara lain adalah peluang pengembangan kapasitas dari kelompok sasaran, dukungan kepemimpinan kepala daerah yang perlu dimaksimalkan oleh implementor, pelibatan pihak rekanan, penggunaan inovasi, peran street level bureaucrats dan pertimbangan muatan lokal serta kondisi empiris dalam mengevaluasi kebijakan yang ada.

ABSTRACT

The Government of Banyumas Regency was one of the regencies deemed adequate in implementing gratification arrangement measures. It is seen from the commitment and the award for the second-best gratification control unit (UPG) in the nation. The process of implementing the control policy is influenced by several actors. This study examines the

aspects of the role of these actors using the powerinterest grid mapping method and analyzed it with the theory of policy implementation models. The qualitative technique was applied where the information in this thesis was gathered through interviews, a review of the literature, observation, and focus group discussions. Informants in this study were the deputy chairman of the Regency UPG, members of the Regency UPG and regional apparatuses, the chairman of the regional people representative house (DPRD), the head of the service unit, Banyumas Regency Government employees, partners, prosecutors, and people as service users. The findings of this study provide an overview of the actors that are assessed to be significant in the process, as well as their position in the actor mapping based on their magnitude of influence and interests. Additionally, this study shows an overview of the tasks assigned to each actor in the process, which assists the government in identifying and using opportunities. These opportunities include opportunities for enhancing the capacity of the target group, maximising leadership support from regional heads, growing partner involvement, boosting innovation, strengthening the role of street-level bureaucrats, considering local content, and evaluating existing policies with empirical conditions.

2. Nama : Sasha Gatria Andani Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung
Judul tesis : Formulasi Alternatif Kebijakan Subsidi Pupuk di Indonesia dengan Metode Tinjauan Sistematis (*Systematic Review*)
Kata kunci : Analisis komparatif, Bukti empirik, Pupuk, Subsidi, Tinjauan sistematis
Keywords : *comparative analysis, evidence based, fertilizer, subsidy, systematic review*
-

ABSTRAK

Sejak diperkenalkan pertama kali sekitar 60 tahun yang lalu sebagai bagian dari Revolusi Hijau, berbagai negara di Afrika dan Asia telah mengimplementasikan kebijakan subsidi pupuk, termasuk Indonesia. Terlepas dari potensi manfaatnya, kebijakan subsidi pupuk juga banyak dikritisi oleh kalangan ekonom, agen pembangunan dan analis kebijakan. Subsidi pupuk dinilai sebagai cara yang tidak efisien untuk mengalokasikan sumber daya publik yang terbatas serta dapat mendorong penggunaan pupuk yang berlebihan. Selain itu, anggaran subsidi pupuk yang semakin tinggi tidak sejalan dengan dampak yang terbatas pada produktivitas dan adanya penurunan produksi padi. Proses politik dan ekonomi yang mendasari kebijakan subsidi pupuk akan membuatnya sulit untuk dapat dihapuskan. Seringkali kebijakan subsidi pupuk kurang didasarkan pada bukti empirik (*evidence based*) yang kuat.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan formulasi alternatif kebijakan subsidi pupuk di Indonesia melalui pemahaman potensi dan tantangan sektor pertanian di Indonesia, evolusi historis dari kebijakan subsidi pupuk di Indonesia, dan mensistematisasikan praktek-praktek penyelenggaraan kebijakan subsidi pupuk di berbagai negara dikaitkan dengan output, outcome, dan impact dari kebijakan tersebut, serta melalui analisis komparatif mengenai kebijakan subsidi pupuk di Indonesia dengan studi dari hasil tinjauan literatur secara sistematis. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur dan tinjauan sistematis (*systematic review*).

Dari hasil penelitian, terdapat beberapa temuan studi, antara lain: Pertama. Potensi pertanian Indonesia berupa lahan yang potensial untuk tanaman pangan, keberagaman budidaya tanaman sebagai sumber pangan, dan ketersediaan sumber daya manusia, sebagai faktor produksi pertanian. Namun pemanfaatan potensi pertanian tersebut dihadapkan pada beberapa tantangan antara lain: (1) Pengelolaan unsur hara, penguasaan lahan oleh petani dengan skala kecil, serta fenomena konversi lahan yang dapat berimplikasi pada produksi tanaman; (2) Keberagaman pangan terbentur preferensi intim masyarakat terhadap beras yang juga menyebabkan keterbatasan pilihan kebijakan; dan (3) Rendahnya produktivitas tenaga kerja sektor pertanian. Kedua. Evolusi historis dari kebijakan subsidi pupuk di Indonesia menunjukkan bahwa subsidi pupuk merupakan salah satu kebijakan yang sensitif dimana proses politik maupun ekonomi mendasari kebijakan tersebut karena besaran nilai subsidi yang signifikan serta banyaknya pihak yang terlibat. Ketiga. Penulis mengidentifikasi 22 studi yang menilai pengaruh kebijakan subsidi pupuk, yang sebagian besar melaporkan dampak positif, seperti pada output: yaitu peningkatan terhadap

penggunaan pupuk, perubahan alokasi tanaman (varietas tanaman dan/atau pola tanam), dan peningkatan efisiensi petani dalam hal aktivitas bertani; outcome: peningkatan hasil panen, peningkatan pendapatan rumah tangga, penurunan harga pangan, peningkatan konsumsi, ketahanan pangan rumah tangga, pemasaran hasil panen, serta peningkatan keuntungan usaha tani; impact: penurunan kemiskinan, kenaikan penyediaan, permintaan, dan upah tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan, dampak positif pada gizi anak dan kualitas diet petani wanita, dan distribusi total surplus. Berdasarkan temuan studi tersebut penulis melakukan analisis komparatif antara kebijakan subsidi pupuk pada studi dari hasil tinjauan literatur secara sistematis dengan kebijakan subsidi pupuk yang ada di Indonesia pada beberapa aspek, antara lain: (1) Penentuan sasaran penerima manfaat; (2) Merupakan bagian dari “strategi sektor yang lebih luas”; (3) Dukungan terhadap pengembangan pasar pupuk sektor swasta; serta (4) Memiliki exit strategy.

Kebijakan subsidi yang berjalan saat ini perlu diubah agar dapat mencapai potensi optimalnya serta sejalan dengan potensi pertanian di Indonesia. Penulis memformulasikan alternatif kebijakan subsidi pupuk berdasarkan temuan studi dan analisis komparatif yang telah dilakukan: (1) Kriteria sasaran penerima manfaat untuk petani “miskin produktif” serta memprioritaskan kelompok rentan; (2) Pemanfaatan eRDKK dan Kartu Tani secara optimal; (3) Adanya pernyataan yang jelas mengenai indikator kinerja atas program subsidi pupuk; (4) Integrasi dengan kebijakan subsidi pertanian lainnya melalui penyediaan paket yang holistik atas input pertanian, seperti penyediaan pupuk bersama dengan benih unggul yang disesuaikan dengan komoditas pangan spesifik lokasi dan irigasi, serta dilengkapi dengan jaminan harga komoditas pangan serta pelatihan dari penyuluh atau agen pertanian lainnya mengenai praktek manajemen kesehatan tanah; (5) Pengembangan pasar pupuk yang kompetitif disertai jaminan ketersediaan pupuk hingga ke daerah terpencil; (6) Pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan exit strategy sebagai antisipasi kemungkinan perubahan kebijakan subsidi pupuk akibat beban keuangan fiskal yang besar di masa mendatang. Kebijakan subsidi pupuk bukan merupakan solusi tunggal untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan pertanian karena penyebab yang bersifat multidimensi sehingga dibutuhkan pendekatan yang juga bersifat multidimensi dan harus dibangun dalam suatu paket kebijakan pertanian yang lebih komprehensif.

ABSTRACT

Since it was first introduced about 60 years ago as part of the Green Revolution, various countries in Africa and Asia have implemented fertilizer subsidy policies, including Indonesia. Apart from the many potential benefits, the fertilizer subsidy policy has also been criticized by economists, development agencies and policy analysts. Fertilizer subsidy is seen as an inefficient way to allocate limited public resources and can encourage excessive use of fertilizers. In addition, the higher fertilizer subsidy budget is not in line with the limited impact on productivity and the decline in rice production. The political and economic processes that underlie fertilizer subsidy policies will make it difficult to eliminate them. Often fertilizer subsidy policies are not based on strong empirical evidence.

This study aims to produce policy alternative formulations of fertilizer subsidy policies in Indonesia through understanding the potential and challenges of the agricultural sector in Indonesia, the historical evolution of fertilizer subsidy policies in Indonesia, and systematizing

the practices of implementing fertilizer subsidies policies in various countries related to output, outcome, and impact of the policy, as well as through a comparative analysis between fertilizer subsidy policies in Indonesia and studies resulted from systematic review. This study uses the method of literature review and systematic review.

The results of the study showed that that there were several study findings, including: First. Indonesia's agricultural potential is in the form of potential land for food crops, the diversity of plant cultivation as a food source, and the availability of human resources, as a factor of agricultural production. However, the utilization of agricultural potential is faced with several challenges, including: (1) Nutrient management, land tenure by small-scale farmers, and the phenomenon of land conversion that can have implications for crop production; (2) Food diversity is collided with the community's intimate preference for rice which also causes limited policy options; and (3) low labor productivity in the agricultural sector. Second. The historical evolution of the fertilizer subsidy policy in Indonesia shows that the subsidy is a sensitive policy in which the political and economic process underlie fertilizer subsidy policy, due to the significant amount of the subsidy budget and the many parties involved. Third. The author identified 22 studies that assessed the effect of fertilizer subsidy policies, most of which reported positive impacts, such as on output: an increase in fertilizer use, changes in crop allocation (crop varieties and/or cropping patterns), and increased farmer efficiency in terms of farming activities; outcomes: increase in crop yields, increase in household income, decrease in food prices, increase in consumption, household food security, marketing of crops, and increase in farming profits; impact: reduction in poverty, increase in supply, demand, and wages of labor, increase in welfare, positive impact on child nutrition and diet quality of female farmers, and distribution of total surplus. Based on the study findings, the authors conducted a comparative analysis between the fertilizer subsidy policy in the studies resulted from systematic review and the fertilizer subsidy policy in Indonesia in several aspects, including: (1) determining the target beneficiaries; (2) part of a "wider sector strategy"; (3) support the development of private sector fertilizer markets; and (4) have an exit strategy.

The current subsidy policy needs to be changed in order to reach its optimal potential and be in line with Indonesia's agricultural potential. The author formulates policy alternative formulation of fertilizer subsidy policy so that it has supporting factors to increase the optimal potential of the policy and can be in line with agricultural potential in Indonesia: (1) Criteria for targeting beneficiaries that is "productive poor" farmers and prioritizing vulnerable groups; (2) Optimal utilization of e-RDCK and Farmer Cards; (3) There is a clear statement regarding the performance indicators of the fertilizer subsidy program; (4) Integration with other agricultural subsidy policies through the provision of a holistic package of agricultural inputs, such as the provision of fertilizers along with seeds adapted to location-specific food commodities, and accompanied by a guarantee of commodity prices as well as training from extension workers or other agricultural agents regarding soil health management practices; (5) Development of a competitive fertilizer market with guaranteed availability of fertilizers to remote areas; (6) The Government of Indonesia needs to prepare an exit strategy to anticipate possible changes in subsidy policy due to the large fiscal burden in the future. Subsidy policy is not a single solution to achieve various development goals because it is multidimensional in nature, so it needs an agricultural approach that is also multidimensional in nature and must be built into a more comprehensive policy package.

3. Nama : Annuur Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Judul tesis : Efektivitas Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2019 di Kabupaten Bone
Kata kunci : Efektivitas, Program, Pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kabupaten Bone, CSI
Keywords : *Effectiveness, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bone Regency, CSI*
-

ABSTRAK

Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan mulai tahun 2017 bertujuan untuk dapat memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia sebelum tahun 2025. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan program PTSL tahun 2019 di Kabupaten Bone, mengidentifikasi hambatan dalam pelaksanaan dan upaya yang ditempuh dalam mengatasi hambatan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik cluster random sampling dan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program PTSL tahun 2019 di Kabupaten Bone telah terlaksana dengan efektif. Pengukuran melalui pendekatan sasaran menunjukkan tercapainya pelaksanaan dengan persentase 99,79% dari target dan tingkat kepuasan masyarakat peserta program mencapai 83,59%. Meski demikian, terdapat hambatan dalam pelaksanaan yakni berupa perubahan lokasi PTSL, keterbatasan SDM, lahan yang tumpang tindih, kesadaran dan kemampuan masyarakat serta perbedaan persepsi masyarakat terkait biaya PTSL. Upaya yang ditempuh oleh pelaksana yakni melakukan revisi SK penetapan lokasi, memaksimalkan jam lembur, arahan penyelesaian sengketa serta mengajak peran serta perangkat desa/kelurahan dalam peningkatan kesadaran masyarakat.

ABSTRACT

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) has been initiated on 2017 aim to map all parcel in Indonesia before 2025. This study aims to analyze the level of effectiveness of the PTSL program implementation in 2019 in Bone Regency, identify obstacles in implementation and efforts taken to overcome obstacles. This study uses a descriptive method with quantitative and qualitative approaches. Data collection using cluster random sampling and purposive sampling techniques. The results showed that PTSL program in 2019 in Bone Regency had been implemented effectively. Measurement through the target approach shows the achievement of implementation with a percentage of 99.79% of the target and the level of community satisfaction of program participants reaches 83.59%. However, there are obstacles in implementation, namely changes in the location of PTSL, limited human resources, overlapping land, community awareness and ability and differences in public perceptions regarding PTSL costs. Efforts taken by the executor include revising the decree on location determination, maximizing overtime hours, directing dispute resolution and inviting the participation of village officials in increasing public awareness.

4. Nama : Rini Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Judul tesis : Strategi Peningkatan Peran Pelabuhan Dalam Menunjang Pengembangan Kota Makassar
Kata kunci : Kinerja pelabuhan, PDRB, Analisis medan kekuatan, Strategi
Keywords : *Port performance, GRDP, force field analysis, strategy*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pengaruh Pelabuhan Makassar dalam menunjang pengembangan Kota Makassar; (2) menganalisis kinerja operasional Pelabuhan Makassar; dan (3) merumuskan strategi peningkatan peran Pelabuhan Makassar dalam menunjang pengembangan Kota Makassar.

Penelitian ini menggunakan metode analisis korelasi dan deskriptif untuk menganalisis pengaruh Pelabuhan Makassar dalam menunjang pengembangan Kota Makassar. Analisis deskriptif juga digunakan dalam menganalisis kinerja operasional Pelabuhan Makassar. Strategi peningkatan peran Pelabuhan Makassar dirumuskan dengan menggunakan *force field analysis* (analisis medan kekuatan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum: (1) Pertumbuhan sektor-sektor dominan pada PDRB Kota Makassar seperti sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda motor, serta industri pengolahan dipengaruhi oleh arus lalu lintas barang muat dalam negeri, impor, dan bongkar dalam negeri. Semakin padatnya arus lalu lintas barang di Pelabuhan Makassar mengakibatkan peningkatan sektor-sektor dominan pada PDRB Kota Makassar; (2) kinerja operasional Pelabuhan Makassar selama periode lima tahun terakhir sebagian besar berkinerja baik walaupun masih ada kriteria yang berkinerja kurang baik dan cukup baik; (3) prioritas strategi peningkatan peran Pelabuhan Makassar dalam menunjang pengembangan Kota Makassar adalah pengembangan terminal Makassar New Port (MNP) dan pengerukan kolam pelabuhan pada Terminal Hatta, Terminal Soekarno dan Terminal Hasanuddin.

ABSTRACT

The research aims at (1) Analysing the effect of Makassar Port on supporting Makassar City development; (2) Analysing the operational performance of Makassar Port; (3) Formulating a strategy to increase the port role in supporting Makassar City development.

The research used the correlation analysis and descriptive methods to analyse the effect of Makassar Port on supporting Makassar City development. The descriptive analysis was also used to analyse the operational performance of Makassar Port. The strategy of the port role was formulated using the force field analysis.

The research result indicates that generally (1) The growth of dominant sectors in the GRDP of Makassar City, such as the construction sector, wholesale and retail trade, car and motorcycle repair, and the manufacturing industry are influenced by the flow of domestic loading, import, and unloading goods in the country. The denser flow of goods traffic at the

Port of Makassar has increased in the dominant sectors in Makassar City's GRDP; (2) From the category of the operational performance assesment, Makassar Port for last five (5) years mostly has the good performance although there are some having under-performed and fairly good; (3) The strategic priority for increasing Makassar Port role in supporting Makassar City development is the development of Makassar New Port (MNP) terminal and the port pool dredging at Hatta Terminal, Soekarno Terminal and Hasanuddin Terminal.

5. Nama : Elvina Nora Lubis Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Judul tesis : Arahan Pembangunan Kabupaten Mandailing Natal Berbasis Indeks Pembangunan Berkelanjutan Lokal
Kata kunci : *Cluster analysis, Factor analysis*, Indeks Pembangunan Berkelanjutan Lokal, Indikator, LISA
Keywords : *cluster analysis, factor analysis, Indicator, LISA, Local Sustainable Development Index*
-

ABSTRAK

Konsep pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan. Pengukuran pembangunan berkelanjutan dengan indikator tertentu sudah umum diukur di tingkat kabupaten, regional ataupun nasional, namun di tingkat lokal masih jarang dilakukan. Pembangunan di Kabupaten Mandailing Natal masih terkendala baik dari dimensi ekonomi, dimensi sosial, maupun dimensi lingkungan, sebagai salah satu cara untuk mengatasinya diperlukan arahan pembangunan berbasis indeks pembangunan berkelanjutan lokal. Fokus kebijakan harus sesuai berdasarkan tingkat keberlanjutan pembangunan di tiap-tiap lokasi dan dimensi keberlanjutan, karena setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda. Ketersediaan data di tingkat desa sangat mendukung pengukuran indeks ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wilayah, mengidentifikasi indikator penciri indeks pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, mengukur indeks pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal dan menentukan arahan pembangunan Kabupaten Mandailing Natal berbasis Indeks Pembangunan Berkelanjutan Lokal (IPBL). Metode yang digunakan adalah klasifikasi terbimbing, scalogram, Faktor Analisis (FA), Local Indicator of Spatial Autocorrelation (LISA) dan K means cluster. Hasil analisis skalogram menunjukkan Indeks Perkembangan Desa di Kabupaten Mandailing Natal berkategori sedang (89%). Pada tahun 2011, persentase tutupan lahan hutan sebesar 43% namun luasannya menurun sebesar $\pm 15\%$ di tahun 2018. Desa-desa yang terletak di arah barat laut merupakan wilayah yang mengalami perubahan tutupan lahan paling tinggi dan pada umumnya indeks perkembangan desanya berkategori rendah. Indikator pembangunan berkelanjutan dari dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berjumlah 21, tereduksi menjadi 13 indikator penciri. Nilai IPBL ekonomi di wilayah ini berkategori sedang di tahun 2011 dan beberapa desa berkategori rendah berhasil meningkatkan keberlanjutan pembangunannya di tahun 2018. Keberlanjutan pembangunan lingkungan justru menurun dari kategori sedang ke kategori rendah di tahun 2018. Sebaran pola spasial IPBL ekonomi dan IPBL sosial bertipe cluster High-high (HH) berada di sebelah timur lokasi penelitian, dan sebaran IPBL lingkungan tipe cluster HH di wilayah barat laut. Untuk mempermudah penentuan arahan pembangunan, wilayah penelitian dikategorikan menjadi 4 cluster berdasarkan nilai indeks pembangunan berkelanjutan lokalnya. Desa-desa yang masuk dalam kategori cluster 3 (66,34%) merupakan wilayah yang paling memerlukan

prioritas/fokus pembangunan, karena tingkat keberlanjutan pembangunannya rendah di dimensi sosial dan lingkungan.

ABSTRACT

There is nodoubt that concept sustainable development is very important to increase our quality of life. Measurement of development based on specific indicators is one of the approach to describe sustainable development. At the district, regional, and national levels, development indicators are frequently measured. However, it is still rarely done at the local level. Because each location has their own unique characteristics, measuring sustainability at the regional level could not always be applied locally. The availability of data at the village level strongly encourages the local measurement of sustainable development index. The economic, social, and environmental dimensions of Mandailing Natal Regency's development are still constrained. Which will need the measurement of the sustainable development index Furthermore, policy priorities must be appropriate for each location's level of development sustainability in order to improve sustainable development. This study aims to identify regional development of each village, identify indicators that describe sustainable development at the local level and recommend the Local Sustainable Development Index (IPBL) value as a development directive in Mandailing Natal regency. The IPBL index can be used to inform local policy about the decision of locational-based spatial development. The methods of research used were scalogram analysis and supervised classification, Factor Analysis (FA), Local Indicator of Spatial Autocorrelation(LISA), and K Means Clustering. Development is encouraged in areas with low sustainable achievement in all dimensions of development. According to the results, Village Development Index almost is in the medium category (89 percent). Forest land cover was generally 43% in 2011, but it was decreased by 15% in 2018. At the village level, located in the northwest had highest land cover changes, and have a low village development index. The results of factor analysis on 21 variables/indicators representing economic, social, and environmental dimensions were reduced to 13 variables. Mandailing Natal's level of sustainable economic development was generally medium category in 2011, with several villages progressing from low category to the medium category in 2018. In 2011, the sustainability of social development was categorized as low, several villages saw an increase in the index value category in 2018. In 2018, the sustainability of environmental development decreased from the medium to the low category. In the east of the research location, the spatial pattern of economic IPBL and social IPBL is also of the High-high (HH) cluster type, while the IPBL3 distributions of the HH cluster type in the northwest. To simplify guidance of location-based spatial development, this region village is categorized into 4 clusters. Since the achievement of social and environmental sustainability index is low, cluster 3 (which covered by 66,34%) is the main focus of development in Mandailing Natal Regency. The next policy priority should be delivered to the member of cluster 1, due to the low achievement of IPBL in two dimensions (economic and social dimensions).

6. Nama : Akhmad Munasik Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Kualitas *Website* Pemerintah (Studi Pada Layanan Pertanahan Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Surakarta)
Kata kunci : Kualitas website, Layanan elektronik, *e-Government*, Kualitas layanan
Keywords : *website quality, electronic services, e-government, service quality*
-

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas website pada Layanan Pertanahan Elektronik di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Penelitian ini menggunakan konsep dari Delone dan McLean (2003) dengan menggunakan ukuran kualitas sistem; kualitas informasi; kualitas layanan dan kepuasan pengguna. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara yang mendalam dan terstruktur, sedangkan data sekunder adalah data yang didapatkan dari luar objek penelitian seperti peraturan perundang-undangan dan dokumen organisasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa website Layanan Pertanahan Elektronik berfungsi dengan baik dalam membantu kegiatan layanan di Kantor Pertanahan Kota Surakarta. Namun demikian dari beberapa kriteria kualitas website masih belum optimal. Dari segi kualitas sistem website beberapa item masih harus ditingkatkan, seperti keterlambatan respon dari website ketika diakses oleh banyak pengguna terutama pada waktu-waktu tertentu atau pada jam sibuk. Dari segi Kualitas Informasi, informasi yang ditampilkan website masih belum lengkap, tidak tersedia informasi kontak, email, dan menu FAQ masih kosong. Dari segi kualitas layanan, website sudah cukup baik dalam memberikan layanan kepada pengguna. Komunikasi antara staf pendukung dari kantor pertanahan dengan pengguna berjalan dengan baik. Komunikasi dapat dilakukan melalui sambungan telepon, pesan melalui website atau melalui Whats app Group (WAG). Namun staf pendukung website masih dibebani dengan pekerjaan lain sehingga terkadang terlambat dalam menanggapi keluhan dari pengguna. Dari segi kepuasan, ada pengguna yang merasa puas dan tidak puas. Pengguna merasa puas karena website mudah digunakan dan efektif membantu menyelesaikan pekerjaan, sedangkan pengguna merasa tidak puas dikarenakan terkadang website memiliki respon yang lambat dan juga kesiapan data sertipikat yang belum update.

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan manfaat dalam menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta memperkaya kajian teori e-Government. terutama yang terkait dengan kualitas website layanan elektronik pada sektor publik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi penyelenggara sistem informasi dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai bahan masukan dalam menentukan kebijakan terkait dalam pengembangan layanan pertanahan elektronik yang lebih baik.

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the quality of the website on the Electronic Land Service at the Surakarta City Land Office. This study uses the concept of Delone and McLean (2003), by using dimension of system quality; information quality; service quality and user satisfaction. The research design used is qualitative with a descriptive approach. The data obtained in this study are primary and secondary data, primary data obtained by means of in-depth and structured interviews, while secondary data is data obtained from outside the object of research such as legislation and organizational documents.

The results of the study indicate that the Electronic Land Service website functions well in assisting service activities at the Surakarta City Land Office. However, from several criteria the quality of the website is still not optimal. In terms of the quality of the website system, several items still need to be improved, such as the delay in the response of the website when it is accessed by many users, especially at certain times or during peak hours. In terms of quality of information, the information displayed on the website is still incomplete, there is no contact information, email, and the FAQ menu is still empty. In terms of service quality, the website is quite good in providing services to users. Communication between the support staff from the land office and the users went well. Communication can be done by telephone, message via the website or through the Whats App Group (WAG). However, the support staff is still burdened with other work so that sometimes they are late in responding to complaints from users. In terms of satisfaction, there are users who are satisfied and dissatisfied. Users are satisfied because the website is easy to use and effective in helping to complete the work, while users are dissatisfied because sometimes the website has a slow response and also the readiness of certificate data that has not been updated.

The results of this study are expected to be able to contribute and also benefit in increasing the author's knowledge and insight as well as enriching the study of e-Government theory, especially those related to the quality of electronic service websites in the public sector. In addition, this research is expected to be information for information system organizers, in this case the Land Office and the Ministry of Agrarian and Spatial Planning/National Land Agency (Kementerian ATR/BPN) as input in determining related policies in the development of better electronic land services.

7. Nama : Victor Esmen Mbeta Wangge Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Kebijakan Manajemen Pelatihan Aparatur Pemerintah Kota
Cilegon Dalam Era Disrupsi
Kata kunci : Analisis kebijakan, Manajemen pelatihan, Aparatur, Disrupsi
Keywords : *Policy Analysis, Management, Training, Apparatus, Disruption*
-

ABSTRAK

Penelitian ini berjenis penelitian dengan metode campuran (kualitatifkuantitatif). Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan pelatihan aparatur di pemerintah kota Cilegon sekaligus menyediakan informasi kebijakan yang berguna bagi para pembuat kebijakan terkait bagaimanakah kebijakan pelatihan yang tepat dan juga adaptif sesuai dengan tuntutan era disrupsi saat ini.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara pada delapan informan pada lingkup pemerintah kota Cilegon – Banten, yang kemudian didukung dengan hasil studi dokumentasi. Teknik observasi lapangan tidak dapat dilakukan pada penelitian ini karena situasi sedang pandemi COVID19. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan mengikuti kaidah-kaidah analisis kebijakan secara terintegrasi, yaitu dengan mengkombinasikan analisis retrospektif dan analisis prospektif kebijakan. Analisis retrospektif dilakukan dengan teknik evaluasi formal-proses retrospektif. Sedangkan analisis prospektif dilakukan dengan teknik forecasting (proyeksi) yang didukung dengan teknik analytical hierarchy process (AHP) menggunakan Skala Saaty (1990) untuk menyeleksi alternatif kebijakan.

Analisis retrospektif dalam penelitian ini menghasilkan beberapa faktor yang menyebabkan kebijakan manajemen pelatihan aparatur di pemerintah kota Cilegon tidak berjalan dengan baik, yaitu; belum terciptanya keadilan pemenuhan hak pelatihan secara menyeluruh; cara perekrutan peserta pelatihan tidak didahului dengan analisis kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja; belum disusunnya kurikulum pelatihan, serta tidak dilakukannya penilaian kesesuaian kurikulum / silabus yang ditawarkan pihak penyelenggara; mindset para pimpinan yang lebih mengutamakan pelatihan kompetensi manajerial dibandingkan kompetensi teknis, sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk kompetensi manajerial selalu diberi perhatian lebih daripada anggaran untuk kompetensi teknis; adanya kebijakan memberikan kebebasan kepada peserta untuk memanfaatkan waktu tersisa apabila kegiatan pelatihan selesai lebih cepat dari waktu yang dijadwalkan, sehingga peserta berkesempatan untuk jalan-jalan / pelesiran; tidak dilakukannya evaluasi penguasaan materi berupa ujian akhir atau bentuk penugasan lainnya kepada peserta sehingga tidak ada jaminan bahwa peserta telah menguasai materi; dan belum dilakukannya evaluasi transfer diklat sehingga tidak dapat diketahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam keberhasilan pemanfaatan kompetensi baru yang dimiliki aparatur di tempat kerja. Sedangkan analisis prospektif kebijakan menghasilkan terpilihnya alternatif model e-

learning dengan skor tertinggi 0,39332981 sebagai model pelatihan yang kompatibel dan adaptif dengan tuntutan era disrupsi saat ini.

ABSTRACT

This research is a research with mixed methods (qualitative-quantitative). This study aims to evaluate the planning, implementation and evaluation stages of apparatus training policies in the city government of Cilegon as well as providing useful policy information for policy makers regarding how appropriate and adaptive training policies are in accordance with the demands of the current era of disruption.

This research was conducted by conducting interviews with eight informants in the Cilegon - Banten city government, which were then supported by the results of a documentation study. Field observation techniques cannot be carried out in this study because of the current COVID19 pandemic situation. The data that has been collected is then analyzed by following the principles of integrated policy analysis, namely by combining retrospective analysis and prospective policy analysis. Retrospective analysis was performed using a retrospective formal-process evaluation technique. Meanwhile, prospective analysis is performed using forecasting (projection) techniques supported by analytical hierarchy process (AHP) techniques using the Saaty Scale (1990) to select policy alternatives.

The retrospective analysis in this study resulted in several factors that led to the management policy of apparatus competency development in the city government of Cilegon not running well, namely; justice has not been created in the fulfillment of training rights as a whole; how to recruit trainees is not preceded by a competency gap analysis and performance gap analysis; the training curriculum has not been prepared, and the curriculum / syllabus appropriateness assessment offered by the organizers has not been conducted; the mindset of leaders who prioritize management competency training over technical competence, so that the budget allocation for managerial competence is always given more attention than the budget for technical competence; There is a policy of giving participants the freedom to take advantage of the remaining time if the training activities are completed earlier than the scheduled time, so that participants have the opportunity to take a walk / excursion; no evaluation of mastery of the material in the form of final exams or other forms of assignment to participants so that there is no guarantee that participants have mastered the material; and the evaluation of the transfer of education and training has not been carried out so that the factors that influence the successful use of the new competencies possessed by apparatus in the workplace cannot be identified. Meanwhile, the prospective policy analysis resulted in the selection of an alternative e-learning model with the highest score of 0.39332981 as a training model that is compatible and adaptive to the demands of the current era of disruption.

8. Nama : Fadhillah Syahbana Rangkuti Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Hiroshima University Negara : Jepang
Judul tesis : *The Impact Of The Ease Of Yacht Entrance On The Determinants Of Inbound Tourism Demand In Indonesia*
Kata kunci : Pariwisata yacht; Kebijakan pariwisata; Permintaan pariwisata; difference-in-differences with fixed-effect; Indonesia
Keywords : *Yacht tourism, Tourism policy, Tourism demand, Difference-in-differences with fixed-effect, Indonesia*
-

ABSTRAK

Kami menguji dampak kebijakan kemudahan pemasukan kapal wisata asing terhadap permintaan pariwisata di Indonesia menggunakan data panel kedatangan wisatawan asing bulanan, berdasarkan pelabuhan masuk antara Januari 2012 dan Desember 2016. Penelitian ini adalah studi pertama yang memberikan bukti empiris tentang dampak kebijakan kemudahan pemasukan kapal wisata asing terhadap permintaan pariwisata. Menggunakan pendekatan Difference-in-differences dengan fixed effect, perhitungan kami menunjukkan bahwa kebijakan tersebut meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara rata-rata sebesar 61,2% untuk 14 pelabuhan yang menerapkan kebijakan kemudahan masuk kapal wisata asing.

ABSTRACT

We examine the impact of yacht entry facilitation policy on inbound tourism demand in Indonesia using monthly foreign tourist arrivals data panels set, based on ports of entry and months between January 2012 and December 2016. The paper is the first study to provide empirical evidence on the impact of yacht entry facilitation policy on inbound tourism demand. Using the Difference-in-differences with fixed effect approach, our calculations show that the policy increases foreign tourist visits by 61.2% on average for 14 ports that implemented the ease of yacht entrance policy.

9. Nama : Bangun Indra Permadi Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Universitas linkage : Ritsumeikan Asia Pacific University Negara : Jepang
Judul tesis : *Rent-seeking, Political Budget Cycles, and Audit Opinion: an Analysis of Local Spending in Indonesia*
Kata kunci : Rent-seeking, Pemerintah Daerah, Dana Alokasi Umum, Pendapatan Daerah, Pilkada, Calon Petahana, Opini BPK
Keywords : *Rent-seeking, Local government, Unconditional transfer, Local revenue, Election, Incumbency, Audit opinion*
-

ABSTRAK

Salah satu faktor yang sering dikaitkan dengan buruknya kinerja pemerintah daerah adalah perilaku rent-seeking. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa perilaku rentseeking terjadi dalam cara pemerintah mengalokasikan anggaran, dimana setiap perubahan porsi anggaran pada masing-masing fungsi merupakan sinyal terjadinya perilaku rent-seeking. Penelitian ini bertujuan untuk mengestimasi ukuran rent-seeking pada pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan metode Katz & Rosenberg (1989). Selain itu, beberapa variabel diprediksi sebagai faktor yang menentukan ukuran dari rent seeking tersebut diantaranya adalah: ketersediaan sumber daya keuangan dan peristiwa politik seperti pilkada. Selain itu, opini auditor juga diperkirakan sebagai variable yang dapat mengurangi timbulnya perilaku rent-seeking.

Penelitian ini menggunakan analisis data panel dari 305 pemerintah daerah selama periode 2015 hingga 2019 yang terdiri dari: belanja aktual per sektor, pendapatan pemerintah daerah, informasi mengenai tahun pilkada dan calon petahana, dan opini BPK atas laporan keuangan pemda. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa perilaku rent-seeking cenderung mengalami penurunan setelah tahun pemilu nasional 2014-2015. Hal ini memerlukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan bahwa pengeluaran pemerintah daerah terpengaruh langsung oleh kegiatan politik pada tahun-tahun pemilu di Indonesia. Kedua, tren penurunan rent seeking tersebut juga dipengaruhi oleh peningkatan tata kelola keuangan yang terlihat dari peningkatan jumlah 'opini wajar tanpa pengecualian' dari BPK. Hal ini menunjukkan bahwa bahwa audit dapat berperan sebagai mekanisme yang efektif untuk menahan perilaku rent seeking. Selain itu, kami mengamati bahwa porsi belanja daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat seperti untuk layanan publik, pendidikan dan kesehatan, mengalami peningkatan dimana pada saat yang bersamaan terjadi penurunan rent seeking. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan atau pengawasan dari masyarakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam membatasi perilaku rent seeking di Indonesia.

ABSTRACT

One factor that is often associated with the poor performance of the local government is rent-seeking behavior. Previous studies demonstrated that rent-seeking behavior occurred in the way the government allocating budgets based on opportunistic behavior. It is suggested that every change in the share of budget on each function indicates the rentseeking behavior. This study aims to calculate the estimated rent-seeking size in regional government in Indonesia based on Katz & Rosenberg's (1989) method. Besides, several variables are predicted as factors that determine rent-seeking size: the availability of resources and political events. In addition, auditing is introduced as an expected control mechanism that may dampen rent-seeking size.

The current study employs a cross-section time-series panel dataset of 305 local governments during 2015 to 2019. This data consists of actual spending allocation per sector, local government revenue, information regarding election year and incumbency candidates, and audit opinion from supreme audit institution.

First, during the observed years, the assumed rent-seeking size, estimated by local governments spending, was in a decreasing trend after the national election year of 2014-2015. Though it entails further investigation, this suggests that the local government spending is possibly biased by political activities in election years in Indonesia. Second, the mentioned decreasing trend of assumed rent-seeking size was associated with the increase number of 'unqualified opinion' in auditing, which may suggest that auditing is becoming an effective governance mechanism to restraint opportunistic rent-seeking behavior. Third, we observe that the share of local spending in public services, education and health, seemingly responding to the demand of general public, was increasing in the mentioned decreasing trend in the total size. This may also suggest that public demand is becoming an effective governance to restraint opportunistic rent-seeking behaviour in Indonesia.

10. Nama : A. Anna Rahayu Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Hasanuddin
Judul disertasi : Analisis Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah Terhadap
Perkembangan Kecamatan di Kabupaten Pinrang
Kata Kunci : Aksesibilitas, Perkembangan wilayah, Indeks Alpha, Skalogram
Keywords : *Accessibility, Regional development, Index Alpha, Scolagram*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang. Dalam perkembangan wilayah ada dua variabel yang dapat dilihat, yakni pertama, aksesibilitas wilayah dengan indikator luas wilayah dan jaringan jalan dan kedua, wilayah dengan indikator sosial ekonomi berupa sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana peribadatan, kemudian indikator kependudukan yang berupa jumlah penduduk, kepadatan penduduk, dan aktivitas penduduk. Tujuan selanjutnya adalah melihat apakah indikator aksesibilitas wilayah dan indikator perkembangan wilayah memiliki korelasi yang signifikan terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang.

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui kajian pustaka dan pengumpulan dokumen serta informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) di Kabupaten Pinrang tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai signifikansi $p=0,006$ ($<0,01$) yang menunjukkan bahwa hubungan antara aksesibilitas wilayah (indeks alpha) dan perkembangan wilayah (nilai skalogram) signifikan pada level signifikansi 1%. Nilai r pada penelitian ini, yaitu 0,74 (berada di antara 0,50 – 0,75). Artinya, hubungan korelasinya kuat. Hasil lain menunjukkan hubungan yang searah karena keduanya menghasilkan angka (+). Artinya, jika indeks alphanya naik, nilai skalogramnya juga akan meningkat. Begitu pun sebaliknya sehingga dapat dikatakan bahwa aksesibilitas wilayah sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang. Semakin tinggi aksesibilitas wilayah di suatu kecamatan di Kabupaten Pinrang, maka semakin tinggi pula tingkat perkembangan wilayahnya, begitu pun sebaliknya.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of the level of regional accessibility on the development of districts in Pinrang Regency. In regional development there are two variables that can be seen first Accessibility of the region with indicators of the area and road network. Second, the development of the region with socio-economic indicators in the for of educational facilities, health facilities and worship facilities, then population indicators in the form of population density and regional accessibility and regional development indicators have significant correlations to the development of districts in Pinrang regency.

The method used is quantitative descriptive using secondary data. This secondary data were obtained from literature study and collection of documents and information from the Central Statistics Agency (BPS) in Pinrang Regency in 2019.

The results of this study indicate that the P-Value significance value of 0.006 ($\alpha < 0,01$) indicates that the relationship between regional accessibility (alpha index) and regional development (scalogram value) is significant at the 1% significance level. The value of r in this study is 0.74, between 0.50 to 0.75 it means that their relationship is strong. This data shows a unidirectional relationship because both of them produce numbers (+) meaning that if the alphabet index rises, the value of the scalogram will also increase and vice versa. So it can be concluded that the accessibility of the region is very influential on the development of districts in Pinrang Regency. The higher the accessibility of the area the higher the level of regional development and vice versa.

11. Nama : Nur Seti Mulyasari Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Persepsi Layanan Angkutan Umum Menggunakan *Structural Equation Modeling (SEM)* Studi Kasus : Trans Jogja
Kata Kunci : Faktor persepsi, Penumpang, Angkutan umum, Kepuasan, Kenyamanan, Trans Jogja
Keywords : perception factors, passengers, public transportation, satisfaction, comfort, Trans Jogja
-

ABSTRAK

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang terus berkembang dimana masyarakat luar Yogyakarta melakukan perjalanan masuk dan keluar Yogyakarta dalam jumlah yang besar setiap hari. Oleh karena itu perlu adanya pengembangan transportasi massal yang dapat memberikan solusi pergerakan perjalanan tersebut. Tujuan penelitian ini adalah menentukan faktor yang mempengaruhi penggunaan angkutan umum berdasar persepsi penumpang dan potensi penumpang Trans Jogja.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dalam metode pengumpulan data kuantitatif dengan cara kuesioner dan analisis data dengan menggunakan analisis distribusi kuantitatif. Data dikumpulkan dengan membagikan kuesioner kepada masyarakat berdasarkan grup penumpang dan grup potensi penumpang Trans Jogja. Untuk menganalisis data tersebut digunakan metode *Structural Equation Modeling (SEM)* dengan software *Linear Structural Relationships (LISREL)*. Analisis SEM digunakan untuk menganalisis hubungan antara nilai, kualitas, skor terbaik, dan kepuasan pelanggan sehingga dapat menentukan model terbaik untuk menganalisis faktor persepsi setiap grup. Indikator untuk mengukur persepsi penumpang dan potensi penumpang ini terdapat enam aspek, yaitu : (1) aspek keamanan, (2) aspek keselamatan, (3) aspek kenyamanan, (4) aspek kesetaraan, (5) aspek keterjangkauan, (6) aspek keteraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik responden yang terdiri dari kelompok penumpang dan potensial penumpang didominasi oleh masyarakat dari Kota Yogyakarta (21,21%) dengan usia penumpang 26-35 tahun (34%), maksud perjalanan adalah bekerja sebagai PNS/TNI/POLRI. Selain itu responden didominasi oleh masyarakat dengan pendidikan DIV/S1. Penelitian ini menggunakan 2 model untuk mengukur aspek kepuasan yaitu persamaan dengan moderasi aspek kenyamanan dan persamaan tanpa moderasi. Model pada grup penumpang dengan moderasi kenyamanan merupakan persamaan yang paling sesuai dengan kondisi lapangan. Persamaan tersebut adalah $Kepuasan = 0,027$ Kenyamanan + $0,011$ Keamanan + $0,21$ Keselamatan + $0,17$ Keterjangkauan + $0,63$ Kesetaraan - $0,27$ Keteraturan. Berdasarkan persamaan tersebut diperlukan perbaikan layanan Trans Jogja. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah perbaikan *Park and Ride* Gamping, pembenahan jalur trayek Trans Jogja, pengaturan sirkulasi lalu lintas, peremajaan bus Trans Jogja serta pendidikan dan latihan lalu lintas pengemudi Trans Jogja.

ABSTRACT

Yogyakarta Special Region is a growing province where people outside of Yogyakarta travel in and out of Yogyakarta in large numbers every day. Therefore it is necessary to develop mass transportation that can provide solutions to the movement of the trip. The purpose of this study is to determine the factors that influence the use of public transportation based on passenger perceptions and potential Trans Jogja passengers.

The method used in this study is divided into quantitative data collection methods by questionnaire and data analysis using quantitative distribution analysis. Data was collected by distributing questionnaires to the public based on passenger groups and potential groups of Trans Jogja passengers. To analyze the data the Structural Equation Modeling (SEM) method is used with Linear Structural Relationships (LISREL) software. SEM analysis is used to analyze the relationship between value, quality, best score, and customer satisfaction so that it can determine the best model for analyzing perceptions of each group. There are six aspects of indicators to measure passenger perceptions and potential passengers, namely: (1) security, (2) safety, (3) comfort, (4) equality, (5) affordability, (6) regularity.

The results showed that the characteristics of respondents consisting of passenger and potential passengers groups were dominated by people from the city of Yogyakarta (21.21%) with passenger ages 26-35 years (34%). The purpose of the trip was to work as a civil servant / military / police. In addition, respondents were dominated by the community with DIV / S1 education. This study uses 2 models to measure the satisfaction aspect, namely equality with moderation of comfort aspects and equality without moderation. Models in the passenger group with moderation comfort are the most appropriate equation in field conditions. The equation is $Satisfaction = 0.027 \text{ Comfort} + 0.011 \text{ Security} + 0.21 \text{ Safety} + 0.17 \text{ Affordability} + 0.63 \text{ Equality} - 0.27 \text{ Regularity}$. Based on this equation, Trans Jogja service needs to be improved. Recommendations that can be made are the improvement of Gamping Park and Ride, improvement of the Trans Jogja route, regulation of traffic flow circulation, rejuvenation of Trans Jogja buses, and education of Trans Jogja driver traffic.

12. Nama : Selvi Stephany Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung
Universitas linkage : University of Groningen Negara : Belanda
Judul tesis : *Qualitative Comparative Analysis in Space Utilization Control in Indonesia*
Kata kunci : Pengendalian pemanfaatan ruang, Pelanggaran tata ruang, Analisis kualitatif komparatif, Fuzzy set, Hubungan kausal Tata ruang di Indonesia
Keywords : *Space utilization control, Spatial violation, Qualitative Comparative Analysis, Fuzzy set, Causal relationship, Spatial planning in Indonesia*
-

ABSTRAK

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan langkah penting untuk memastikan penerapan rencana tata ruang tidak menyimpang. Di Indonesia, penataan ruang saat ini berfokus pada pengendalian karena tingginya tingkat pelanggaran pemanfaatan ruang yang terjadi. Banyak penelitian telah dilakukan terkait pelanggaran ini, namun kebanyakan penelitian masih berfokus pada kasus tertentu secara parsial atau hanya menyoroti pelanggaran di kota, kabupaten, atau wilayah provinsi tertentu. Melakukan perbandingan antar provinsi sebagai kasus akan memperkaya gambaran tentang kondisi pelanggaran tata ruang yang terjadi di Indonesia. Dengan menggunakan metode Analisis Kualitatif Komparatif (QCA), studi ini mencoba mengidentifikasi konfigurasi dari kondisi-kondisi yang mengarahkan pada terjadinya pelanggaran dan lemahnya fungsi pengendalian sebagai hasil akhir. Kondisi-kondisi yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor yang terkait dengan pengendalian dalam siklus proses penataan ruang, maupun bagian dari pelaksanaan pengendalian itu sendiri. Terdapat lima kondisi yang akan dianalisis, yaitu: rencana tata ruang, pengaturan, pembinaan, instrumen pengendalian, dan konteks. Berbagai indikator dan sub-indikator akan menjelaskan masing-masing kondisi berdasarkan teori dan literatur. Indikator-indikator dan subindikator dari kondisi-kondisi tersebut dikumpulkan dan dipersiapkan terlebih dahulu sebelum kemudian dikalibrasi dan dianalisis menggunakan metode QCA. Dalam analisis QCA, data yang telah dikalibrasi akan dibandingkan untuk menghasilkan konfigurasi solusi. Solusi yang berupa konfigurasi ini lebih lanjut akan menjelaskan hubungan kausal antar kondisi-kondisi dan hasil akhir atau keluaran yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, diperoleh tiga konfigurasi, yang salah satunya merupakan hasil yang berlawanan dengan intuisi atau ekspektasi. Berangkat dari temuan yang tidak searah dengan ekspektasi yang dibangun dari landasan teori, penelitian dilanjutkan dengan studi terhadap kasus yang representatif pada setiap konfigurasi untuk mendapatkan penjelasan yang lebih mendalam tentang hubungan yang terjadi. Penelitian pada kasus-kasus yang representatif menunjukkan kemungkinan adanya intervensi pada solusi yang tidak sesuai ekspektasi dari faktor lain. Studi ini menyimpulkan bahwa kelima kondisi yang dianalisis menyebabkan lemahnya pengendalian pemanfaatan ruang dengan kombinasi yang berbeda-beda (sebagai INUS atau sufficient conditions). Hasil

ini memberikan gambaran dan masukan untuk para pemangku kepentingan dan pelaku penataan ruang, baik di bidang akademisi maupun praktisi, tentang bagaimana memperlakukan setiap kondisi untuk mencegah keluaran yang ingin dihindari dengan berdasar pada hasil analisis dalam penelitian ini.

ABSTRACT

Controlling the space utilization is a crucial step to ensure that the implementation of the spatial plan does not deviate. In Indonesia, spatial planning recently focuses on control because of the high level of violations that occur. Many studies have been conducted regarding the violation of spatial use, but most of the research focuses on a certain case partially or only focuses on a particular city, district, or province. Comparing between provinces as a case will enrich the picture of the occurrence of spatial violations in Indonesia. Using the Qualitative Comparative Analysis (QCA) method, this study tries to identify the configurations of conditions that lead to violations and weak control as outcomes. These conditions are factors related to control in the spatial planning cycle and part of the control itself. There are five conditions analyzed: spatial plan, regulation, guidance, control instrument, and context. Various indicators and sub-indicators describe each condition based on the literature. The indicators and sub-indicators of these conditions are collected and prepared before being calibrated and analyzed using the QCA method. In QCA analysis, the calibrated data are compared to produce a solution configuration. This solution or configuration describes the causal relationship between conditions and outcomes. Based on the results of the analysis, obtained three configurations, one of which is counterintuitive. Regarding findings that did not meet the theoretical expectations, the study continued with (representative) case studies on each configuration to get a more in-depth explanation of the relationship. Studies in representative cases show the possibility of intervention in the counterintuitive solution from other factors. This study concludes that the five conditions analyzed cause weak control over space utilization with different combinations (as INUS or sufficient conditions). These results provide an overview and input for spatial planning stakeholders and academics on how to treat each of these conditions to prevent outcomes based on solutions that emerge from the analysis results.

PERENCANAAN

1. Nama : Farina Rahmawati Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Judul tesis : Perencanaan dan Political Budget Cycle Studi Kasus Pemerintah Daerah Peserta Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017 dan Tahun 2018
Kata kunci : Political budget cycle, konsistensi perencanaan, incumbent, Indonesia, data panel
Keywords : *political budget cycle, planning consistency, incumbent, Indonesia, panel data*
-

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empirik hubungan antara perencanaan terhadap praktek *political budget cycle* pada anggaran pemerintah daerah peserta Pilkada Tahun 2017 dan Tahun 2018. Dengan menggunakan *fixed effect* metode *least square dummy variables*, penelitian ini menganalisis hubungan pengeluaran pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja modal, belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi, anggaran fungsi pendidikan, fungsi kesehatan dan fungsi infrastruktur dengan perilaku *political budget cycle* setelah mempertimbangkan peran perencanaan. Hasil studi menemukan bahwa terdapat konsistensi perencanaan dengan penganggaran dapat mengendalikan diskresi kepala daerah terhadap peningkatan maupun penurunan pengeluaran anggaran baik pada dua tahun sebelum pemilu, satu tahun sebelum pemilu maupun pada tahun penyelenggaraan pemilu. Besaran penurunan dan peningkatan tersebut berbeda antar jenis pengeluaran. Pada tahun penyelenggaraan pilkada dan satu tahun sebelum pelaksanaan pilkada, terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja modal, sedangkan pada dua tahun sebelum pelaksanaan pilkada terdapat peningkatan secara signifikan pada alokasi belanja pegawai. Hubungan perencanaan dengan *political budget cycle* signifikan pada dua tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja berikut yaitu fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, dan fungsi infrastruktur sedangkan hubungan perencanaan dengan *political budget cycle* signifikan pada satu tahun sebelum pilkada untuk alokasi belanja modal dan belanja bantuan sosial, hibah dan subsidi.

ABSTRACT

This study aims to find empirical evidence of the relationship between planning and the practice of political budget cycles in local government which held simultaneous regional head election in 2017 and 2018. By using the fixed-effect method of least square dummy variables, this study analyzes the relationship between local government spending including personnel expenditure, capital expenditure, spending on social assistance, grants and

subsidies, budgeting for education functions, health functions and infrastructure functions with the behaviour of the political budget cycle after considering the role of planning. The results found that consistency between planning and budgeting can control regional heads' discretion on the increase and decrease in budget expenditures both in the two years before the election, one year before the election and election year. The magnitude of the reduction and increase differs between types of expenditure. In an election year and one year before, there was a significant increase in the allocation of capital expenditures, while in the two years before election there was a significant increase in the allocation of personnel expenditure. The relationship between planning and the political budget cycle is significant in two years before the election for the following expenditure allocations, namely the education function, health function, and infrastructure function, while the relationship between planning and the political budget cycle is significant in one year before the election for the allocation of capital expenditure and social assistance expenditure, grants and subsidy.

2. Nama : Arina Wiyanika Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Koordinasi Dalam Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (Studi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun)
Kata kunci : Koordinasi, Perencanaan, Aset daerah
Keywords : *Coordination, Planning, Regional Asset*
-

ABSTRAK

Perencanaan kebutuhan dan penganggaran merupakan kegiatan awal yang penting dilakukan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah mendefinisikan perencanaan kebutuhan sebagai kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam menentukan tindakan di masa mendatang. Penyusunan RKBMD di Kota Madiun dimulai pada tahun 2015 berawal dari adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2013 dikarenakan tindak lanjut atas peraturan daerah tentang barang milik daerah yang mengatur tentang tata cara perencanaan kebutuhan barang milik daerah belum diatur dalam peraturan Walikota. Namun maksud dan tujuan penyusunan peraturan Walikota Madiun Nomor 13 Tahun 2015 untuk mengintegrasikan pengelolaan barang milik daerah dengan pengelolaan keuangan daerah di lingkup Pemerintah Daerah belum terlaksana dan penyusunan RKBMD masih manual. Pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran perlu koordinasi yang baik guna keselarasan pemahaman antar aktor yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam dan menganalisis tentang : 1. Pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan RKBMD di Pemerintah Kota Madiun; 2. Faktor-faktor penghambat koordinasi dalam penyusunan RKBMD di Pemerintah Kota Madiun. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dan analisis Model Interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana, diperoleh kesimpulan: pertama, pelaksanaan koordinasi vertikal dan horizontal dalam penyusunan RKBMD belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 utamanya dalam hal ketepatan pelaksanaan jadwal kegiatan dan penggunaan standar barang dan standar kebutuhan. Kedua, faktor-faktor penghambat koordinasi vertikal dalam penyusunan RKBMD yaitu : terbatasnya jumlah SDM penyusun RKBMD yang memahami terkait penyusunan RKBMD dan belum adanya prasarana pendukung berupa standar barang dan standar kebutuhan dalam melakukan penelaahan. Sedangkan faktor-faktor penghambat koordinasi horizontal dalam penyusunan RKBMD yaitu : kondisi pengurus barang sebagai sumber daya manusia penyusun RKBMD yang kurang memahami perencanaan barangnya dan masih terdapat

pergantian personil di tengah tahun anggaran berjalan serta belum adanya standar barang dan standar kebutuhan yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun RKBMD.

ABSTRACT

Needs planning and budgeting are important initial activities and are an integral part of the management of regional asset. Minister of Home Affairs Regulation Number 19 of 2016 concerning Guidelines for the Management of Regional Asset defines needs planning as an activity to formulate details of the needs for regional asset to link past procurement of asset with ongoing conditions as a basis for determining future actions. The needs planning of regional asset in Madiun City began in 2015 with the findings of the Financial Audit Board on the 2013 Regional Government Financial Report because the follow-up to regional regulations on regional asset that regulates planning procedures for needs of regional asset has not been regulated in a Mayor Regulation. However, the aims and objectives of Madiun Mayor Regulation Number 13 of 2015 to integrate regional asset management with regional financial management within the scope of Regional Government have not been implemented and the needs planning of regional asset is still manual. Implementation of needs planning and budgeting needs good coordination in order to harmonize understanding among the actors involved.

This study aims to determine and analyze in depth about: 1. Implementation of coordination in needs planning of regional asset in Madiun City Government; 2. The factors inhibiting coordination in needs planning of regional asset in Madiun City Government. By using a qualitative approach, and analysis of the Interactive Model from Miles, Huberman and Saldana, conclusions are obtained: first, the implementation of vertical and horizontal coordination in needs planning of regional asset has not fully referred to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 19 of 2016, especially in terms of the accuracy of implementing the schedule of activities and usage goods standard and needs standard. Second, the factors inhibiting vertical coordination in needs planning of regional asset, namely: the limited number of human resources who understand the needs planning of regional asset and the absence of supporting infrastructure in the form of goods standard and needs standard of conducting the analysis. While the inhibiting factors for horizontal coordination in needs planning of regional asset, namely: the condition of human resource who compiles needs planning of regional asset who does not understand the planning of their regional asset and there is still a change of personnel in the middle of the current fiscal year and the absence of goods standard and needs standard that can be used as a reference in compiling needs planning of regional asset.

3. Nama : Andi Idil Sangiang Samang Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Perencanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan (Studi Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu)
Kata kunci : Perencanaan, Pelayanan Administrasi Kependudukan
Keywords : *Planning, Population Administration Services*
-

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh upaya Disdukcapil Kabupaten Pasangkayu dalam mencapai pelayanan yang maksimal melalui perencanaan pelayanan administrasi kependudukan. Kondisi empiris menunjukkan bahwa adanya ketimpangan antara input, process dan output dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan, perencanaan pelayanan yang tidak secara kompleks menyelesaikan kebutuhan pelayanan masyarakat dan belum optimalnya kerjasama antar stakeholders dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis : (1) Perencanaan pelayanan administrasi kependudukan, (2) Faktor pendukung dan penghambat dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan, (3) Alternatif perencanaan pelayanan administrasi kependudukan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendeskripsikan dan menganalisis berdasarkan fenomena dan fakta-fakta yang ada di lapangan. Fokus penelitian ini adalah : (1) Perencanaan pelayanan administrasi kependudukan, meliputi : SDM perencana dan proses perencanaan, (2) Faktor penghambat dan pendukung dan (3) Rekomendasi alternatif perencanaan pelayanan. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa : (1) SDM perencana Disdukcapil secara umum belum mampu mendukung terlaksananya perencanaan pelayanan administrasi kependudukan dilihat dari segi kualitas, kuantitas, koordinasi dan kerjasama yang masih belum optimal. Dalam hal proses perencanaan, Disdukcapil belum sepenuhnya melakukan penyusunan perencanaan secara maksimal sebagaimana penyusunan perencanaan dalam teori yang digunakan, tidak adanya keterlibatan masyarakat dan *Stakeholders* terkait dalam proses perencanaan sehingga sulitnya terbentuk pelayanan yang terintegrasi dan mencakup keseluruhan kebutuhan serta kepentingan yang ada. (2) Faktor pendukung dalam perencanaan pelayanan administrasi kependudukan terdiri dari : Sistem yang digunakan dan Perkembangan ilmu dan teknologi. Sedangkan faktor penghambatnya terdiri dari : Sumber daya manusia perencana, Pendanaan, dan Pendekatan kepada masyarakat. (3) Peneliti menyusun model perencanaan pelayanan yang memasukkan konsep partisipatif dan governance yakni melibatkan para stakeholders baik instansi lainnya, masyarakat maupun swasta dalam hal pemberian masukan, saran, pengembangan pelayanan melalui

kerjasama yang dilakukan melalui tahap menjaring masukan, analisis dan penentuan prioritas.

Peneliti kemudian menyampaikan saran diantaranya : (1) Secara aktif mencari informasi dan melibatkan diri dalam diklat-diklat perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan, mengusulkan pengadaan tenaga fungsional perencana dan meningkatkan intensitas pertemuan bagi para SDM perencana. (2) Membuat wadah pengumpul aspirasi dan keluhan pelayanan masyarakat atau menghadirkan perwakilan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan (3) Melakukan kajian yang mendalam terkait kondisi masyarakat, kebutuhan dokumen kependudukan masyarakat setiap wilayah (4) Memanfaatkan Desa/ Kelurahan dan Kecamatan untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, (4) Membentuk pelayanan yang terintegrasi melalui kerjasama atau kemitraan dengan para stakeholders. Contohnya seperti pelayanan terpadu oleh Disdukcapil yang menggandeng seluruh pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Disdukcapil (BPJS, Rumah Sakit, KUA, dll.) ataupun bentuk kerjasama lainnya.

ABSTRACT

This research is motivated by the efforts of Disdukcapil Pasangkayu Regency in achieving maximum service through population administration service planning. Empirical conditions indicate that there is an imbalance between input, process and output in population administration service planning, service planning that does not complexly solve community service needs and not optimal cooperation between stakeholders in the administration of population administration.

This study aims to describe and analyze: (1) Population administration service planning, (2) Supporting and inhibiting factors in population administration service planning, (3) Alternative population administration service planning. This research is a descriptive study with a qualitative approach, which describes and analyzes based on the phenomena and facts in the field. The focus of this research is: (1) Population administrative service planning, including: human resources planning and planning processes, (2) inhibiting and supporting factors and (3) recommendations for service planning alternatives. Data collection is carried out by observation, interview and documentation.

The results showed that: (1) Disdukcapil planners in general have not been able to support the implementation of population administration service planning in terms of quality, quantity, coordination and cooperation which are still not optimal. In terms of the planning process, Disdukcapil has not fully carried out the formulation of planning optimally as in the formulation of planning in the theory used, there is no involvement of the community and related stakeholders in the planning process so that it is difficult to form an integrated service that covers all existing needs and interests. (2) Supporting factors in population administration service planning consist of: the system used and the development of science and technology. While the inhibiting factors consist of: human resources planners, funding,

and approaches to society. (3) Researchers compile a service planning model that incorporates participatory and governance concepts, namely involving stakeholders, including other agencies, the public and the private sector in providing input, suggestions, development of services through cooperation carried out through the stages of gathering input, analysis and priority setting.

The researcher then gave suggestions including: (1) Actively seeking information and being involved in planning training and training which is held annually, proposing the procurement of planning functional personnel and increasing the intensity of meetings for human resource planners. (2) Creating a forum for collecting aspirations and complaints of community services or presenting community representatives in the planning process (3) Conducting an in-depth study regarding the condition of the community, the need for community population documents in each region (4) Utilizing villages / sub-districts and subdistricts to approach the community, (4) Forming an integrated service through cooperation or partnership with stakeholders. Examples include integrated services by Disdukcapil which collaborate with all parties related to Disdukcapil (BPJS, Hospitals, KUA, etc.) or other forms of cooperation.

4. Nama : Alim Fauzan Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : University of Miyazaki Negara : Jepang
Judul tesis : *Capability Approach for Evaluating Minapolitan Program in Klaten Regency, Central Java Province, Indonesia*
Kata kunci : Pendekatan kapabilitas, minapolitan, pengembangan wilayah
Keywords : *Capability approach, Minapolitan, Rural development, Spatial planning*
-

ABSTRAK

Program minapolitan dimaksudkan untuk merancang suatu kawasan yang dicirikan dengan adanya satu atau lebih inti kegiatan perikanan di kawasan pedesaan. Kawasan minapolitan ditentukan oleh jaringan praktis dan fraksional antara sistem permukiman dan sistem agribisnis dalam satu kesatuan ruang. Hasil dari program ini adalah kesejahteraan masyarakat yang dapat diwujudkan dengan kapabilitas masyarakat mengacu pada pendekatan kapabilitas Sen (2000). Pendekatan kapabilitas lebih sesuai untuk mengevaluasi program minapolitan karena kapabilitas masyarakat bersifat subjektif dan personal. Salah satu kawasan minapolitan yang perlu dievaluasi adalah "Desa Nila" yang terletak di Kecamatan Polanharjo, Karanganyam dan Tulung, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia.

Dengan menggunakan Indeks Kapabilitas Masyarakat dan Indeks Kapabilitas Tempat yang dirancang oleh Pramono (2016), penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengidentifikasi apakah program minapolitan dapat meningkatkan kesesuaian tempat untuk menunjang terciptanya kesejahteraan pembudidaya ikan 2) untuk mendeskripsikan factor-faktor yang mempengaruhi program minapolitan untuk meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan.

Analisis menunjukkan bahwa program minapolitan yang dilakukan di Kabupaten Klaten berdampak positif bagi kesejahteraan pembudidaya ikan yang ditunjukkan dengan kapabilitas masyarakat. Selain itu, program minapolitan dapat meningkatkan kesesuaian suatu tempat untuk menciptakan kesejahteraan, yang ditunjukkan dengan nilai koefisien tempat yang positif. Terdapat 11 kelompok faktor yang mempengaruhi keberhasilan program minapolitan di Kabupaten Klaten. Faktor-faktor tersebut terdiri dari dukungan program minapolitan untuk: 1) usaha budidaya ikan, 2) kesehatan pembudidaya ikan, 3) kehidupan sosial pembudidaya ikan, 4) pengetahuan dan perumahan, 5) kesehatan masyarakat, 6) jaringan usaha, 7) ketersediaan ruang/lahan tempat tinggal dan informasi, 8) aspirasi pembudidaya ikan tentang lahan budidaya, 9) biaya transportasi, 10) ketersediaan prasarana angkutan umum dan 11) kreativitas pembudidaya ikan.

ABSTRACT

Minapolitan programs are deliberated to design a region that is characterized by the existence of one or more fisheries activity cores in rural region. The minapolitan area is designated by the practical and fractional network between settlement system and agribusiness system in a spatial unit. The outcome of the program is people's well-being, which can be manifested by people's capability, according to Sen (2000). Since people's capability is subjective and personal, the capability approach is more suitable for evaluating minapolitan programs. One of the minapolitan regions that needs to be evaluated is "Desa Nila" (Tilapia Village), located in the sub-district of Polanharjo, Karangnom and Tulung, Klaten Regency, Central Java, Indonesia.

By using the community capability index and place capability supporting index proposed by Pramono (2016), this paper aims 1) to identify whether minapolitan programs can improve the suitability of place to ease the creation of fish farmer's well-being and 2) to describe factors affecting minapolitan programs to improve fish farmers' well-being.

Analysis reveals that minapolitan programs conducted in Klaten Regency have a positive impact on the well-being of fish farmers, as manifested by people's capability. Moreover, minapolitan programs can improve the suitability of a place to create well-being, as indicated by the positive value of place coefficient. There are 11 groups of factors influencing the success of minapolitan programs in Klaten Regency. The factors consist of minapolitan program support for: 1) fish farming business, 2) fish farmer healthy life, 3) fish farmer social life, 4) knowledge and housing, 5) community health, 6) business network, 7) the availability of space/land to stay and information, 8) fish farmer's aspiration regarding their farming land, 9) the transportation cost, 10) the availability of public transport infrastructure and 11) fish farmer creativity.

5. Nama : Ester Rufariza Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Ritsumeikan University Negara : Jepang
Judul tesis : *Technocratic And Participatory Aspects Of Port Development In Yogyakarta Special Province Case Study of Tanjung Adikarto and Sadeng Port*
Kata kunci : Pembangunan Pelabuhan, Perencanaan Partisipatif, Perencanaan Teknokratis, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Keywords : *Participatory planning, Port development, Technocratic planning, Yogyakarta Special Prov*
-

ABSTRAK

Sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi perikanan laut cukup tinggi, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta belum dapat memaksimalkan sector perikananannya. Belum adanya pelabuhan perikanan laut yang mampu menampung kapal berukuran besar diklaim sebagai salah satu penyebab utama. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian membangun pelabuhan baru setelah berhasil pada pembangunan pelabuhan Sadeng yang berskala lokal. Pelabuhan baru ini diharapkan mampu menampung kapal besar yang dapat beroperasi hingga ke ZEE dan dinamakan pelabuhan Tanjung Adikarto. Namun begitu, sepuluh tahun sejak dibangun, pelabuhan Tanjung Adikarto tersebut masih belum dapat dioperasikan karena adanya permasalahan teknis. Studi ini kemudian membandingkan aspek partisipatif dan teknokratis pembangunan pelabuhan di kedua lokasi untuk mengidentifikasi akar masalah pelabuhan Tanjung Adikarto dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kendala pembangunan pelabuhan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam studi ini dengan mewawancarai masyarakat yang tinggal di sekitar kedua pelabuhan untuk mendapatkan informasi mengenai manfaat dan perkembangan pelabuhan terkait. Hasilnya kemudian dibandingkan dengan pernyataan pejabat pemerintah dari aspek teknokratis. Didapatkan hasil bahwa penyebab terhambatnya pembangunan pelabuhan Tanjung Adikarto adalah karena aspek teknokratis dalam proses perencanaan melibatkan multi aktor dan multi kepentingan sehingga implementasinya tidak sesuai harapan, dan bukan karena aspek partisipatif. Disisi lain pelabuhan Sadeng membuktikan bahwa pelabuhan yang dibangun di lokasi yang tidak didukung oleh *hinterland* dan aksesibilitas yang baik dapat beroperasi dengan lancar bahkan berfungsi sebagai pemicu ekonomi di sekitarnya. Hal ini penting untuk dipelajari dari proses pembangunan pelabuhan Sadeng untuk diterapkan di Pelabuhan Tanjung Adikarto, terutama pada aspek partisipatif. Meskipun proses partisipatif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masih dalam derajat tokenisme, namun proses ini dapat ditingkatkan menjadi perencanaan kemitraan atau lebih. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan pembangunan pelabuhan di DIY adalah: 1. kualitas

dokumen perencanaan; 2. kemampuan finansial; 3. pelaku pembangunan (multi pelaku dan multi kepentingan). Sebagai bahan masukan dalam perencanaan di masa mendatang, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dapat mereplikasi proses perencanaan partisipatif yang ada di pelabuhan Sadeng pada daerah-daerah lain yang direncanakan akan dibangun proyek serupa yakni pelabuhan perikanan, untuk mengurangi resiko kegagalan proyek. Pendekatan partisipatif sejatinya dapat mendukung perencanaan teknokratik, dan sinergi antar pendekatan tersebut dapat menciptakan pembangunan yang lebih baik.

ABSTRACT

As one of the regions that has high fishery potential, Yogyakarta Special Region has not been able to maximize its fishery sector. The absence of a marine fishing port that can accommodate large ships is claimed to be one of the main causes. The Government of the Special Region of Yogyakarta then built a new port after the success of the local scale Sadeng port construction. This new port is expected to be able to accommodate large ships that can operate up to the EEZ and is called the Tanjung Adikarto port. However, ten years after it was built, the Tanjung Adikarto port is still not operational due to technical problems. This study then compares the participatory and technocratic aspects of port development in the two locations to identify the root problem of the Tanjung Adikarto port and to identify the factors that influence the success and constraints of port development in Yogyakarta Special Region. A descriptive qualitative approach was used in this study by interviewing the people living around the two ports to get information about the benefits and developments of the associated ports. The results were then compared with the statements of government officials from a technocratic aspect. It was found that the cause of the delay in the development of the Tanjung Adikarto port was because the technocratic aspect of the planning process involved multi-actors and multiinterests so that the implementation was not as good as expected, and not because of the participatory aspect. On the other hand, Sadeng port proves that a port built in a location that is not supported by a good hinterland and accessibility can operate smoothly and even function as an economic trigger for its surrounding. It is important to learn from the Sadeng port development process to be implemented at the Tanjung Adikarto Port, especially in the participatory aspect. Although the participatory process in the Special Region of Yogyakarta Province is still in a degree of tokenism, this process can be upgraded to partnership planning or more. The factors that influence port development planning in Yogyakarta Special Province are: 1. quality of planning documents; 2. financial capacity; 3. development actors (multi-actors and multi-interests). As input for future planning, the government of Yogyakarta Special Region can replicate the existing participatory planning process at Sadeng port in other areas where similar projects are planned, namely fishing ports, to reduce the risk of project failure. Participatory approaches can actually support the technocratic planning, and the synergy between these approaches can create better development.

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

1. Nama : Neli Afriani Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Hasil pemeriksaan, tindak lanjut rekomendasi, pemantauan tindak lanjut BPK
Keywords : *policy implementation, audit results, follow-up on recommendations, monitoring follow-up on BPK recommendations*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai implementasi kebijakan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan Thomas B. Smith melalui empat aspek dalam proses implementasi kebijakan, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana dan faktor lingkungan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum seluruh unsur pada entitas pemeriksaan memahami kebijakan tersebut, koordinasi yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Barat masih terbatas yaitu hanya dengan Inspektorat sedangkan dengan OPD masih kurang, entitas pemeriksaan belum membentuk institusionalisasi (pelembagaan) terkait pemantauan TLRHP BPK, pimpinan pada entitas pemeriksaan belum memiliki komitmen terhadap penyelesaian TLRHP, Sistem informasi yang digunakan dalam program pemantauan (SIPTL) belum dapat dimanfaatkan secara optimal, faktor lingkungan budaya khususnya budaya kerja pada kelompok sasaran belum sepenuhnya mendukung dan lingkungan politik yaitu belum ditetapkannya kebijakan turunan dari kebijakan ini sehingga pasal 9 ayat (2) peraturan tersebut belum dapat diimplementasikan karena belum diatur dengan lebih lanjut mengenai instansi yang berwenang menerima laporan BPK terkait TLRHP yang belum sesuai rekomendasi.

ABSTRACT

This study aims to examine the implementation of The Audit Board of Republic of Indonesia (BPK) Regulation No. 2 of 2017 concerning Monitoring The Follow-Ups on the Recommendations of Audit Reports (TLRHP) at BPK Representative in West Sumatera Province. The theory used in this study is the policy implementation model of Thomas B. Smith through four aspects in the policy implementation process, namely the idealized

policy, target group, implementing organization, and environmental factors. The research method used is a qualitative descriptive method. Data were obtained through documentation studies, in-depth interviews and observations. The study showed that not all elements in the audit entities understood the implementation of BPK Regulation No. 2 of 2017. The coordination carried out by BPK Representative of West Sumatra Province was also still limited, only with Inspectorate of each municipality in West Sumatra Province, and still lack of coordination with OPD. The audit entities had not yet established institutionalization to enforce TLRHP. In addition, the leader of each audit entity does not have full commitment yet for the completion of TLRHP, and the information system used in the monitoring program to support TLRHP through a web application called SIPTL has not been fully utilized. Moreover, cultural environment factor especially working culture of the target group have not been fully promote BPK regulation No. 2 of 2017. Lastly, the political environment from BPK itself which has not yet determined the derivative regulation of Regulation No. 2 of 2017. Therefore, Article 9 paragraph (2) of the Regulation can not be implemented as BPK has not been further authorized the responsible entity whom will receive reports related to Follow-Ups which are not in accordance with the Recommendations.

2. Nama : Adesta Midkasna Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Ilir Berdasarkan *Balanced Scorecard*
Kata kunci : *Balanced Scorecard, Pelanggan, Internal Bisnis Proses, Learning and Growth, Financial, Kinerja UKPBJ, Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM)*
Keywords : *Balanced Scorecard, Customer, Internal Business Process, Learning And Growth, Financial, Performance of UKPBJ, Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM)*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan *balanced scorecard*. Analisis *balanced scorecard* memiliki empat perspektif yaitu perspektif pelanggan, internal bisnis proses, *learning and growth* dan perspektif *financial*. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dengan menggunakan *rating scale* dari 140 responden yang terdiri dari internal/pegawai UKPBJ sejumlah 21 orang dan dari eksternal/pelanggan sejumlah 119 orang. Metode pengukuran yang digunakan untuk menganalisis data adalah *Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir tinggi dengan rincian tiga perspektif dalam *balanced scorecard* yaitu perspektif pelanggan, internal bisnis proses dan perspektif *learning and growth* berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir sedangkan perspektif *financial* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja UKPBJ Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan temuan penelitian bahwa terdapat kelemahan pada dimensi *advice* (perspektif pelanggan) dan dimensi inovasi (perspektif internal bisnis proses) serta keunggulan pada perspektif *learning and growth* dan perspektif *financial*, maka penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan responsivitas pegawai dan mengembangkan inovasi pelayanan pengadaan, mempertahankan *financial accountability*, memprioritaskan pegawai yang memiliki kemampuan di bidang pengadaan dan mempercepat peralihan jabatan fungsional pengelola pengadaan barang/jasa.

ABSTRACT

This study aims to analyze the performance of the Ogan Ilir Regency Public Procurement Goods And Services Work Units based on the balanced scorecard. analysis Balanced scorecard has four perspectives, namely customer perspective, internal business process, learning and growth and financial perspective. The research method used is descriptive quantitative method. Data was obtained through a questionnaire using a rating scale from 140 respondents consisting of 21 internal/UKPBJ employees and 119 external/customers. The measurement method used to analyze the data is the Structural Equation Model Partial Least Square (PLS-SEM). The results showed that the performance of UKPBJ Ogan Ilir is high

with the details of the three perspectives in a balanced scorecard that the customer perspective, internal business processes and the learning and growth perspective have a significant effect on the performance of UKPBJ Ogan Ilir whereas the financial perspective does not significantly influence the performance of UKPBJ Ogan Ilir. Based on research findings that there are weaknesses in the dimension advice from customer perspective and innovation dimension (internal business process perspective) as well as advantages in the learning and growth perspective and financial perspective, this study suggests to maintains employee discipline and responsiveness and developing innovations to continuously improved on public procurement service for the customers, maintaining financial accountability, prioritizing employees who have the ability in the field of public procurement and accelerating the transformation of functional positions in the management of Public Procurement Goods And Services.

3. Nama : Ika Uly Prasasty Manurung Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Seleksi CPNS Dengan Metode CAT BKN Dengan Prokes COVID-19 Di Kantor Regional VII BKN Palembang (Studi Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Formasi Anggaran 2021)
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, CPNS, Seleksi, COVID-19
Keywords : *Implementation, Policy, CPNS, Selection, COVID-19*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi Peraturan BKN berupa Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi Dengan Metode CAT BKN Dengan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Teori implementasi kebijakan publik yang digunakan adalah teori model menurut Edward III, dimana aspek komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam implementasi kebijakan. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian yang dianalisis sesuai dengan kerangka pikir dari Edward III menunjukkan bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat, dimana faktor pendukung yaitu disposisi dan struktur birokrasi, sedangkan faktor penghambat yaitu komunikasi dan sumberdaya. Adanya penyesuaian tindakan yang dilakukan oleh level street beaurecrats berdampak positif dan negatif terhadap penyelenggaraan seleksi CPNS Dengan Metode CAT BKN Dengan Prokes COVID-19. Edward III mengungkapkan bahwa komunikasi vertikal dan horizontal dapat mengurangi kompleksitas informasi dan birokrasi, serta sumberdaya yang dapat diukur dari kecukupannya tersirat kesesuaian dan kejelasan, dimasa pandemi COVID-19 peneliti menemukan bahwa keterbatasan komunikasi secara langsung dan perbedaan sumberdaya yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan seleksi CPNS dimasa pandemi COVID-19 pada titik lokasi ujian mandiri perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendukung keberhasilan penyelenggaraan seleksi CPNS di wilayah kerja Kantor Regional VII BKN Palembang.

ABSTRACT

This study was aimed to analyze the factors that influence the success of implementing the BKN Regulation in the form of Circular Letter Number 7 of 2021 concerning Procedures for Organizing Selection Using the CAT BKN Method with the Health Protocol for the Prevention and Control of COVID-19. The theory of public policy implementation used is the model theory according to Edward III, where aspects of communication, resources, disposition and employees are factors that influence the success of policy implementation. By using a qualitative descriptive method, data were obtained through interviews, field observations

and literature studies. The results of the research analyzed in accordance to Edward III's framework show that there are supporting and inhibiting factors, where the supporting factors are the disposition and structure of the bureaucracy. The adjustment of action taken by the level street beaurecrats has a positive and negative impact on the implementation of the implementation of the CPNS selection with the CAT BKN Method with the Health Protocol of COVID-19. Edward III revealed that vertical and horizontal communication can reduce differences in information and bureaucracy, as well as resources that can be measured from the praise of production and inventions, during the COVID-19 pandemic, researchers found that there were limitations in direct communication and differences in the resources needed in organizing CPNS selection during the pandemic COVID-19 at the self-examination location needs to be improved, so that it can support the success of the CPNS selection in the work area of the Regional Office VII BKN Palembang.

4. Nama : Mutiara Islami Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kabupaten Ogan Ilir
Kata kunci : Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, Implementasi Kebijakan, Perumahan Sosial
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith (1973) yang mengidentifikasi empat komponen penting dalam proses implementasi kebijakan yaitu kebijakan yang diidealkan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran dan faktor lingkungan. Metode penelitian menggunakan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Data diperoleh melalui kuesioner, observasi lapangan, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan pada implementasi kebijakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Ogan Ilir masih belum mencapai kondisi ideal yang diharapkan kebijakan seperti tidak adanya gotong royong, koordinasi antar implementor yang tidak rutin, rendahnya pemahaman masyarakat tentang program BSPS, tidak adanya sarana dan prasarana penunjang kegiatan untuk pelaksana, peran pendampingan dan pengawasan yang belum optimal, beberapa rumah tidak memiliki fasilitas MCK dan akses air bersih serta masih ada rumah yang dibangun di luar daerah zona perizinan tata bangunan sehingga tujuan fisik program BSPS cukup tercapai namun untuk tujuan sosial belum tercapai.

5. Nama : Eka Yulia Fajar Rianti Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Upaya Pencegahan
Stunting (Studi Di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh
Kota, Provinsi Sumatera Barat)
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Desa, *Stunting*
Keywords : *Implementation, Policy, Village Fund, Stunting*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan dana desa dalam upaya pencegahan *stunting* di 3 (tiga) Nagari di Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota. Teori yang digunakan adalah model implementasi kebijakan yang dikemukakan Edwards III melalui empat variabel keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan ialah metode deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil penelitian yang dianalisis dengan kerangka berfikir dari Edwards III menunjukkan bahwa lambannya implementasi kebijakan tersebut disebabkan oleh tiga faktor yaitu komunikasi, sumber daya dan struktur birokrasi, dimana ketiga faktor tersebut belum berjalan dengan optimal. Sedangkan faktor disposisi sudah berjalan dengan cukup optimal. Optimalisasi ketiga faktor tersebut penting untuk dilaksanakan guna mendukung disposisi pelaksana kebijakan sehingga keberhasilan implementasi kebijakan dana desa dalam upaya pencegahan *stunting* di Kecamatan Gunuang Omeh, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat dapat terwujud.

ABSTRACT

This study was aimed to analyze the implementation of the village fund policy in an effort to prevent stunting in three Nagari in Gunuang Omeh District, Lima Puluh Kota Regency. The theory employed in the study is the Edwards III policy implementation model through its four successful policy implementation aspects, which include communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The descriptive qualitative method is carried out as the research method of this study. Data collection was done through interviews, observation, and documentation studies. The results of the study were analyzed with the framework of Edwards III showed that the slow implementation of these policies was mainly caused by three factors, namely communication, resources, and bureaucratic structure, and these three factors were not implemented optimally yet. Meanwhile, the disposition factor has been running quite optimally. The optimization of these three factors is important to implement in order to support the disposition of the policy implementers so that the successful implementation of village fund policy in an effort to prevent stunting in Gunuang Omeh District, Lima Puluh Kota Regency, West Sumatra Province.

6. Nama : Haris Fadila Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung
Judul tesis : Evaluasi Implementasi Smart Governance Dalam Mewujudkan Program Smart City Di Kota Padang Panjang
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Evaluasi implementasi, Smart City, Smart Governance, Tingkat kematangan
Keywords : *Public Policy, Implementation Evaluation, Smart City, Smart Governance, Smart City Maturity*
-

ABSTRAK

Smart city merupakan salah satu konsep pengelolaan kota yang diadopsi di Indonesia. Kota Padang Panjang merupakan salah satu kota yang mulai menerapkan konsep tersebut dalam mengembangkan potensi kotanya. Pada tahap awal pengembangan *smart city*, kota Padang Panjang memprioritaskan pembangunan sistem pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis digital yang merupakan bagian dari salah satu dimensi *smart city*, yaitu *smart governance*. Ditemui beberapa permasalahan terkait *smart governance*, seperti pemanfaatan TIK yang masih rendah oleh masyarakat ataupun pemerintahan dan belum terciptanya integrasi data antar instansi pemerintah. Sebagai dimensi yang diprioritaskan, maka penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana implementasi *smart governance* dalam mewujudkan *Smart City* di kota Padang Panjang. Hal tersebut dilakukan dengan menetapkan sasaran penelitian, yaitu; 1. mendeskripsikan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, 2. mengevaluasi implementasi *smart governance* dengan cara mengukur tingkat kematangannya (*maturity level*). 3. merumuskan rekomendasi pengembangan *smart governance*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dan kuantitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan cara wawancara dan observasi. Sementara data sekunder didapatkan dari instansi terkait dan kajian dokumen. Analisa data dilakukan dengan metode analisis konten, deskriptif kualitatif dan analisis skoring. Dari analisis yang dilakukan ditemukan bahwa implementasi *smart city*, khususnya pada dimensi *smart governance* sudah cukup baik dari sisi pelaksana. Hal ini terlihat dari tercapainya pelaksanaan program yang terdapat dalam rencana aksi sesuai target yang ditetapkan. Kemudian ditemukan faktor pendorong keberhasilan implementasi, yaitu ketersediaan landasan teori dan dukungan teknologi, kejelasan dan konsistensi isi kebijakan, alokasi sumberdaya keuangan, kondisi sosial ekonomi, dukungan dari publik, dukungan dari badan atau lembaga atasan yang berwenang dan komitmen dan kemampuan para pejabat pelaksana. Sementara faktor yang menjadi penghambat adalah keberagaman perilaku dari kelompok sasaran, persentase kelompok sasaran terhadap total penduduk yang besar, keterpaduan diantara lembaga atau instansi pelaksana dan terbatasnya akses pihak luar. Dari analisis terhadap tingkat kematangan *smart governance*, didapatkan bahwa dimensi *smart governance* berada pada tahap *managed* atau dikelola

dengan baik ditandai dengan sudah mulai terintegrasinya pelayanan publik, penggunaan TIK dalam tata kelola pemerintahan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

ABSTRACT

Smart city is one of the city management concepts adopted in Indonesia. The city of Padang Panjang has begun to apply this concept in developing the potential of the city. In the early stages of smart city development, the city of Padang Panjang prioritized the development of an electronic-based government system and digital-based public services which are part of one of the dimensions of a smart city, namely smart governance. Several problems related to smart governance were encountered, such as the low use of ICT by the community or government and the lack of data integration between government agencies. As a priority dimension, the research was conducted to find out how the implementation of smart governance in realizing Smart City in the city of Padang Panjang. This is done by setting research objectives, namely; 1. describe and determine the factors that influence the implementation, 2. evaluate the implementation of smart governance by measuring the maturity level. 3. formulate recommendations for the development of smart governance. The method used in this research is qualitative and quantitative. Primary data collection is done by means of interviews and observations. Meanwhile, secondary data was obtained from related agencies and document review. Data analysis was carried out using content analysis, qualitative descriptive and scoring analysis methods. From the analysis carried out, it was found that the implementation of smart cities, especially in the dimensions of smart governance, was quite good from the implementing side. This can be seen from the achievement of the program implementation contained in the action plan according to the set targets. Then the factors driving the success of implementation were found, namely the availability of theoretical foundations and technological support, clarity and consistency of policy content, allocation of financial resources, socio-economic conditions, support from the public, support from authorized superior agencies or institutions and the commitment and ability of implementing officials. While the inhibiting factors are the diversity of behavior of the target group, the large percentage of the target group to the total population, the integration between implementing agencies or agencies and limited access to outsiders. From the analysis of the maturity level of smart governance, it was found that the dimension of smart governance is at the managed stage, marked by the integration of public services, the use of ICT in governance and increasing community participation in development.

7. Nama : Abdul Hafiz Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Implementasi Smart City Di Kota Pontianak
Kata kunci : Implementasi Kebijakan, *Smart City*, *Smart Governance*
Keywords : *Policy Implementation*, *Smart City*, *Smart Governance*
-

ABSTRAK

Walikota Pontianak menerbitkan Peraturan Walikota Pontianak Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Masterplan Pontianak Smart City Tahun 2019-2028. Dimana di dalam peraturan tersebut dimensi *smart governance* sebagai pusat kegiatan *smart city* di Kota Pontianak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membahas tentang efektivitas implementasi program-program *smart governance* yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi *smart governance* di Kota Pontianak.

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Analisis dilakukan berdasarkan dengan konsep *smart government* menurut Boyd Cohen di dalam Djunaedi (2018:12), yang mencakup tiga indikator dari *smart government* antara lain *online services*, *infrastructure*, serta *open government*.

Hasil penelitian menunjukkan semua program-program *smart government* yang telah diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak sudah diintegrasikan ke dalam satu aplikasi *Pontianak Smart City* yang dinamakan Jendela Pontianak Integrasi atau disingkat "Jepin". Secara umum, menunjukkan karakteristik yang mendukung pembangunan *smart city* di Kota Pontianak. Aspek *online services* terdapat 70 aplikasi dan website yang sudah dibangun di Kota Pontianak dan telah diintegrasikan ke dalam aplikasi Jepin, namun masih terdapat beberapa website yang terkendala seperti tidak dapat diakses, informasi yang belum diperbaharui, dan belum ada SOP yang baku. Aspek *infrastructure* telah terdapat akses wifi gratis, CCTV, jaringan internet yang sudah memadai namun belum optimalnya layanan kesehatan dan keselamatan yang terintegrasi. Aspek *open government* telah adanya portal satu data Kota Pontianak untuk akses data publik namun belum adanya SOP mengenai manajemen keamanan informasi.

Adapun untuk faktor penghambat dalam implementasi *smart government* adalah koordinasi antar instansi, SDM aparatur yang masih kurang, keterbatasan anggaran, sosialisasi yang belum optimal serta infrastruktur yang masih kurang. Faktor pendukung dalam implementasi *smart government* di Kota Pontianak adalah kebijakan Pemerintah Kota Pontianak dan dukungan dan komitmen kepala daerah.

ABSTRACT

Mayor of Pontianak issued Pontianak Mayor Regulation Number 25 of 2019 concerning the Pontianak Smart City Masterplan for 2019-2028. Where in the regulation the dimensions of

smart governance are the center of activities in the smart city in Pontianak City. The purpose of this study is to discuss the effectiveness of the implementation of smart governance programs implemented by the Pontianak City Information and Communication Agency and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors that affect the implementation of smart governance in Pontianak City.

The author uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data sources of this research are primary and secondary data. The analysis was carried out based on the concept of smart government according to Boyd Cohen in Djunaedi (2018:12), which covers three indicators of smart government, including online services, infrastructure, and open government.

The results showed that all programs smart government that have been implemented by the Pontianak City Information and Communication Agency have been integrated into application Pontianak Smart City called Jendela Pontianak Integrasi or abbreviated as "Jepin". In general, it shows the characteristics that support the development of a smart city in Pontianak City. In the aspect of online services, there are 70 applications and websites that have been built in Pontianak City and have been integrated into the Jepin application, but there are still some website that have problem such as inaccessibility, and information that has not been updated, there is no standard SOP. In the aspect, infrastructure there is free wifi access, CCTV, internet network but not yet optimal integrated health and safety services. The open government has one Pontianak City data portal for public data access, but there is no SOP regarding information security management.

As for the inhibiting factors in implementing smart government are coordination between agencies, lack of human resources, budget constraints, socialization that is not yet optimal and infrastructure that is still lacking. Supporting factors in implementing smart government in Pontianak City are Pontianak City Government policies, budget allocation for programs, smart government, as well as support and commitment of regional heads.

8. Nama : Liesna Prasetyorini Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Implementasi Pengelolaan Batas Desa (Studi Kasus Kegiatan Penegasan Batas Desa di Kabupaten Kulon Progo)
Kata kunci : Implementasi kebijakan, Batas desa, Pengelolaan batas wilayah
Keywords : *Policy implementation, village boundaries, territorial boundary management*
-

ABSTRAK

Terbitnya Undang-undang Desa memberikan perhatian lebih bagi posisi desa. Untuk membangun desa, kejelasan status batas desa menjadi salah satu hal penting. Batas desa yang telah memiliki kepastian status yang tercantum dalam aturan legal formal akan mendukung posisi desa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan batas desa di Kabupaten Kulon Progo dan faktor-faktor yang mempengaruhi proses implementasi didalamnya. Untuk mengetahui hal tersebut dilakukan penelitian dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk menganalisa bagaimana kebijakan dilaksanakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan batas desa yang dilaksanakan melalui kegiatan penegasan dan penetapan batas desa sudah berjalan di Kabupaten Kulon Progo namun perkembangannya terbilang lambat. Kegiatan penegasan batas desa mulai dilaksanakan pada tahun 2018 namun sampai dengan tahun 2021 baru terealisasi pada 12 desa dari jumlah keseluruhan desa sebanyak 87 desa dan 1 kelurahan. Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor sumberdaya menjadi faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Keterbatasan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial membuat kebijakan dapat terlaksana namun dengan banyak keterbatasan.

ABSTRACT

The issuance of the Village Law gives more attention to the position of the village. To develop a village, clarity on the status of village boundaries is one of the important things. Village boundaries that already have status certainty listed in formal legal rules will support the village's position in the administration of government administration and development. This study aims to see how the implementation of village boundary management policies in Kulon Progo Regency and the factors that influence the implementation process in it. To find this out, a research was conducted using descriptive qualitative methods to analyze how the policy was implemented.

The results of the study indicate that the implementation of the village boundary policy which is carried out through the activities of affirmation and determination of village

boundaries has been running in Kulon Progo Regency but its development is quite slow. The affirmation of village boundaries began in 2018 but until 2021 it had only been realized in 12 villages out of a total of 88 villages. There are a number of factors that influence policy implementation, namely: communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The resources factor is the most influential factor in policy implementation. Limited human resources and financial resources make the policy can be implemented but with many limitations.

9. Nama : Muhammad Aditya Erfiyan Prathama Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Reformasi Birokrasi di Badan Pengelolaan Pajak Daerah Pemerintah Kota Palembang
Kata kunci : Reformasi birokrasi, Agen perubahan, Edward III
Keywords : *Bureaucracy reform, Agent of Change, Edward III*
-

ABSTRAK

Reformasi birokrasi merupakan program pemerintah dalam mengembangkan kelembagaan pemerintahan, agar menciptakan birokrasi yang efektif dan efisien melalui pengembangan aparatur negara dan birokrasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Untuk menilai hal tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PerMenPAN-RB) Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, agar instansi pemerintah dapat melakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di seluruh lapisan unit kerja. Namun, penilaian ini hanya mencakup kelengkapan dokumentasi yang dimiliki dan capaian indikator yang diperoleh instansi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Pemerintah Kota Palembang sampai dengan tahun 2020, dengan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi dan implementasi kebijakan publik tersebut menggunakan teori Edward III, dengan dimensi Komunikasi, Sumber Daya, Kecenderungan, dan Struktur Birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPPD telah melakukan dokumentasi reformasi birokrasi dan pembentukan agen perubahan, namun informasi pelaksanaan tersebut belum dilakukan secara berkala dan belum diketahui. Dimensi Komunikasi memberikan pengaruh yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan ini, dikarenakan tidak adanya perintah yang jelas baik dari internal BPPD sendiri maupun dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah terkait langkah pelaksanaan kebijakan. Sumber Daya pelaksana kebijakan yang terdiri dari staf, tidak ditunjuk secara formal untuk pelaksanaan tugas; dan anggaran pelaksana belum tersedia secara khusus untuk pemantauan kebijakan ini. Dimensi lain, Struktur Birokrasi dan Disposisi pimpinan, memudahkan pelaksanaan dan koordinasi di internal BPPD baik secara formal maupun informal.

ABSTRACT

Bureaucracy reform is one of government's policy to develop government institution, creating an effective and efficient bureaucracy through empowerment of civil servant and responsive bureaucracy to public's interest. To review those programs, government decreed through Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform Regulation (PerMenPAN-RB) No 14 Year 2014 regarding Evaluation Guideline for Bureaucracy Reform,

enabling all of government institution to evaluate themselves. However, this evaluation can only validate such reform through documentation and performance indicator.

This research objective is to evaluate implementation of bureaucracy reform's policy in City of Palembang, Local Tax Management Agency (BPPD) until year 2020, by monitoring bureaucracy reform and its policy implementation using theory proposed by Edward III, using dimension Communication, Resource, Disposition, and Bureaucracy Structure. This research results shows that BPPD had done bureaucracy reform's documentation and creating agent of change, however information to perform those policies had not been done regularly and not known outside Subdivision of General Affairs and Human Resource and Subdivision of Planning and Reporting of BPPD. Communication Dimension played significant role in this policy implementation, resulting vague instruction within BPPD and from Division of Organization and Governance from City Secretariat regarding concrete instruction for policy implementation. Resource to implement this policy, such as staff, is not delegated formally to monitor the policy. Other dimension such as Bureaucracy Structure and Leadership Disposition, enable easier coordination within BPPD, formally and informally.

10. Nama : Karolina Morwarin Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Berbasis *Whole Of Government (WOG) Approach* Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
Kata kunci : Nudaya, Informal, Implementasi kebijakan, Komitmen
Keywords : *Cultural, Commitment, Informal, Policy Implementation*

ABSTRAK

Tuntutan penyelesaian masalah publik telah menggeser cara pandang terhadap peran pemerintah sebagai provider tunggal pelayanan menuju tata kelola pemerintahan partisipatif sebagai wujud demokrasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan. Tuntutan tersebut harus disikapi secara bijak dengan mempertemukan harapan masyarakat dan kemampuan organisasi, sekaligus mengurangi bias kapasitas organisasi publik selaku penyedia layanan. Penelitian ini mengidentifikasi faktor yang berkerja dalam proses implementasi kebijakan pelayanan terpadu di daerah kepulauan dalam menghadapi tranformasi pelayanan berbasis ICT, menganalisis kemampuan dan komitmen implementers PTSP, pola koordinasi, kerjasama sektor swasta dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan sehingga dapat memberikan gambaran implementasi secara holistik dan utuh. Metode yang digunakan yakni deskriptif kualitatif dengan penentuan informan secara *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui *indepth interview*, observasi dan studi dokumen kemudian dilakukan koding semantik menggunakan Nvivo 12 Plus untuk menentukan kategori/tema yang akan digeneralisasikan. Hasil penelitian mengungkapkan adanya budaya masyarakat yang mendorong sistem pelayanan PTSP secara keliling oleh GA dan keterlibatan NGA yang bekerja secara *voluntary* maupun bisnis. Dukungan publik sangat tinggi namun kinerja implementasi belum maksimal mencapai tujuan kebijakan pelayanan *self-help* (OSS) karena kendala teknis yakni jarak geografis, perangkat dan anggaran.

ABSTRACT

The demands for solving public problems have shifted the viewpoint of the role of the government as the sole provider of services towards participatory governance as a form of democracy that can adapt to change. These demands must be addressed wisely by reconciling the expectations of the community and organizational capabilities, as well as reducing bias in the capacity of public organizations as service providers. This study identified the factors that work in the process of implementing integrated service policy in an archipelago in facing the transformation of ICT-based services, analyzed the ability and commitment of one-door integrated service (PTSP) implementers, coordination patterns, private sector cooperation, and community participation in services so that it can provide a

holistic and complete picture of implementation. The method used was descriptive qualitative by determining informants using purposive sampling. The data were collected through in-depth interviews, observation, and document study. Next, semantic coding was carried out using the NVivo 12 Plus to determine the categories/themes to be generalized. The results of the study reveal that there is a community culture that encourages the mobile PTSP service system by GA and the involvement of NGA who works voluntarily and in business. Public support is very high, but the implementation performance has not yet reached the goal of self-help service (OSS) policy due to technical constraints, namely geographical distance, equipment, and budget.

11. Nama : Natalis Welem Imanuel Ubwarin Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Kinerja Daerah Kepada
Pegawai Negeri Sipil di Dinas Sosial Provinsi Maluku
Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Tunjangan kinerja daerah

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pelaksanaan kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Dinas Sosial Provinsi Maluku. Pemberian tunjangan kinerja daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS dan meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemui hambatan-hambatan. Penulis analisis faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan menggunakan teori model implementasi kebijakan Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli ada empat variabel yakni Kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya organisasi dan karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif karena peneliti bermaksud memahami tentang fenomena yang dialami subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi dan tindakan. Penelitian ini dilakukan di Dinas Sosial Provinsi Maluku. Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan pemberian tunjangan kinerja daerah di Dinas Sosial Provinsi Maluku belum sepenuhnya berhasil. Beberapa tujuan kebijakan belum tercapai secara maksimal.

12. Nama : Arbiyansah Krisnantoro Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Pola Spasial Ketersediaan Pemilik Lahan Untuk Mendukung
Implementasi Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan Kota Metro
Kata kunci : Pola Spasial Ketersediaan, Pemilik Lahan, Implementasi Kebijakan, LP2B
Keywords : *Willingness Spatial Pattern, Landowners, Policy Implementation, LP2B
(Sustainable Food Agriculture Land Protection)*

ABSTRAK

Agenda SDGs mengamanatkan bahwa konservasi lahan pertanian pangan di perkotaan harus dilestarikan karena berkontribusi untuk membuat kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan serta mendukung kedaulatan pangan. Di Indonesia hal ini dituangkan dalam kebijakan LP2B yang tertuang dalam UU no 41/2009, yang kemudian diikuti dengan peraturan-peraturan dibawahnya hingga tingkat Perda. Di kota Metro dituangkan dalam Perda Nomor 21/2016 untuk menjadi dasar kebijakan perlindungan terhadap sawah seluas 1.567,5 hektar. Permasalahan yang muncul dari implementasi kebijakan tersebut adalah karena lahan sawah yang ditetapkan LP2B merupakan lahan privat, sehingga tidak semua pemilik secara sukarela bersedia menjalankan kebijakan ini.

Penelitian ini bertujuan menganalisis prospek implementasi kebijakan PLP2B pada lahan privat berdasarkan tingkat ketersediaan pemilik lahan menggunakan metode kuantitatif, yaitu menganalisis data lahan dengan pendekatan korelasi dan regresi linier berganda serta pemodelan spasial tingkat ketersediaan pemilik lahan. Sampel sebanyak 513 persil diambil dari populasi sebanyak 6060 KK pemilik lahan pertanian di Kota Metro.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pemilik lahan untuk mendukung kebijakan PLP2B berbanding terbalik dengan adanya peluang keuntungan atas kegiatan nonpertanian pada lahan mereka. Pola spasial tingkat ketersediaan pada umumnya mengikuti pola penggunaan lahan perkotaan sebagaimana kurva *bidrent* dalam teori penggunaan lahan perkotaan (William Alonso), namun terjadi anomali di beberapa lokasi pinggiran kota. Anomali tersebut adalah cerminan dilematis dari pemilik lahan dalam mendukung atau tidak mendukung kebijakan PLP2B. Berdasarkan dukungan pemilik lahan terdapat potensi 2.445 ha lahan sawah untuk ditetapkan sebagai LP2B, dengan demikian luasan tersebut dapat mencukupi dari target sebesar $\pm 1.567,5$ ha. Sebagian besar pemilik lahan menginginkan pembebasan PBB dengan nilai rata-rata Rp.48.600 setiap persil, dengan perkiraan nilai kompensasi untuk 5.000 persil mencapai Rp. 243.000.000 dalam setahun. Besaran Kompensasi yang diharapkan tidak memiliki korelasi yang kuat terhadap tingkat ketersediaan. Peluang menutupi dilema dari pemilik lahan adalah pemerintah menetapkan

besaran kebutuhan pengadaan kegiatan LP2B tersebut berdasarkan asas barang publik menggunakan perhitungan *total economic value* atas lahan pertanian mereka, sehingga tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan publik tersebut tidak hanya dibebankan kepada pemilik lahan. Untuk menutupi hilangnya potensi pajak dari lokasi LP2B tersebut pemerintah dapat menaikkan pajak pada lahan nonpertanian seperti perumahan, jasa dan industri.

ABSTRACT

The SDGs Agenda mandates that the conservation of agri-food land in urban areas must be conserved as it contributes to making cities and human settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable as well as supporting food sovereignty. In Indonesia this is stated in the LP2B policy as stipulated in Law No. 41/2009, which is then followed by the regulations below it up to the local level. In the city of Metro, it is stipulated in local law Number 21/2016 to become the basis for a policy of protecting 1,567.5 hectares of rice fields. The problem that arises from the implementation of this policy is because the rice fields designated by private lands, so not all owners are willing to voluntarily implement this policy.

This study aims to analyze the prospects for implementing PLP2B policies on private land based on the willingness of land owners using quantitative methods, namely analyzing land data with a correlation approach and multiple linear regression as well as spatial modeling of the willingness of land owners. A sample of 513 parcels was taken from a population of 6060 households who owned agricultural land in Metro City.

The results of this study indicate that the level of willingness of land owners to support the PLP2B policy is inversely proportional to the opportunity for profit from non-agricultural activities on their land. The spatial pattern of willingness levels generally follows the pattern of urban land use as the bidrent curve in urban land use theory (William Alonso), but anomalies occur in some suburban locations. This anomaly is a dilemma reflection of the land owner in supporting or not supporting the PLP2B policy. Based on the support of the land owner, there is the potential for 2,445 ha of rice fields to be designated as LP2B, thus the area can be sufficient from the target of $\pm 1,567.5$ ha. Most of the land owners wanted land tax exemption at an average value of Rp. 48,600 per parcel, with an estimated compensation value of Rp. 243,000,000 in a year. The amount of compensation expected does not have a strong correlation with the level of willingness. The opportunity to cover the dilemma of the land owner is that the government determines the amount of needs for the procurement of LP2B activities based on the principle of public goods using the calculation of the total economic value of their agricultural land, so that the responsibility for meeting public needs is not only borne by the land owner. To cover the potential loss of taxes from the LP2B locations, the government can raise taxes on non-agricultural land such as housing, services and industry.

13. Nama : Rachel Elvin Patai Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Implementasi Program Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Papua Barat
Kata kunci : Kemiskinan, Implementasi, Program penanggulangan kemiskinan
Keywords : *Poverty, Implementation, Poverty Reduction Program.*

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan permasalahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan. Dalam menanggulangi kemiskinan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk program kebijakan, diantaranya berupa program bantuan sosial dan program percepatan penanggulangan kemiskinan. Anggaran yang telah dialokasikan juga sudah sangat besar. Provinsi Papua Barat merupakan Provinsi dengan Prosentase penduduk miskin tertinggi kedua di Indonesia. Fakta dilapangan menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Provinsi Papua Barat sangat lambat dan tidak berarti, sekalipun jumlah anggaran yang diberikan lebih banyak.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan tentang implementasi program penganggulan kemiskinan di Provinsi Papua Barat. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan informasi melalui observasi dan wawancara, baik terstruktur maupun tidak terstruktur, dokumentasi, materi-materi visual, serta usaha merancang protokol untuk merekam atau mencatat informasi. Temuan dari penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Papua Barat dari segi isi kebijakan (*content of policy*), berupa kepentingan kelompok sasaran, tipe manfaat yang diberikan, derajat perubahan yang diinginkan, letak pengambilan keputusan dan sumberdaya yang dibutuhkan masih sangat rendah atau belum tepat sasaran, terkecuali untuk pelaksanaan program dinilai cukup berhasil. Selanjutnya untuk lingkungan kebijakan (*contex of implementation*) mendukung sepenuhnya atau sudah sesuai dengan apa yang diharapkan sesuai dengan teori, tetapi perlu kajian yang lebih mendalam dan komprehensif agar akar permasalahan terkait kemiskinan dapat sepenuhnya teratasi.

ABSTRACT

Poverty is a problem in Indonesia that has not yet been resolved. In tackling poverty, the central government and local governments have made various efforts in the form of policy programs, including social assistance programs and accelerated poverty reduction programs. The budget that has been allocated is also very large. West Papua Province is the province with the second highest percentage of poor people in Indonesia. Facts on the

ground show that poverty reduction in West Papua Province is very slow and meaningless, even though the amount of budget allocated is more.

The objectives of this research are to describe the implementation of poverty reduction programs in West Papua Province. This study uses a qualitative method with a case study approach that aims to describe the implementation of poverty alleviation programs in West Papua Province. Data collection is done by collecting information through observation and interviews, both structured and unstructured, documentation, visual materials, as well as efforts to design protocols to record or record information. The findings of this study are that the implementation of poverty reduction programs in West Papua Province has not been optimal in terms of policy content, in the form of the interests of the target group, the types of benefits provided, the degree of desired change, the location of decision making and the resources needed are still very low. or not yet on target, except for the implementation of the program which is considered quite successful. Furthermore, the policy environment (context of implementation) fully supports or is in accordance with what is expected according to theory, but a more in-depth and comprehensive study is needed so that the root causes of poverty can be completely resolved.

.

MONITORING DAN EVALUASI

1. Nama : Abdurrozak Zaki Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Dampak Program Sembako terhadap Konsumsi Kalori, Karbohidrat, Protein, dan Lemak serta Proporsi Pengeluaran Non Makanan pada Rumah Tangga Penerima Manfaat di Pulau Papua Tahun 2020
Kata kunci : Program sembako, Asupan gizi, Pengeluaran non makanan, Evaluasi dampak, *Propensity Score Matching*, *Ordinary Least Square*
Keywords : *Sembako Program, Nutritional Intake, Non-Food Expenditure, Impact Evaluation, Propensity Score Matching, Ordinary Least Square*
-

ABSTRAK

Program Sembako merupakan program bantuan sosial pangan yang disalurkan kepada keluarga miskin dan rentan dalam bentuk non tunai dengan tujuan mengurangi beban pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi yang lebih seimbang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Sembako terhadap asupan gizi dan proporsi pengeluaran non makanan pada rumah tangga penerima manfaat. Estimasi dampak dilakukan dengan metode *Propensity Score Matching* (PSM) dan *Ordinary Least Square* (OLS) menggunakan data yang bersumber dari data mikro Susenas Bulan Maret 2020. Hasil estimasi dengan menggunakan metode PSM menunjukkan bahwa program berdampak signifikan terhadap peningkatan konsumsi kalori sebesar 95,03 kkal per orang per hari, karbohidrat sebesar 17,60 gram per orang per hari, dan protein sebesar 2,81 gram per orang per hari serta penurunan proporsi pengeluaran non makanan sebesar 1,54 persen pada rumah tangga penerima manfaat. Program tidak berdampak terhadap konsumsi lemak. Penurunan proporsi pengeluaran non makanan tersebut disebabkan oleh peningkatan pengeluaran makanan yang berasal dari nilai bantuan dalam program sebesar Rp150.000,00 per bulan. Dampak program terhadap angka kecukupan gizi disimpulkan efisien dengan mempertimbangkan besaran dampak relatif terhadap rata-rata konsumsi kalori dan protein masing-masing sebesar 4,97 persen dan 5,85 persen serta nilai bantuan relatif terhadap rata-rata pengeluaran rumah tangga konsumsi makanan sebesar 4,92 persen. Namun demikian, dampak program belum cukup efektif untuk mencapai standar kecukupan gizi yang direkomendasikan.

ABSTRACT

The Sembako Program is a food social assistance program that is distributed to poor and vulnerable families in the form of non-cash with the aim of reducing the burden of spending to meet more balanced food and nutritional needs. This study aims to analyze the impact of

the program on the nutritional intake and the proportion of non-food expenditures of beneficiary households in Papua Island in 2020. The estimation of the impact is carried out using the Propensity Score Matching (PSM) and Ordinary Least Square (OLS) methods with data from the National SocioEconomic Survey in March 2020. The estimation results using the PSM method show that the program has a significant impact on increasing calorie consumption by 95.03 kcal per person per day, carbohydrate consumption by 17.60 grams per person per day, protein consumption by 2.81 grams per person per day and decreasing the proportion of non-food expenditure by 1.54 percent. The program has no impact on fat consumption. The decrease in the proportion of non-food expenditure was caused by an increase in food expenditure originating from the value of assistance in the program of Rp. 150,000.00 per month. The impact of the program on the nutritional adequacy rate is concluded to be efficient by considering the magnitude of the program impact of 4.97 percent relative to the average calorie consumption and 5.85 percent relative to the average protein consumption and the amount of assistance value of 4.92 percent relative to the average food expenditure. However, the impact of the program has not been effective enough to achieve the recommended nutritional adequacy standards.

2. Nama : Ronando Ferdiansyah Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung
Judul tesis : Evaluasi Sinkronisasi Program Arah Pemanfaatan Ruang Rencana
Tata Ruang Wilayah Di Kota Pematangsiantar
Kata kunci : Sinkronisasi, Indikasi Program, RTRW, Rencana Pembangunan,
Penganggaran Pembangunan Daerah
Keywords : *Synchronization, Program Indication, Development Plan, Budgeting,
Regional Development*
-

ABSTRAK

Perencanaan kota yang diwujudkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota merupakan suatu pemikiran dan kegiatan implementatif untuk mengakomodasi kebutuhan baru di masa datang. Dalam pelaksanaan RTRW yang penting dan perlu menjadi perhatian utama adalah bagaimana merealisasikan RTRW tersebut pada program pembangunan daerah. Realisasi program RTRW dilakukan dengan mensinkronkan program arahan pemanfaatan ruang RTRW dengan program pada rencana pembangunan dan program pembangunan daerah. Kota Pematangsiantar sebagai kota terbesar kedua di Provinsi Sumatera Utara sedang mengalami perkembangan kota yang cukup besar didukung oleh posisi strategis terhadap Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Toba dan sekitarnya serta Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei. Permasalahan penelitian adalah belum diketahuinya sinkronisasi program RTRW Kota Pematangsiantar pada program rencana pembangunan dan program pembangunan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keefektifan sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang rencana tata ruang wilayah kota (RTRWK) pada program rencana pembangunan dan program pembangunan daerah di Kota Pematangsiantar. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode analisis yang digunakan yaitu analisis sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pematangsiantar pada RPJMD, RKPD, dan Program Pembangunan Daerah; dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kota Pematangsiantar.

Hasil analisis menunjukkan bahwa sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pematangsiantar 2012-2032 masih belum efektif terwujud, baik dalam rencana pembangunan maupun pada program pembangunan daerah di Kota Pematangsiantar. Sinkronisasi program RTRW Kota Pematangsiantar pada penganggaran program pembangunan daerah sampai dengan tahun 2020 masih rendah dengan hanya 54,55% program yang sinkron. Ketidaksihesuaian lokasi program/kegiatan pembangunan daerah dengan RTRW Kota Pematangsiantar cukup besar sebesar 91,13%. Hanya 66,67% organisasi pelaksana yang menjadikan indikasi program RTRW sebagai program prioritas pembangunan. Perwujudan indikasi program RTRW Kota Pematangsiantar hanya sebesar 25,97% berdasarkan kesesuaian pada waktu pelaksanaan. Ketidaksihesuaian nomenklatur indikasi program RTRW Kota Pematangsiantar dengan

penganggaran juga membuat indikasi program RTRW Kota Pematangsiantar sulit disinkronkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi sinkronisasi program arahan pemanfaatan ruang RTRW Kota Pematangsiantar adalah kualitas rencana, kapasitas lembaga perencana, kapasitas organisasi pelaksana, dan kualitas staf pelaksana.

ABSTRACT

Urban planning embodied in the Regional Spatial Planning (RTRW) is a thought and implementative activity to accommodate new needs in the future. In implementing the RTRW, which is important and needs to be the main concern is how to realize the RTRW in regional development programs. The realization of the RTRW program is carried out by synchronizing the RTRW space utilization directive program with the programs in the development plans and the regional development programs. Pematangsiantar City as the second largest city in North Sumatra Province is experiencing a fairly large urban development supported by its strategic position towards the National Strategic Area (KSN) of Lake Toba and its surroundings as well as the Special Economic Zone (KEK) Sei Mangkei. The research problem is the unknown synchronization program of the Pematangsiantar City RTRW in the programs development plans and regional development programs.

This study aims to evaluate the effectiveness of synchronization program directions for the space utilization of regional spatial planning (RTRW) in the programs development plans and regional development programs in Pematangsiantar City. The method used is a qualitative descriptive research method. The analytical method used is analysis of the synchronization program directions for space utilization regional spatial plan Pematangsiantar City in the RPJMD, RKPD, and Regional Development Programs; and analysis of the factors that influence the synchronization program directions for space utilization RTRW Pematangsiantar City.

The results of the analysis show that the synchronization program directions for space utilization of Regional Spatial Planning (RTRW) the Pematangsiantar City 2012-2032 has not been effectively realized, both in the development plan and in the regional development program in Pematangsiantar City. The synchronization of the Pematangsiantar City RTRW program with regional development program budgeting until 2020 is still low with only 54.55% of the program being synchronized. The mismatch between the location of the program / regional development activity with the RTRW Pematangsiantar City is quite large at 91.13%. Only 66.67% of the implementing organizations indicated that the RTRW program was a priority development program. The actual indication of the Pematangsiantar City RTRW program is only 25.97% based on suitability at the time of implementation. The incompatibility of the nomenclature of the Pematangsiantar City RTRW program indication with the nomenclature budgeting also makes the program indication the Pematangsiantar City RTRW is difficult to synchronize. The factors that influence the synchronization program directions for space utilization for Pematangsiantar City are the quality of the plan, the capacity of the planning institution, the capacity of the implementing organization, and the quality of the implementing staff.

3. Nama : Windy Mitasari Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Kebijakan Pemerintah Atas Proyek Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni Terbanggi Besar Terhadap Perkembangan Ekonomi Wilayah Lampung
Kata kunci : Evaluasi, Infrastruktur, Jalan Tol, Kebijakan Publik, Perkembangan Wilayah
Keywords : *Evaluation, Infrastructure, Public Policy, Regional Development, Toll Road*
-

ABSTRAK

Pemerintah berupaya meningkatkan konektivitas pulau Sumatera melalui pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dalam rangka mengembangkan perekonomian di pulau Sumatera sehingga dapat menjadi lokomotif keberlanjutan dan penyokong perekonomian di Indonesia, penelitian ini dilakukan dalam rangka mengevaluasi kebijakan penyelenggaraan proyek Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Bakauheni Terbanggi Besar melalui evaluasi kelayakan kebijakan Pemerintah melalui analisis kelayakan finansial dan ekonomi proyek JTTS ruas Bakauheni Terbanggi Besar setelah beroperasi dan pengukur tingkat efektifitas kebijakan yang diambil pemerintah melalui pemilihan skema modalitas pada proyek JTTS ruas Bakauheni Terbanggi besar terhadap perkembangan wilayah Lampung.

Metode analisis data yang dilakukan dalam penelitian yaitu melakukan perbandingan antara perencanaan, termasuk kriteria dan standar yang telah ditetapkan, dengan hasil data olah dan informasi yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain i) Analisis finansial ii) Analisis Cost Benefit Analysis (CBA) iii) Analisis komparasi PDRB antara target dan proyeksi iv) Analisis Dampak Perkembangan Wilayah. Dari analisis tersebut ditemukan bahwa perubahan skema dari project finance dan langkah kebijakan penugasan kepada BUMN membuat kelayakan finansial proyek menjadi layak dilaksanakan, secara ekonomi berdasarkan hasil CBA proyek ini layak dilaksanakan. Dari segi efektifitas kebijakan Pemerintah, penyelenggaraan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera sudah efektif dalam hal peningkatan kelayakan finansial dan ekonomi serta sudah cukup efektif dalam meningkatkan perkembangan wilayah dengan mulai munculnya pusat pertumbuhan baru. Pemerintah juga perlu memberikan perhatian lebih terhadap wilayah yang tidak dilewati jalan tol, Perbandingan indikator makro yang ditunjukkan antara kabupaten yang dilewati jalan non tol (jalan lingkar pantai timur) sebagai salah satu alternatif jalan sebelum adanya jalan tol trans Sumatera ruas Bakauheni Terbanggi Besar menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi tidak sebesar laju pertumbuhan ekonomi daerah.

ABSTRACT

The government seeks improvement of the connectivity of the Sumatra island through the construction of the Trans Sumatra Toll Road in order to develop the economy on the Sumatra Island so that it can become a locomotive for economic sustainability and support in

Indonesia. This research was conducted to evaluate the implementation policy of the Trans Sumatra Toll Road project Bakauheni Terbanggi Besar section mainly in the evaluation of the government policies through the analysis of the financial and economic feasibility of the Bakauheni Terbanggi Besar JTTS project after commercial operation date and measuring the level of effectiveness of the policies taken by the government on the development of the Lampung region through the selection of the modality scheme in the Tol Trans Sumatera project Bakauheni Terbanggi Besar section.

The data analysis method used in this research is conducting comparisons between the plans, including the criteria and standards that have been set, and the results of the processed data and information. The analyzes used in this research are: i) Financial analysis; ii) Cost Benefit Analysis (CBA); iii) Comparative analysis of GRDP between targets and projections; and iv) Analysis of Regional Development Impacts. Based on this analysis it was found that the change in the scheme out of project finance and the policy to assign State Owned Enterprise made the project's financial viability feasible and based on the CBA result, this project also economically feasible to implement. In terms of the effectiveness of Government policies, the implementation of the Trans Sumatra Toll Road Project has been effective in terms of increasing financial and economic viability and has been quite effective in enhancing regional development to become new growth and emerging centers. The government also needs to pay more attention to areas where toll roads are not passed. The comparison of macro indicators shown between districts where non-toll roads (east coast ring road) are passed as an alternative road before the Trans Sumatra toll road Bakauheni Terbanggi Besar section shows its economic growth is not as high as the regional economic growth rate.

4. Nama : Gunawan Wicaksono Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Beras Organik di Kabupaten Karanganyar
Kata kunci : -
Keywords : -
-

ABSTRAK

Pembangunan kawasan perdesaan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, diperlukan untuk mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di perdesaan. Pemerintah Kabupaten Karanganyar menyadari pentingnya hal tersebut, maka disusunlah rencana pengembangan kawasan perdesaan beras organik, yang terdiri dari delapan program, yang diimplementasikan pada tahun 2017-2021. Namun, belum pernah dilakukan evaluasi program dalam pembangunan kawasan pedesaan secara memadai. Evaluasi diperlukan untuk mengukur hasil pelaksanaan atas rencana dan mendukung pemahaman program sebagai bahan perbaikan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan keberlanjutan program, dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan program peningkatan sarana produksi pupuk organik dan program pengembangan sarana produksi beras organik di kawasan perdesaan beras organik Kabupaten Karanganyar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deduktif dengan variabel penelitian yang diturunkan berdasarkan tinjauan pustaka dan didukung dokumen perencanaan, terutama rencana pembangunan kawasan pedesaan. Efektivitas program diukur dengan variabel ketercapaian tujuan, tingkat penggunaan, dan penurunan biaya. Keberlanjutan program diukur dengan variabel usaha mempertahankan hasil dan kemampuan keuangan. Unit amatan dalam penelitian ini adalah kelompok tani penerima kegiatan dalam program di desa yang termasuk dalam kawasan perdesaan beras organik Kabupaten Karanganyar tahun 2017-2019.

Hasil penelitian menunjukkan program peningkatan sarana produksi pupuk organik tidak efektif dan tidak keberlanjutan karena lima kegiatan (semua kegiatan) tidak efektif. Program pengembangan sarana produksi beras organik tidak efektif dan tidak keberlanjutan karena hanya satu dari empat kegiatan yang efektif. Faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan program terutama yaitu program dan kegiatan di RPKP belum dilakukan pembahasan dengan entitas sumber pembiayaannya, kekurangjelasan isi program dalam dokumen perencanaan dan kawasan perdesaan di dokumen RTRW Kabupaten, koordinasi dan dukungan finansial dari kementerian, pemerintah daerah, dan pemerintah desa setempat, kondisi dan perencanaan kelompok tani penerima program, permasalahan mekanisme penetapan calon penerima bantuan dan pengendalian distribusi bantuan, serta monitoring dan pendampingan dari pemerintah kabupaten belum memadai.

ABSTRACT

As mandated by Law number 6 of 2014 concerning Village and Law number 27 of 2007 concerning Spatial Planning, rural area development is necessary to accelerate development and community empowerment in rural areas. The Karanganyar Regency Government realizes its importance, hence compiling an organic rice rural area development plan, consisting of eight programs and implemented in 2017-2021. However, they have never conducted a proper program evaluation in the development of rural areas. Evaluation is needed to measure the plans' implementation results and support the program understanding as material for policy improvement. This study aimed to evaluate the program's effectiveness and sustainability, and identify factors that influence the failure of the two researched programs.

This study used a deductive approach with research variables derived from a literature review and supported planning documents, especially the rural area development plan. Program effectiveness was measured using the output achievement, utilization rate, and cost reduction. Program sustainability was measured using the maintenance of results and financial capability. The observation unit in this study is farmer organizations that received the program in the village that are included in organic rice rural area Karanganyar Regency in 2017-2019.

The results showed that the organic fertilizer facilities improvement program was ineffective and not sustainable because five activities (all) were ineffective. The organic rice facilities improvement program was ineffective and not sustainable because only one activity is effective out of four. Factors that affected the program's failure were: the programs listed in the RPKP have not been discussed with the financing entity, the clarity of program content in planning documents and organic rice rural area in RTRW, coordination and financial support from ministries, regional governments, and local village governments, the conditions and planning of farmer organizations receiving the program, problem in the determination of beneficiary candidates, aid distribution management, and inadequate government monitoring and guidance.

5. Nama : Muhammad Rahmat Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Dampak Bantuan Siswa Miskin (BSM) Terhadap Konsumsi Rokok Sektor Rumah Tangga Di Indonesia
Kata kunci : Evaluasi Dampak, Program BSM, CCT, PSM, IFLS, Konsumsi Rokok, Rumah Tangga
Keywords : *Impact Evaluation, BSM Program, CCT, PSM, IFLS, Cigarette Consumption*
-

ABSTRAK

Program subsidi Bantuan Siswa Miskin (BSM) adalah salah satu program sosial yang masuk dalam kategori CCT (*Conditional Cash Transfer*). BSM merupakan program pelengkap dari CCT sebelumnya yaitu Bantuan Operasional Sekolah (BOS), program BOS hanya mencakup biaya operasional sedangkan BSM untuk biaya transportasi, sepatu, seragam dan semua bahan pendukung siswa dalam kegiatan belajar di sekolah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan penggunaan dana subsidi BSM di masyarakat dengan menganalisis dampak BSM terhadap konsumsi rokok rumah tangga miskin di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data *Indonesian Family Life Survey* (IFLS) gelombang 5 tahun 2014. Metode analisis dampak yang digunakan adalah *Propensity Score Matching* (PSM). Hasil yang didapatkan pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian subsidi BSM kepada masyarakat miskin ternyata dapat menaikkan konsumsi rokok pada sektor rumah miskin di Indonesia.

ABSTRACT

Bantuan Siswa Miskin (BSM) is one of the social programs that fall into the CCT (Conditional Cash Transfer) category. BSM is a complementary program to the previous CCT that is Bantuan Operasional Sekolah (BOS), the BOS program only covers operational costs, while BSM covers the costs of transportation, shoes, uniforms and all student support materials in school learning activities.

This study aims to determine the appropriateness of the use of BSM in society by analyzing the impact of BSM on cigarette consumption of poor households in Indonesia. This study uses data from the Indonesian Family Life Survey (IFLS) wave 5 with the Propensity Score Matching (PSM) impact analysis method. The results show that the provision of BSM subsidies to the poor increases cigarette consumption in the poor housing sector in Indonesia.

6. Nama : Nisa Nurendah Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Efektivitas Kegiatan Monitoring Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Reguler Dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Organisasi (Studi Pada Inspektorat Kabupaten Jepara)
Kata kunci : Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Monitoring, Efektivitas, Akuntabilitas
Keywords : *Follow-Up On The Results Of Supervision, Monitoring, Effectiveness, Accountability*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah seiring diberlakukannya asas otonomi, pemerintah daerah memiliki hak, wewenang dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan perlu adanya pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan merupakan rangkaian proses mulai dari perencanaan sampai penyelesaian tindak lanjut. Tindak lanjut atas rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) merupakan salah satu faktor kegiatan pengawasan telah efektif. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mempercepat penyelesaian tindak lanjut adalah dengan melakukan *monitoring* tindak lanjut hasil pengawasan.

Penulisan tesis dengan judul "Efektivitas Kegiatan Monitoring Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Reguler dalam Rangka Mewujudkan Akuntabilitas Organisasi" merupakan studi dengan kajian khusus terhadap pelaksanaan dan efektivitas *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler pada Inspektorat Kabupaten Jepara. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimanakah pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomenaasi hasil pengawasan di Kabupaten Jepara?; Bagaiamanakah efektivitas kegiatan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler dalam rangka mewujudkan akuntabilitas organisasi pada Kabupaten Jepara?; Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler dalam rangka mewujudkan akuntabilitas organisasi?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumen serta menggunakan analisis data studi kasus model Robert K Yin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler pada Kabupaten Jepara berdasarkan fungsi: a) kepatuhan menunjukkan belum semua entitas memiliki kepatuhan dalam penyelesaian tindak lanjut, b) akuntansi, bahwa entitas yang telah melakukan tindakan perubahan akan menyerahkan

bukti tindak lanjut, dan c) penjelasan adanya keterlambatan penyelesaian tindak lanjut karena adanya kendala yang dihadapi entitas. (2) Dari aspek efektivitas kegiatan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler belum efektif. Pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan reguler yang belum efektif belum dapat mewujudkan akuntabilitas organisasi. (3) Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan *monitoring* tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan antara lain: 1) Faktor-faktor yang mendukung yaitu; a) kinerja tim *monitoring* TLHP dan b) adanya komunikasi yang aktif antara tim *monitoring* dengan dinas-dinas yang terkait entitas dan tim pengawas. 2) Faktor-faktor yang menghambat antara lain: a) komitmen pimpinan yang kurang, b) keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana *monitoring* pada Inspektorat Kabupaten Jepara, c) keterbatasan SDM pada entitas, d) entitas belum mengetahui batas waktu penyelesaian tindak lanjut, dan e) faktor rekanan/ pihak ketiga.

ABSTRACT

The background of this research is that along with the implementation of the autonomy principle, local governments have the right, authority and authority to regulate and manage their own government affairs and the interests of local communities in the system of the Republic of Indonesia. To ensure the effective and efficient implementation of regional government in accordance with the planning and provisions of laws and regulations, it is necessary to have supervision over the implementation of regional governments. Supervision is a series of processes from planning to completion of follow-up. The follow-up on Inspection Result Report (LHP) recommendations is one of the factors that the monitoring activities have been effective in. One of the efforts made to accelerate the completion of the follow-up is by monitoring the follow-up results of supervision.

Writing a thesis with the title "Effectiveness of Monitoring Activities Followup to Recommendations for Results Regular Supervision in Order to Achieve Accountability Organization" is a study with a special study on the implementation and effectiveness of follow-up monitoring of recommendations on the results of regular supervision at the Inspectorate of Jepara Regency. Formulation of the problem in this research: How is the implementation of follow-up monitoring of the results of supervision recommendations in Jepara Regency?; How effective is the monitoring activity of the follow-up recommendations on the results of regular supervision in the context of realizing organizational accountability in Jepara Regency?; What factors support and hinder the implementation of follow-up monitoring of recommendations on the results of regular supervision in the context of realizing organizational accountability? The research method used is a qualitative method with a descriptive approach. The technique of collecting data by interviewing, observing and studying documents and using the case study data analysis of the Robert K Yin model.

The results showed that (1) the implementation of follow-up monitoring of recommendations on the results of regular supervision in Jepara Regency based on the functions: a) compliance showed that not all entities had compliance in completing the

follow-up, b) accounting that entities that had taken changes would submit evidence of follow-up. , and c) an explanation of the delay in completing follow-up actions due to constraints faced by the entity. (2) From the aspect of effectiveness of monitoring activities, the follow-up recommendations on the results of regular supervision are not yet effective. The implementation of followup monitoring of recommendations on the results of regular supervision that has not been effective has yet to achieve organizational accountability. (3) There are several factors that support and hinder the implementation of follow-up monitoring on the results of supervision recommendations, including: 1) Supporting factors, namely; a) TLHP monitoring team performance and b) there is active communication between the monitoring team and related agencies and the supervisory team. 2) Obstructing factors include: a) lack of commitment from the leadership, b) limited number of human resources and monitoring facilities at the Inspectorate of Jepara Regency, c) limited human resources at the entity, d) the entity does not know the deadline for completion of follow-up actions, and e) partner/third party factors.

7. Nama : Monsaputra Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Judul tesis : Peran Sertipikat Redistribusi Tanah untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Pasaman Barat
Kata kunci : Agunan, Autokorelasi spasial, Kesejahteraan, Redistribusi tanah, Reforma agraria
Keywords : *Agrarian reform, collateral, land redistribution, spatial autocorrelation, welfare*
-

ABSTRAK

Kabupaten Pasaman Barat telah mengimplementasikan program redistribusi tanah dan mendorong agar sertipikat dapat digunakan sebagai agunan. Sertipikat redistribusi tanah tahun 2009 - 2018 yang diagunkan sebanyak 871 bidang (7,79 %) dan Kabupaten Pasaman Barat saat ini berada pada posisi keempat jumlah penduduk miskin terbanyak di Provinsi Sumatera Barat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik kegiatan redistribusi tanah, menganalisis pola spasial lokasi sertipikat redistribusi tanah, mengetahui faktor yang mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal dan menganalisis pengaruh pemanfaatan modal untuk kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks Moran, LISA, G Statistik, ANN, regresi logistik dan korelasi.

Lokasi yang diagunkan dan belum diagunkan memiliki autokorelasi spasial dengan nilai indeks Moran masing-masing 0,39 dan 0,43, ini menunjukkan ada autokorelasi spasial positif. Lokasi redistribusi tanah yang telah diagunkan maupun yang belum diagunkan memiliki sebaran yang mengelompok dengan nilai ANN masing-masing 0,32 dan 0,37. Hal ini disebabkan karena lokasi kegiatan redistribusi tanah berdasarkan kesediaan pemegang hak ulayat (pimpinan adat).

Faktor yang signifikan mempengaruhi pemanfaatan sertipikat sebagai agunan untuk mengakses modal adalah jumlah anggota keluarga, luas dan pengeluaran. Variabel pengeluaran dan luas memiliki hubungan positif, sedangkan jumlah anggota keluarga memiliki hubungan negatif. Faktor kesejahteraan penerima sertipikat nampaknya merupakan faktor penting yang berpengaruh pada kecenderungan memanfaatkan sertipikat untuk mengakses modal.

Pemanfaatan modal yang diperoleh dari agunan sertipikat redistribusi tanah mayoritas untuk kegiatan pertanian yaitu sebanyak 75%. Jumlah kemiskinan setelah ada tambahan modal menurun dari 12 % menjadi 7%. Hasil analisis korelasi menunjukkan bahwa ada korelasi positif yang kuat antara pengeluaran sebelum diagunkan dan setelah diagunkan.

ABSTRACT

West Pasaman Regency has implemented land redistribution and has promoted the certificate for serving as collateral. Based on data from the Land Office of West Pasaman

Regency, the number of redistribution certificates in 2009-2018 complemented with mortgage rights was 871 (7,79%) and West Pasaman Regency is currently in the fourth position with the largest number of poor people in West Sumatra Province.

This study aims to determine the characteristics of land redistribution activities, to analyze the spatial pattern of land redistribution certificate locations, to determine the factors that affect the use of certificates as collateral for accessing capital and to analyze the effect of capital utilization obtained from land redistribution certificate for community welfare. The methods of this study included Moran's index, LISA, ANN, logistic regression and correlation.

The distribution of collateralized land and non collateralized land were spatially autocorrelated with the Moran Index at 0,39 and 0,43 . ANN for collateralized certificates generates the closest neighbor ratio at 0,32 indicating statistically significant clustering pattern. Likewise, non-collateralized land certificate seems spatially clustered, with the closest neighbors's ratio at 0,37.

The logistic regression resulted several significant factors influencing the use of certificates for collateral including the number of family members, expenditures and land area. Household expenditure and land area had a positive influence, meanwhile the number of family members had a negative effect. It seems that household prosperity is essential factor affecting the likelihood of collateralization of land certificates.

In general, the majority (75%) of utilization of land redistribution certificates to obtain loan was related to agricultural activities. The role of certificate collateralization to reduce poverty was indicated from the slight drop of poverty proportion from 12% before the use of land-certificate for obtaining loan to 7% afterwards. The relationship between expenditure before and expenditure after additional capital from land certificate appear significant at 0,85.

8. Nama : Tirani Sakuntala Devi, SE, MPA Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Kebijakan Sektor Industri Pengolahan Kabupaten Pati Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
Kata kunci : Kebijakan, Evaluasi kebijakan, Pembangunan berkelanjutan
Keywords : *Policy, Policy Evaluation, Sustainable Development*
-

ABSTRAK

Industri pengolahan merupakan sektor unggulan di Kabupaten Pati. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan dengan kontribusi yang terbesar pada PDRB Kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kebijakan sektor industri pengolahan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif statistik. Deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisa kebijakan sedangkan deskriptif statistik digunakan untuk menghitung kinerja sektor industri pengolahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan sektor industri pengolahan belum fokus mendukung pembangunan berkelanjutan. Pencemaran sebagai akibat dari industri pengolahan masih sering terjadi sehingga menyebabkan pengaduan ke dinas terkait sejak tahun 2016 terus meningkat dan ditambah Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara belum memenuhi target. Selain itu kebijakan industri Kabupaten Pati bertujuan untuk meningkatkan produktifitas sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

ABSTRACT

The processing industry is the leading sector in Pati Regency. This is evidenced by the growth of GRDP in the manufacturing sector with the largest contribution to the GRDP of Pati Regency. This study aims to determine how the performance of manufacturing sector policies in supporting sustainable development. The research method used is descriptive qualitative and descriptive statistics. Qualitative descriptive is used to analyze policy while statistical descriptive is used to calculate the performance of the manufacturing sector. The results of the study indicate that the policy of the manufacturing sector has not focused on supporting sustainable development. Pollution as a result of the processing industry is still common, causing complaints to the relevant agencies since 2016 to continue to increase and the Water Quality Index and Air Quality Index have not met the target. In addition, the industrial policy of Pati Regency aims to increase productivity so that it can encourage economic growth.

9. Nama : Sandra Widayarsi Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Kinerja Parkir Sebelum dan Setelah Kebijakan Penerapan Parkir Elektronik Berlangganan (E-Parkir) di Kota Tarakan
Kata kunci : Parkir elektronik berlangganan, E-Parkir, Perbandingan kinerja parkir
Keywords : *Annual Payment Electronic Parking. E-Parking, Parking Performance Comparison*
-

ABSTRAK

Evaluasi kinerja parkir sebelum dan setelah kebijakan penerapan parkir elektronik berlangganan di Kota Tarakan dalam penelitian ini ditinjau berdasarkan beberapa kriteria. Kriteria tersebut mengacu pada tujuan penetapan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 1 Tahun 2020. Selain dalam rangka perbaikan pelayanan parkir yang selama ini dianggap masih belum optimal, perubahan penyelenggaraan pelayanan perparkiran dilakukan untuk mendukung salah satu program unggulan Pemerintah Kota Tarakan, yaitu Program *Smart City*. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu (1) mengkomparasikan kinerja parkir sebelum dan setelah penerapan parkir elektronik berlangganan (e-parkir) di Kota Tarakan dan (2) menguraikan faktor yang dapat direkomendasikan untuk perbaikan kebijakan terkait kinerja parkir elektronik berlangganan di Kota Tarakan.

Penelitian dengan metode campuran ini mengadopsi tipe *sequential explanatory* (penggabungan kuantitatif dan kualitatif secara berurutan). Lima kriteria yang telah ditetapkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tiga kriteria yang dianalisis dengan pendekatan kuantitatif yakni kriteria kemudahan, keringanan, dan pelayanan. Selanjutnya, dua kriteria lainnya dianalisis secara kualitatif yaitu kepastian dan pendapatan. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan uji *paired sample t test* menggunakan SPSS. Sementara teknik kualitatif dilakukan dengan observasi lapangan maupun wawancara kepada sumber informan yang relevan untuk menjawab pertanyaan seputar pengelolaan parkir sebelum dan setelah penerapan e-parkir.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga kriteria yang dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan kinerja parkir sebelum dan setelah kebijakan penerapan parkir elektronik berlangganan (e-parkir) di Kota Tarakan. Sebagian besar responden e-parkir merasakan *benefit* dengan kebijakan penerapan e-parkir. Dari kelima kriteria yang diamati, keempat kriteria menunjukkan hasil yang lebih baik bila dikomparasikan dengan kondisi sebelum penerapan e-parkir. Sementara kriteria pendapatan tidak dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Ketika dilakukan perbandingan sebelum dan setelah penerapan e-parkir, pendapatan setelah penerapan e-parkir mengalami defisit untuk biaya operasional penggajian juru parkir. Faktor-faktor yang diduga berpengaruh terhadap kinerja parkir elektronik berlangganan (e-parkir) dibedakan menjadi dua, terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berpengaruh adalah komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara faktor eksternalnya yaitu faktor teknologi dan faktor insentif dan disinsentif.

ABSTRACT

Parking performance evaluation before and after the implementation of Tarakan City annual payment electronic parking (e-parking) policy in this research based on several criteria. These criteria refers to the aim of implementation Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2020. In addition to improve the parking services which so far are considered to be inadequate, modification of parking services performance is furthermore to support one of the Tarakan City Government's priority program, namely Smart City Program. This research has two goals: (1) to compare parking performance before and after implementation of annual payment electronic parking policy (e-parking) in Tarakan City, and (2) to elaborate recommendation factors aimed at enhancing policy improvement about performance of annual payment electronic parking (e-parking) in Tarakan City.

This research used mixed methods with sequential explanatory design type (combining quantitative and qualitative sequentially). The five predefined criteria were then classified based on quantitative and qualitative methods. Three of these criteria were analysed by quantitative methods, namely: ease, waivers and service. And the other two criteria were analysed by qualitative methods, namely validity and revenue. The quantitative method conducted by paired sample t test using SPSS. And the qualitative methods conducted by field observation and interviews with relevant informants to answer the question about parking management before and after the implementation of e-parking.

The result showed that the three criteria analysed by quantitative methods had differences in parking performance before and after the implementation of annual payment electronic parking (e-parking) in Tarakan City. The majority of respondents identified the policy of e0parking benefits. And the other criteria which are analyzed by qualitative methods, indicating that the revenue criteria has not accomplished the target. When comparing before and after the implementation of eparking policy, after the e-parking implementation indicated that revenue experienced a deficit in terms of operating costs for parking attendants payroll. The influential factors of annual payment electronic parking (e-parking) performance divided into two factors, internal and external. The influential internal factors are communication, resources, disposisi, dan bureaucratic structure. Whereas the influential external factors are technologies and incentive and disincentive.

10. Nama : Novita Anggraeni Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Evaluasi Implementasi Kebijakan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan No: P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial, Pasca Izin
pada Hutan Desa Antutan Kabupaten Bulungan 2018-2019
Kata kunci : Evaluasi kebijakan, Perhutanan sosial, Hutan desa
Keywords : *Policy Evaluation, Social Forestry, Village Forest*

ABSTRAK

Konflik tenurial dan kemiskinan masyarakat lokal sekitar hutan menjadi penyebab berkurangnya kawasan hutan baik secara luasan maupun fungsinya. Pemerintah melalui program perhutanan sosial menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. P.83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dengan memberikan akses kelola kepada masyarakat lokal sekitar hutan. Hutan lestari, masyarakat sejahtera menjadi tujuan utama perhutanan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perhutanan sosial pasca izin pada hutan Desa Antutan Kabupaten Bulungan tahun 2018-2019 dan menganalisis para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pelaksanaan perhutanan sosial di hutan Desa Antutan. SK menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. SK.6177/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/09/2018 tanggal 24 September 2018 tentang pemberian izin pemanfaatan kawasan hutan dengan skema hutan desa seluas ± 488 hektar kepada Lembaga Pengelola Hutan Desa Antutan. Penelitian ini menggunakan teori evaluasi Dunn dengan parameter; efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsip dan kelayakan. Hasil dari wawancara dan observasi lapangan menunjukkan implementasi kebijakan perhutanan sosial pasca izin pada hutan Desa Antutan tahun 2018-2019 tidak sesuai dengan kebijakan perhutanan sosial tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak tersedianya dokumen sah tata kelola hutan yaitu rencana kerja usaha dan rencana kerja tahunan, terbentuknya kelompok usaha perhutanan sosial dan terlaksananya tata batas areal kerja hutan Desa Antutan. Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam program perhutanan sosial di Hutan Desa Antutan juga belum bersinergis dan berkontribusi dalam implementasi perhutanan sosial di hutan Desa Antutan.

ABSTRACT

Tenurial conflict and poverty of local communities around the forest is the cause of the reduction of forest areas both widely and functionally. The government through the social forestry program issued Regulation of the Minister of Environment and Forestry No. P.83 Year 2016 on Social Forestry by providing managed access to local communities around the forest. Sustainable forests, prosperous communities become the main objectives of social forestry.

This study aims to evaluate the implementation of post-permit social forestry policy in the forest of Antutan Village, Bulungan Regency in 2018-2019 and analyze the stakeholders involved in the implementation of social forestry in antutan village forest. Decree of the Minister of Environment and Forestry No. SK.6177/MENLHKPSK/PSL.0/09/2018 dated September 24, 2018 concerning the granting of permits for the utilization of forest areas with a village forest scheme covering an area of ± 488 hectares to the Antutan Village Forest Management Agency. This study uses Dunn's evaluation theory with parameters; effectiveness, efficiency, adequacy, responsiveness and feasibility. The results of interviews and field observations show the implementation of social forestry policy after permits in antutan village forest in 2018-2019 is not in accordance with the social forestry policy. This is evidenced by the unavailability of legal documents on forest governance, namely business work plans and annual work plans, the formation of social forestry business groups and the implementation of forest work boundary arrangements in Antutan Village. The stakeholders involved in the social forestry program in Antutan Village Forest have also not synergized and contributed to the implementation of social forestry in antutan village forest.

11. Nama : Ketsia Aprilianny Laya Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Judul tesis : Evaluasi dan Perumusan Strategi Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor
Kata kunci : Dana desa, Gap analysis, QSPM, Regresi linear berganda, SWOT
Keywords : *Village Fund, Gap Analysis, Multiple Linear Regression, SWOT, QSPM*

ABSTRAK

Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan turunannya telah mengubah paradigma pembangunan desa, dimana desa yang awalnya adalah objek pembangunan menjadi subjek pembangunan berbasis partisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan. Sesuai dengan prinsip money follow function dan money follow program, maka desa diberikan sumber pendapatan yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi desa dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah Dana Desa.

Kabupaten Bogor merupakan penerima Dana Desa terbesar di Provinsi Jawa Barat dengan rata-rata alokasi Dana Desa per desa lebih tinggi dari rata-rata nasional. Namun dalam enam tahun pelaksanaan Dana Desa di Kabupaten Bogor masih ditemukan kendala baik dari sisi pengalokasian, penyaluran, pelaksanaan maupun pelaporan, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor dan perumusan strategi untuk perbaikannya.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mengevaluasi implementasi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor yang meliputi aspek pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan pelaporan, 2) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor, dan 3) merumuskan strategi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan observasi lapangan, wawancara terstruktur dengan informan maupun dengan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (*purposive sampling*), sedangkan data sekunder diperoleh dari data yang dipublikasikan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah serta dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen-dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah: analisis deksriptif dengan gap analysis, regresi linear berganda, analisis skala likert, analisis SWOT dan metode QSPM.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Bogor, antara lain ketidaktepatan pengalokasian berdasarkan status desa, keterlambatan dalam penyaluran, penggunaan yang tidak sesuai dengan prioritasnya, serta keterlambatan dalam pelaporan realisasi anggaran dan fisik kegiatan. Faktor regulasi, sistem pengawasan, kepala desa serta pendamping desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pengelolaan Dana Desa jika diuji bersamaan (*uji F*), namun hanya variabel regulasi yang berpengaruh secara signifikan jika dilakukan uji parsial (*uji t*).

Implementasi strategi yang dapat dilaksanakan adalah peningkatan kemandirian desa dengan program desa mandiri, pengembangan unit usaha desa untuk peningkatan ekonomi pedesaan, peningkatan kompetensi perangkat desa pengelola Dana Desa dan penyempurnaan program pendampingan bagi desa dalam pengelolaan Dana Desa.

ABSTRACT

The issuance of Law Number 6 of 2014 about Village and its derivative regulations has changed the village development paradigm, where the village which was originally the object of development become the subject of participation-based development to improve the welfare of the people. In accordance with the principle of money follow function and money follow program, the village is given adequate source of income so that it can manage its potential to improve the village economy and community welfare, which is by providing the Village Fund.

Bogor Regency is the largest recipient of Village Fund in West Java Province with an average of the Village Fund allocated per Village higher than the national average. However, within six years of the implementation of the Village Fund in Bogor Regency, there were still obstacles in terms of allocation, distribution, implementation and reporting. Therefore, it is necessary to evaluate the implementation of the Village Fund management in Bogor Regency and formulate strategies for its improvement.

The purpose of this research are: 1) to evaluate the implementation of the Village Fund management in Bogor Regency that included the aspects of allocation, distribution, use and reporting, 2) to analyze effect of factors on the performance of Village Fund management in Bogor Regency, and 3) to formulate strategies to improve the performance of the Village Fund management in Bogor Regency. This study uses primary and secondary data. Primary data were obtained by means of field observations, structured interviews with informants and by distributing questionnaires to respondents who were selected deliberately (purposive sampling), while secondary data is obtained from data published by Ministries/Institutions/Local Governments as well as from literatures studies and studies of related documents. Some analytical method to answer the research objectives including gap analysis, multiple linear regression, Likert Scale analysis, SWOT analysis and the QSPM method.

Research results indicate that there were still problems in the management of Village Fund in Bogor Regency include inaccurate allocation based on village status, delays in distribution, usage that was not in accordance with its priorities, and delays in reporting budget realization and physical activities. The factors of regulation, supervision system, village head and the village facilitator have a significant effects on the success of the Village Fund management if tested simultaneously (F test), but only the regulation factor had a significant if a partial test was carried out (t test). The implementation of strategies that can be implemented is increasing the village independence through some program such as independent village program, development village business unit to improve rural economy, building the capacity of village fund managers and improving accompaniment for managing the village fund.

12. Nama : I Gede Ari Erawan Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Universitas linkage : National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Negara : Jepang
Judul tesis : *Factors Affecting Central Government's Performance Accountability in Indonesia*
Keywords : *Performance accountability, Indonesian Central Government, Expenditure budget, Balanced scorecard*

ABSTRACT

Most of the existing Indonesian studies regarding government performance accountability are focused on local governments, and research on the central government's performance accountability is limited. Additionally, based on the Ministry of State Apparatus Empowerment and Bureaucracy Reform's (MoSABR) assessment, the quality of the central government's performance accountability is still lacking. Therefore, the present study explores the factors affecting the central government's performance accountability, focusing on budget expenditures and the balanced scorecard (BSC) implementation. The results show that the budget growth in ministries with large and medium budgets tends to generate higher performance accountability growth. Contrarily, smallbudget ministries see budget growth that does not correlate with performance accountability growth. Moreover, non-BSC ministries tend to have lower performance accountability compared to ministries that implement BSC. In comparison, employees' education has a more pivotal role in generating performance accountability's growth. This study also suggests that ministries in economic services are more efficient in using their resources to create better performance accountability. By determining the factors that positively influence performance accountability, the central government can formulate specific policies for its improvement.

13. Nama : Laila Putri Rizalia Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Ritsumeikan University Negara : Jepang
Judul tesis : *The Evaluation of e-KTP Program Implementation in Indonesian Local Government: A Comparative Study in Metro Municipality and Pringsewu Regency*
Kata kunci : Evaluasi, Program e-KTP, Implementasi Kebijakan
Keywords : *Evaluation, e-KTP program, Policy implementation*
-

ABSTRAK

Di Indonesia, program e-KTP atau kartu identitas elektronik telah diluncurkan sejak tahun 2011. Melalui program ini, pemerintah Indonesia berusaha menjamin hak warga negara dan mendukung program pembangunan nasional. Namun, setelah hampir satu dekade berjalannya program ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pelaksana program e-KTP, masih menghadapi berbagai kendala dalam meraih targetnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program e-KTP di Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu, dua pemerintah daerah di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif, studi ini juga menganalisa faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi program e-KTP, serta mengungkapkan penyebab perbedaan capaian target di kedua dinas. Lebih lanjut, model implementasi kebijakan publik oleh George Edward III dipresentasikan dan diterapkan dalam studi ini.

Secara keseluruhan hasil kuesioner dan interview menunjukkan bahwa implementasi program e-KTP di Kota Metro lebih baik dari Kabupaten Pringsewu, sesuai dengan pencapaian targetnya. Studi ini mengungkapkan bahwa lima faktor dapat mendukung dan menghambat program, yakni: (1) komunikasi internal dan eksternal, (2) sumber daya manusia dan pelayanan, (3) sumber daya fisik (fasilitas dan peralatan), (4) konsep e-KTP dan (5) prosedur dan kendala teknis. Bersama dengan itu, karena adanya perbedaan baik di internal dan eksternal komunikasi diantara kedua dinas, pencapaian target Kabupaten Pringsewu tidak seoptimal Kota Metro.

ABSTRACT

The e-KTP or electronic identity card program has been introduced in Indonesia since 2011. Through this program, Indonesian Government wants to ensure citizens rights and supports national development programs. However, after almost a decade since its launch, the Population and Civil Registration office, as the implementer of this program still has some problems achieving its targets.

This study aims to evaluate the e-KTP implementation program in Metro Municipality and Pringsewu Regency, two regions in Lampung Province, Indonesia. This study analyzed the supporting and inhibiting factors of the e-KTP implementation program in both offices

through a qualitative descriptive approach. Furthermore, the implementing public policy model of George C Edwards III is presented and applied in this study.

Overall, the results of the questionnaires and interviews show that the implementation of the e-KTP program in Metro Municipality is better than Pringsewu Regency, in line with the achievement of the target. The study reveals that five factors can be supporting and inhibiting for the program, namely: (1) internal and external communication, (2) human resources and services, (3) physical resources (facilities and equipment), (4) the e-KTP's concept, and (5) procedures and technical issues. In addition, due to differences in both internal and external communication between the two offices, the achievement of the e-KTP target in Pringsewu Regency is not as optimal as in Metro Municipality.

14. Nama : Renosa Tosca Zamaro Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Universitas linkage : National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) Negara : Jepang
Judul tesis : *The Impact of Health Subsidy on Health Care Utilization in Indonesia*
Kata Kunci : Jaminan Kesehatan Nasional, utilisasi fasilitas kesehatan, subsidi kesehatan, evaluasi dampak kebijakan
Keywords : *National health insurance, Health care utilization, Health subsidy, Impact evaluation*

ABSTRAK

Pada tahun 2014 pemerintah Indonesia menciptakan program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan subsidi premi asuransi bagi masyarakat miskin. Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak kebijakan subsidi kesehatan terhadap pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan. Studi ini menggunakan survei sosial ekonomi Indonesia (SUSENAS) tahun 2013 dan 2018, serta menerapkan dua metode analisis, yaitu regresi logistik, dan *difference-in-differences*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, subsidi kesehatan meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di puskesmas dan poliklinik, tetapi menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di praktik tenaga medis. Kemudian, pada fasilitas kesehatan tingkat lanjut, subsidi kesehatan dapat meningkatkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit umum, namun menurunkan kemungkinan kunjungan rawat jalan di rumah sakit swasta.

ABSTRACT

In 2014 the Indonesian government introduced a national health insurance program and provided insurance premium subsidies for poor people. This study aims to evaluate the health subsidy policy's impact on the utilization of different kinds of health care facilities. Two waves of Indonesian socio-economic surveys, namely 2013 and 2018, and two analysis methods, namely logistic regression, and difference-in-differences, were applied in this study. The results show that in first-level healthcare facilities, the health subsidy improves the probability of outpatient visits in public health centres and polyclinics but decreases the probability of outpatient visits in medical practices. Then, in secondary level health care facilities, the health subsidy increased the likelihood of outpatient visits in public hospitals; however, it lowers the probability of outpatient visits in private hospitals.

15. Nama : Agung Jati Perkasa Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Koordinasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi Hasil Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Studi di Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur)
Kata kunci : Koordinasi, Evaluasi hasil RKPD, Evaluasi hasil Renja, Pemerintah
Provinsi NTT
Keywords : *Coordination, Evaluation of RKPD results, Evaluation of Renja results,
NTT provincial government*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah pelaksanaan evaluasi hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTT yang belum mendapatkan hasil maksimal karena adanya keterlambatan dalam pelaporan evaluasi hasil Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) sehingga diperlukan kajian yang lebih mendalam terkait pelaksanaan koordinasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis kordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil RKPD di Pemerintah Provinsi NTT; serta Mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil RKPD di Pemerintah Provinsi NTT. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data berupa, pengamatan, wawancara, dokumentasi dan triangulasi serta menggunakan data model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana (2014:12- 14) yang terdiri dari kondensasi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil RKPD provinsi NTT belum berjalan dengan baik dikarenakan masih adanya keterlambatan pelaporan evaluasi hasil Renja PD lingkup pemerintah provinsi NTT yang disampaikan ke Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) provinsi NTT. Adanya ketergantungan dari Bappelitbangda kepada PD ini menyebabkan sangat diperlukan koordinasi yang baik sehingga evaluasi hasil RKPD bisa berjalan dengan baik. Selain itu, ketidaktaatan PD dalam melaporkan evaluasi hasil Renja tentunya menjadi penghambat Bappelitbangda provinsi NTT dalam menyusun laporan evaluasi hasil RKPD yang baik. Kondisi awal ini tentunya mendorong untuk dilakukan perbaikan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil RKPD provinsi NTT.

Sesuai dengan prinsip koordinasi, pelaksanaan koordinasi yang baik harus dimulai dari suatu perencanaan yang baik pula sehingga dalam pelaksanaan dan pengawasannya terjalin saling pengertian yang baik antara koordinator dan yang dikoordinasikan. Untuk suatu kegiatan yang berulang *Standar Operasional Prosedur (SOP)* merupakan alat yang tepat digunakan sebagai awal dari koordinasi. Namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP evaluasi

hasil RKPD masih bersifat untuk koordinasi *internal* di dalam lingkup Bappelitbangda saja. Demikian juga dengan SOP evaluasi hasil Renja PD yang juga digunakan untuk koordinasi di dalam PD sendiri. Dengan tidak adanya SOP yang menjadi satu sistem antara penyusunan evaluasi Renja dan evaluasi RKPD membuat koordinasi tidak dapat dilaksanakan dan diawasi dengan baik. Dalam pelaksanaan koordinasi dengan PD, Bappelitbangda memulainya dengan mengirim surat kepada PD tentang pembukaan pembukaan proses penginputan laporan pada aplikasi *e-monev performance* yang dikirimkan dalam bentuk *hardcopy* kepada PD dan juga dikirim menggunakan whatsapp (WA) grup *e-monev performance*. Didalam surat tersebut terdapat pemberitahuan tentang jadwal penginputan pada aplikasi *e-monev performance*, jadwal desiminasi antara Bappelitbangda dengan PD dan contact person (CP) dari Bappelitbangda yang dapat dihubungi oleh PD jika mengalami kendala dalam pelaksanaan penginputan laporan pada aplikasi *e-monev performance*. Selain itu, untuk komunikasi dengan PD, Bappelitbagda memanfaatkan WA grup *e-monev performance* untuk meningkatkan jika PD belum atau terlambat menginput laporan atau jika terjadi kesalahan penginputan. Demikian juga sebaliknya PD dapat menggunakan WA tersebut untuk menyampaikan kendala yang terjadi pada saat penginputan. Pada era pademi covid-19 ini pertemuan langsung antara Bappelitbangda dengan PD tidak bisa dilaksanakan secara rutin lagi, sehingga ketika butuh konfirmasi dilakukan via WA saja. Sedangkan dari PD jika mengalami kendala yang sulit dijelaskan lewat sistem *online* akan mendatangi Bappelitbangda secara langsung.

Terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi hasil RKPD di provinsi NTT, yaitu: 1) faktor pendukung: adanya komunikasi langsung dan adanya aplikasi pendukung pelaporan; 2) Faktor penghambat: evaluasi hasil Renja dan evaluasi hasil RKPD belum menjadi satu-kesatuan, Kurangnya Komitmen.

ABSTRACT

The background of this research is the evaluation of the results of the Regional Government Work Plan (RKPD) of NTT Province which has not received maximum results due to delays in reporting the evaluation of the results of the Regional Work Plan (Renja) of Regional Apparatus (PD) so that a more in-depth study is needed regarding the implementation of coordination.

The purpose of this research is to know, to describe and to analyze the coordination in the implementation of the evaluation of the results of the RKPD in the NTT Provincial Government; and Knowing, describing and analyzing the supporting and inhibiting factors of Coordination in the implementation of the evaluation activities of the RKPD results in the NTT Provincial Government. The research method used is descriptive research with a qualitative approach. With data collection techniques in the form of observations, interviews, documentation and triangulation as well as using the interactive model data Miles, Huberman, and Saldana (2014:12-14) which consists of condensation, data presentation, and drawing conclusions.

The results of research in the field indicate that the implementation of coordination in the implementation of the evaluation of the results of the RKPD in the province of NTT has not gone well due to the delay in reporting the evaluation of the results of the Renja PD within the scope of the NTT provincial government which is submitted to the Planning Agency for Development, Research and Regional Development (Bappelitbangda) of the province of NTT. The dependence of Bappelitbangda on the PD makes it necessary for good coordination so that the evaluation of the RKPD results can run well. In addition, the PD's disobedience in reporting the evaluation of the results of the Renja certainly becomes an obstacle for the NTT Provincial Bappelitbangda in compiling a good evaluation report of the RKPD results. This initial condition certainly encourages improvements in coordination in the implementation of the evaluation of the results of the NTT provincial RKPD.

In accordance with the principle of coordination, the implementation of good coordination must start from a good plan so that in its implementation and supervision there is a good mutual understanding between the coordinator and the coordinated. For a repetitive activity Standard Operating Procedure (SOP) is the right tool to use as a starting point for coordination. However, the results of the study indicate that the SOP for evaluating the results of the RKPD is still for internal coordination within the scope of Bappelitbangda only. Likewise with the SOP for evaluating the results of the PD Renja which is also used for coordination within the PD itself. In the absence of SOPs that become a system between the preparation of the Renja evaluation and the evaluation of the RKPD, coordination cannot be carried out and monitored properly. In implementing coordination with the PD, Bappelitbangda begins by sending a letter to the PD regarding the opening of the report entry process in the e-monev performance application which is sent in hardcopy to the PD and also sent using whatsapp (WA) the e-monev performance group. In the letter there is a notification about the schedule for inputting the e-monev performance application, the dissemination schedule between Bappelitbangda and the PD and a contact person (CP) from Bappelitbangda who can be contacted by the PD if they encounter problems in the implementation of inputting reports on the e-monev performance application. In addition, for communication with the PD, Bappelitbangda utilizes the WA e-monev performance group to warn if the PD has not or is late in inputting a report or if an input error occurs. Vice versa, the PD can use the WA to convey the obstacles that occur at the time of inputting. In this era of the covid-19 pandemic, direct meetings between Bappelitbangda and PD cannot be carried out routinely anymore, so when confirmation is needed, it is done via WA only. Meanwhile, from the PD, if they experience problems that are difficult to explain through the online system, they will go to Bappelitbangda directly.

There are several factors supporting and inhibiting coordination in the implementation of the evaluation of the results of the RKPD in NTT province, namely: 1) supporting factors: direct communication and application support for reporting; 2) Inhibiting factors: the evaluation of the results of the Renja and the evaluation of the results of the RKPD have not become a single unit, Lack of Commitment.

1. Nama : Ratna Dwijayanti Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : *Dynamic Governance* pada Program Panggung Tanggap COVID-19
Desa Panggungharjo Kecamatan sewon Kabupaten Bantul
Kata kunci : *Dynamic governance, Tanggap COVID-19, public engagement*
Keywords : *Dynamic Governance, Covid-19 Responsive, Public Engageme*
-

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana konsep *dynamic governance* oleh Panggung Tanggap Covid-19 (PTC-19) dalam penanganan Pandemi Covid-19 di Desa Panggungharjo. Kerangka kerja *dynamic governance* diharapkan dapat dijadikan tata kelola pemerintahan yang lebih cepat tanggap dalam menghadapi tantangan kedinamisan permasalahan di era pandemi. Konsep tata kelola penanganan bencana Covid-19 melibatkan sinergi antara aktor pemerintah dan non pemerintah untuk mampu bekerja sama secara dinamis mengeluarkan program cepat dan tepat atas permasalahan masyarakat terdampak pandemi. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan analisis data yang didasarkan pada teori *dynamic governance* yang dikemukakan oleh Rask, et al (2016). Peneliti memfokuskan penelitian pada 3 (tiga) fokus kerangka kerja *dynamic governance* yaitu *public engagement*, kapasitas dinamis dan kebermanfaatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *dynamic governance* dinilai belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih perlu penguatan *public engagement* dalam bentuk keterlibatan dan peningkatan kapasitas dinamis dengan perluasan jaringan kerja sama. Sehingga dengan adanya hasil analisis terhadap konsep *dynamic governance* tersebut diharapkan adalah menjadi salah satu upaya untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di era pandemi.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of knowing how the dynamic governance concept by PTC-19 (Panggung Tanggap Covid-19) in handling the Covid-19 Pandemic in Panggungharjo Village. The dynamic governance framework is expected to be used as governance that is more responsive in dealing with the dynamic challenges of problems in the pandemic era. The concept of governance for handling the Covid-19 disaster involves synergies between government and non-government actors to be able to work together dynamically to issue fast and appropriate programs for community problems affected by the pandemic. The researcher uses a qualitative approach with the type of case study research. Researchers collected data by in-depth interviews, observation, and documentation. Researchers conducted data analysis based on the dynamic governance theory proposed by

Rask et al (2016). The researcher focuses his research on 3 (three) focuses of the dynamic governance framework, namely public engagement, dynamic capacity and usefulness. The results of the study indicate that the application of dynamic governance is considered not optimal. This is because there is still a need to strengthen public engagement in the form of engagement and dynamic capacity building by expanding the network of cooperation. So that with the results of the analysis of the dynamic governance concept, it is hoped that it will be one of the efforts to continue to improve services to the community.

2. Nama : Angela Maria Noni Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Sriwijaya
Judul tesis : Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Pengguna Layanan Hak Tanggungan Elektronik (HT-el) di Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu
Kata kunci : Kualitas pelayanan, Kualitas produk, Kualitas pengguna layanan
Keywords : *Service Quality, Product Quality, User Satisfaction*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap kepuasan pengguna layanan hak tanggungan elektronik (HT-el) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu). penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner. Populasi penelitian ini adalah para pengguna layanan hak tanggungan elektronik (HT-el) yaitu para Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Kreditor, sebanyak 72 orang. Penentuan jumlah sampel menggunakan Tabel Morgan dan Krejcie sehingga jumlah sampel sebanyak 59 responden. metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis regresi berganda menggunakan *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) 26.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan HT-el sebesar 48,7 persen, kualitas produk berpengaruh terhadap kepuasan pengguna layanan HT-el sebesar 63,3 persen, sementara itu kualitas pelayanan dan kualitas produk secara simultan berpengaruh positif dan signifikan sebesar 66,1 persen. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi kualitas pelayanan hak tanggungan elektronik (HT-el) khususnya pada daya dukung (*citizen support*) yang melibatkan pelaksana HT-el. Diharapkan dapat diadakannya kegiatan-kegiatan peningkatan keterampilan teknis dan pengembangan karakter pelaksana HT-el, yaitu pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

ABSTRACT

This study was aimed to analyze the influence of service quality and product quality on user satisfaction of electronic mortgage service (HT-el) in Land Office of Ogan Komering Ulu. This study is a quantitative study while the data is collected by distributing questionnaires. The number of population of this study is 72 user of electronic mortgage service (HT-el), consisted of PPAT and Creditors. 59 respondents were selected as samples using Morgan and Krejcie tables. The method used to analyze the data is multiple regression analysis using Statistical Product and Service Solutions (SPSS) 26.0. The results showed that the quality of service affects the satisfaction of HT-el service users by 48.7 percent, product quality affects the satisfaction of HT-el service users by 63.3 percent, meanwhile service and product quality simultaneously have a positive and significant effect of 66.1 percent. Thus, it is necessary to improve the quality of electronic mortgage service (HT-el) and its product, especially on the citizen support dimension, which is involving HT-el implementors. It is recommended to the Land Office to enforce some activities which are related with improving the technical skills and developing the character of HT-el implementors, that is employees of the Land Office of Ogan Komering Ulu.

3. Nama : Rahmadina Fitria Ristanti Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Kemampuan *Thinking Ahead* dalam Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus di Pemerintah Kabupaten Malang)
Kata kunci : *Thinking ahead, Dynamic governance, Road map*, Reformasi birokrasi
Keywords : *Thinking Ahead, Dynamic Governance, Road Map, Bureaucratic Reform*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah birokrasi harus mampu untuk beradaptasi terhadap perubahan lingkungan namun seringkali birokrasi dianggap sebagai organisasi yang tidak dinamis yang tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan. Untuk itu dalam rangka memperbaiki kinerja, citra negatif, serta menciptakan birokrasi yang adaptif maka perlu dilakukan reformasi terhadap birokrasi. Reformasi birokrasi di Indonesia memiliki tujuan akhir menciptakan *dynamic governance*. *Dynamic governance* dapat tercipta melalui kebijakan yang adaptif. Untuk menuju kesana maka kebijakan reformasi birokrasi harus menjadi kebijakan yang adaptif. Dalam kerangka kerja *dynamic governance*, untuk dapat membuat kebijakan yang adaptif dibutuhkan kemampuan dinamis yang salah satunya adalah kemampuan *thinking ahead*. Dengan kemampuan *thinking ahead* akan membantu perencanaan bukan hanya sekedar mengisi formulir yang ditentukan tanpa pemikiran dan dialog substantif. Kemampuan *thinking ahead* merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan masa depan lingkungan, memahami dampaknya terhadap tujuan yang penting, dan mengidentifikasi investasi strategi serta pilihan yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang baru dan menangani potensi ancaman. Pemerintah Kabupaten Malang telah memiliki dokumen perencanaan reformasi birokrasi yaitu *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2017-2021 dan pelaksanaannya telah memasuki tahun keempat. Berdasarkan hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi disebutkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang belum dapat menyentuh perubahan terhadap permasalahan birokrasi serta belum memperlihatkan perbaikan substantif yang berdampak pada perbaikan tata kelola.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kemampuan *thinking ahead* dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang serta faktor yang mempengaruhi kemampuan *thinking ahead* dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik

analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Miles, Huberman dan Saldana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penyusunan *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang belum memenuhi proses diterapkannya kemampuan *thinking ahead*. Hal ini dikarenakan dalam penyusunannya *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang tidak terdapat proses mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap tujuan kebijakan; memahami bagaimana perkembangan akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini dan menguji efektivitas strategi, kebijakan, program yang ada; serta menyusun pilihan strategi yang dapat digunakan sebagai persiapan dalam menghadapi ancaman dan eksplorasi peluang baru. Namun, dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang sudah ada upaya pelibatan *stakeholder* dan *decision makers* dalam pembicaraan strategi.

Faktor yang mempengaruhi kemampuan *thinking ahead* dalam penyusunan *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang adalah sumber daya manusia pada tim penyusun belum merupakan *able people* (orang-orang yang cakap). Sumber daya manusia yang menyusun *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang memiliki pemahaman yang kurang terhadap reformasi birokrasi, menganggap bahwa *road map* reformasi birokrasi hanyalah sebuah dokumen formalitas, dan lebih memilih jalan mudah dengan menyamakan dengan *road map* reformasi birokrasi nasional. Sedangkan terkait *agile processes* (proses yang gesit), proses penyusunan *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang mendukung diterapkannya proses *thinking ahead*. Hal ini karena proses penyusunan *road map* reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Malang dilakukan melalui proses pembahasan bersama dan melibatkan seluruh *stakeholders*.

ABSTRACT

The background of this research is that the bureaucracy must be able to adapt to environmental changes, but not usually regarded as a dynamic organization. Therefore, it is necessary to reform the bureaucracy in order to improve performance, a negative image, and create an adaptive bureaucracy,. Bureaucratic reform in Indonesia has the ultimate goal of creating dynamic governance. Dynamic governance can be created through adaptive policies. To get there, the bureaucratic reform policy must be an adaptive policy. Within the framework of dynamic governance, one of dynamic capabilities, thinking ahead are needed to be able to make adaptive policies. Thinking ahead will help planning, not just filling out the prescribed forms without substantive thought and dialogue. Thinking ahead is the ability to identify future developments in the environment, understand their implications on important goals, and identify the strategic investments and options required to take advantage of new opportunities and deal with potential threats. Malang Regency Government already has a bureaucratic reform planning document, namely the Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Malang 2017-2021 and has entered its fourth

year of implementation. Based on the results of evaluation by Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, it is stated that the implementation of bureaucratic reform in the Malang Regency Government has not been able to address changes to bureaucratic problems and has not shown substantive improvements that have an impact on improving governance.

The purpose of this research is to describe and analyze the thinking ahead capability in formulating bureaucratic reform road map of Malang Regency Government and the factors that affect it. The research method used is qualitative research. Data collected through interviews and documentation. The data analysis technique in this study used an interactive model from Miles, Huberman and Saldana.

The results showed that formulating bureaucratic reform road map in Malang Regency Government had not yet fulfilled the implementing thinking ahead capability process. This is because in formulating bureaucratic reform road map in Malang Regency Government, there is no process of exploring and anticipating future trends and developments that may have significant impact on policy goals; understand how developments will affect the achievement of current goals and testing the effectiveness of existing strategies, policies, programs; as well as formulating strategic what options could be used to prepare for the emerging threats and exploit new opportunities. However, in formulating process of bureaucratic reform road map in Malang Regency Government there have been efforts to involve stakeholders and decision makers in the strategy discussion.

The factor that affects the thinking ahead capability in formulating bureaucratic reform road map in Malang Regency Government is that the human resources in the drafting team are not able people. Human resources who doing the formulating of bureaucratic reform road map in Malang Regency Government have a lack of understanding of bureaucratic reform. They think that the bureaucratic reform road map is just a formality document, and prefer the easy way to equate it with the national bureaucratic reform road map. Meanwhile, related to agile processes, the process of formulating a bureaucratic reform road map in Malang Regency Government supports the implementation of the thinking ahead process. This is because the process of formulating a bureaucratic reform road map in the Malang Regency Government is carried out through a process of joint discussion and involving stakeholders.

4. Nama : Wulan Sri Rahayu Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Judul tesis : Peranan Akuntabilitas Dalam Efisiensi Pengeluaran Pemerintah Daerah
Kata kunci : Akuntabilitas, Data Envelopment Analysis (DEA), Efisiensi, *Governance*
Keywords : *Accountability; Data Envelopment Analysis (DEA); Efficiency; Governance*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh akuntabilitas, sebagai salah satu aspek *governance*, terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah di level kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dilakukan pengukuran efisiensi dengan menggunakan metode *Data Envelopment Analysis* (DEA). Tahap berikutnya dilakukan regresi dengan metode tobit untuk mengestimasi pengaruh akuntabilitas terhadap efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Hasil estimasi menunjukkan adanya hubungan non linear dari akuntabilitas, yang *diproxykan* menggunakan indeks opini BPK, dengan efisiensi pengeluaran pemerintah daerah. Pada awalnya akuntabilitas akan berjalan searah dengan peningkatan efisiensi, namun pada titik tertentu kenaikan dalam akuntabilitas tidak lagi dapat menaikkan tingkat efisiensi pengeluaran pemerintah daerah.

ABSTRACT

This research aims to find out the effect of accountability, as one of governance aspects, on the efficiency of local government expenditure in the level of district/city in Indonesia. This research is conducted in two stages, the first stage is measuring efficiency by using Data Envelopment Analysis (DEA) method. The next stage is regression using tobit method to know the estimation of accountability impact towards the efficiency of local government expenditure. The estimation result shows a nonlinear relation between the accountability, which proxied using Indonesia Audit Board (BPK) Opinion Index, and the efficiency of local government expenditure. Initially, accountability will proceed hand in hand with increasing efficiency, however at a certain point an increase on accountability will no longer able to increase the efficiency level of local government expenditure.

5. Nama : Angga Septian Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evaluasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Sanggau
Kata kunci : Sistem merit, Seleksi terbuka, Jabatan pimpinan tinggi pratama,
Manajemen ASN
Keywords : *merit system, open selection, primary High Leader Positions, State
Civil Apparatus (ASN) management*
-

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi didasarkan pada seleksi terbuka yang kompetitif sehingga melalui sistem ini maka seluruh ASN memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan pada level pusat maupun daerah dengan memperhatikan syarat jabatan dan standar kompetensi yang telah ditetapkan. Kabupaten Sanggau telah melaksanakan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada tahun anggaran 2019 pada 7 (tujuh) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, namun selama ini belum terdapat evaluasi pelaksanaannya. Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku serta sejalan dengan tujuan khususnya untuk mewujudkan objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses promosi/pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Berdasarkan hal tersebut, tesis ini akan berfokus untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau dan apa saja kontribusi serta kendala dalam pelaksanaannya.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi serta dokumentasi. Yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan pendekatan analisis data kualitatif melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau pada tahun anggaran 2019 sudah dilaksanakan dengan baik. Hal tersebut terlihat pada kesesuaian antara pelaksanaan pada setiap tahapan seleksi terbuka JPTP di Kabupaten Sanggau dengan tata cara seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didukung pula dengan tidak adanya intervensi dari pihak KASN selaku lembaga yang berwenang dalam pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi terhadap Pemerintah Kabupaten Sanggau selaku penyelenggara seleksi terbuka. Upaya sistem merit, mempercepat regenerasi, dan transparansi menjadi kontribusi nyata pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau. Namun disisi lain juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu

berkaitan dengan kurangnya minat/motivasi ASN yang berkompeten, waktu pelaksanaan yang cukup lama, serta biaya pelaksanaan seleksi yang mahal.

ABSTRACT

Law Number 5 of 2014 mandates that the filling of the High Leader Positions (Jabatan Pimpinan Tinggi) is based on a competitive open selection. Through this system, all State Civil Apparatus (Aparatur Sipil Negara) have the same opportunity to occupy positions at the central and regional levels by taking into account the job requirements and competency standards that have been set. Sanggau Regency has carried out an open selection of Primary High Leader Positions in the 2019 fiscal year for 7 (seven) Primary High Leadership Positions (JPTP), but so far there has been no evaluation of its implementation. Is the implementation following applicable regulations and in line with the specific objectives of realizing objectivity, transparency, and accountability in the promotion/filling process for the Primary High Leader Position? Based on this query, this thesis will focus on evaluating the implementation of the open selection of Primary High Leader Positions within the Sanggau Regency Government and what the contributions and obstacles in its implementation are.

This research used a case study method with a qualitative approach. The data collection was done through interviews, observation, and documentation. Furthermore, the data were analyzed using a qualitative data analysis approach through data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of the study showed that the implementation of the open selection of the Primary High Leader Position within the Sanggau Regency Government in the 2019 fiscal year had been carried out well. This could be seen in the compatibility between the implementation at each stage of the Primary High Leader Position (JPTP) open selection in Sanggau Regency with the selection procedure for filling the High Leadership Position. It had been regulated in the applicable laws and regulations and was also supported by the absence of intervention from the State Civil Apparatus Commission (KASN) as the authorized institution in supervision implementation of the open selection of High Leader Positions (JPT) against the Sanggau Regency Government as the organizer of the open selection. The efforts of a merit system, accelerating regeneration, and transparency had become evident in the implementation of the open selection of Primary High Leader Positions (JPTP) within the Sanggau Regency Government. However, there were also obstacles in its implementation. It was related to the lack of interest/motivation of competent State Civil Apparatus (ASN), the implementation time was quite long, and the cost of implementing the selection was expensive.

6. Nama : Avina Firliyani Vanesha Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Pengaruh Dimensi Positif *TRI* (Optimisme dan Inovatif), Persepsi Dukungan Organisasi, dan Persepsi Dukungan Manajemen Terhadap Kemudahan Yang Dirasakan. Studi Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan
Kata kunci : *TRI, TAM, Persepsi dukungan organisasi, Persepsi dukungan manajemen*
Keywords : *TRI, TAM, Perception of Organizational Support, Perception of Management Support*
-

ABSTRAK

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh optimisme dan inovatif, persepsi dukungan organisasi, dan persepsi dukungan manajemen terhadap kemudahan yang dirasakan, studi pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penelitian kuantitatif dengan menghimpun data *survey* diaplikasikan dalam studi ini. Jumlah responden yang didapatkan sebanyak 81 responden yang terdiri atas eselon II, eselon III, dan eselon IV. Teknik analisis regresi berganda dengan menguji 4 (empat) variabel independen terhadap 1 (satu) variabel dependen dipilih dalam observasi peneliti. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yang diujikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis 1, 2, dan 4 terdukung atau diterima, artinya bahwa optimisme, inovatif, dan persepsi dukungan manajemen memiliki pengaruh yang positif terhadap kemudahan yang dirasakan. Sedangkan hipotesis 3 yang diajukan tidak terdukung atau ditolak, artinya bahwa persepsi dukungan organisasi tidak menunjukkan adanya pengaruh terhadap kemudahan yang dirasakan.

ABSTRACT

The purpose of writing this research is to test the influence of positive optimism and innovative, perception of organizational support, and perception of management support to perceived ease of use, study on the application of Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) in the Regional Secretariat of the Provincial Government of West Kalimantan. Quantitative research by collecting survey data is applied in this study. The number of respondents obtained as many as 81 respondents consisting of echelon II, echelon III, and echelon IV. Multiple regression analysis technique by testing 4 (four) independent variables against 1 (one) dependent variable were selected in the researcher's observation. This study has 4 hypotheses tested. The results showed that hypotheses 1, 2, and 4 were supported or accepted, meaning that optimism, innovation, and perception of management support had a positive effect on perceived ease of use. While hypothesis 3 proposed is not supported or rejected, it means that the perception of organizational support doesn't indicate any influence on perceived ease of use.

7. Nama : Almuttaqin Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Institut Pertanian Bogor
Judul tesis : Strategi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan (*e-Budgeting*) dalam Mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Aceh
Kata kunci : e-Budgeting, Good governance, Pemerintah Aceh, Sistem informasi, Analisis regresi linier berganda
Keywords : *e-Budgeting, good governance, Aceh government, information system, multiple linear regression analysis*
-

ABSTRAK

Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan melakukan reformasi birokrasi pada berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan tidak hanya pada pemerintah pusat namun juga pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance* akan meningkatkan kinerja organisasi pemerintah daerah yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah. *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan atau tatanan kehidupan pemerintahan yang baik dalam menyediakan pelayanan publik berdasarkan prinsip dan karakteristik tertentu. Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan meliputi tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Seiring perkembangan teknologi informasi dalam era digitalisasi 4.0, maka sistem informasi dapat dimanfaatkan sebagai salah satu media untuk meningkatkan prinsip *good governance*, seperti Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran Keuangan (*e-Budgeting*) yang digunakan oleh Pemerintah Aceh yang memberikan perhatian serius terhadap upaya reformasi birokrasi dalam mewujudkan *good governance* dengan menempatkannya sebagai prioritas pertama visi dan misi kepala daerah serta menjabarkannya dalam RPJMA. *E-Budgeting* dirancang dan resmi digunakan pada tahun 2019 untuk tahun anggaran 2020. Setelah hampir satu dekade, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh 2020 akhirnya dapat dilaksanakan tepat waktu. Pada satu sisi, *e-Budgeting* mengambil peran yang cukup penting dalam pencapaian keberhasilan tersebut, namun pada sisi lain realisasi Indek Reformasi Birokrasi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya, bahkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik justru menurun. Oleh karenanya, menjadi hal yang menarik untuk diteliti sejauh mana *e-Budgeting* dapat meningkatkan prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan di Aceh.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengukur capaian nilai *good governance* pengelolaan keuangan menggunakan *e-Budgeting* pada SKPA; (2) menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penerapan *e-Budgeting*; dan (3) merumuskan strategi penerapan *e-Budgeting* pada SKPA di lingkup Pemerintah Aceh dalam mewujudkan *good governance*.

Populasi dalam penelitian adalah 47 Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) sebagai unit analisis. Penentuan sampel dengan jenis *Non Probability Sampling* menggunakan teknik sampling jenuh (sensus). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara secara *online via google form*, diperoleh jawaban dari 34 SKPA dan 67 informan kunci yang terdiri dari 32 Kepala Subbag Program, Informasi Humas dan 35 operator *e-Budgeting*.

Analisis deskriptif menunjukkan bahwa Penerapan *e-Budgeting* pada SKPA dapat meningkatkan nilai *good governance* dalam pengelolaan keuangan. Penerapan *e-Budgeting* di Pemerintah Aceh mencapai nilai *good governance* tertinggi pada prinsip efektif dan terendah pada prinsip transparan. Teknik analisis regresi linier berganda menunjukkan variabel dukungan atasan langsung dan jumlah operator berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerapan *e-Budgeting* dalam mewujudkan *good governance*. Sedangkan variabel pendidikan formal, pengalaman, pelatihan, dan keseimbangan pendapatan dengan beban kerja juga berpengaruh positif tetapi tidak signifikan. Hasil analisis tingkat kesenjangan kinerja dengan metode IPA berdasarkan pertanyaan *WebQual 4.0* menunjukkan bahwa atribut-atribut yang menyangkut keamanan sistem informasi termasuk pada kelompok atribut kinerja *e-Budgeting* dengan tingkat kepentingan tinggi namun kinerja aktualnya rendah. Hasil tersebut juga sejalan dengan hasil perancangan strategi dengan metode SWOT yang merekomendasikan strategi penerapan *e-Budgeting* dalam mewujudkan *good governance* secara berurutan berdasarkan prioritasnya, yaitu: (1) penyusunan analisis jabatan (anjab) staf pelaksana *e-Budgeting*; (2) peningkatan pemahaman atasan langsung; (3) penyesuaian kebutuhan operator *e-budgeting*; (4) sosialisasi dan fasilitasi alih jabatan fungsional (5) penyediaan kebutuhan sarana dan prasarana pendukung; dan (6) penguatan aksesibilitas internet dan keamanan jaringan.

ABSTRACT

One of regional autonomy goals is to improve the quality of governance by carrying out bureaucratic reforms in various aspects of governance, including financial management, not only in the central government but also in regional governments. Good governance will improve government organizations' performance which will accelerate the achievement of regional development goals. Good governance is a process of organizing or building a good governance life in providing public services based on certain principles and characteristics. The principles of good governance in financial management include orderly, efficient, economical, effective, transparent and responsible.

Along with development of information technology in digitalization 4.0 era, information systems can be used as a media to support good governance principles, such as Planning and Budgeting Information System (e-Budgeting) used by Aceh Government which has serious attention to bureaucratic reform which is manifested in the first priority of its vision, mission, and RPJMA. E-Budgeting is designed and officially used in 2019 for the 2020 fiscal year. After almost a decade, the endorsement of Aceh Revenue and Expenditure Budget (APBA) 2020 can finally be implemented on time. On the one hand, e-Budgeting played an

important role in achieving this success, but on the other hand, the realization of the Bureaucratic Reform Index did not change from the previous year, even the Public Information Openness Index decreased. However, it is interesting to examine whether e-Budgeting can improve the principles of good governance in financial management in Aceh.

This study aims to (1) measure good governance value achievements of SKPA in financial management using e-Budgeting (2) determine factors that influence e-Budgeting implementation, and (3) formulate a strategy for implementing e-Budgeting of Aceh Government in achieving a good governance. The population of this study was 47 Aceh Local Government Agencies (SKPA) as units of analysis. Sample determination by Non Probability Sampling type using a census sampling technique. Furthermore, data collection technique in this study used interviews and online questionnaires via google form to 67 informan keys, consisting of 32 Heads of Program, Information, and Public Relations Subdivision, and also 35 e-Budgeting operators.

Descriptive analisis toward the implemention of e-Budgeting in SKPA indicates a good performance in achieving good governance of financial management. The implementation of e-Budgeting in Aceh Government achieves the highest value of good governance on effectiveness principle and the lowest on transparency principle. Multiple linear regression analysis technique indicates that support of supervisor and number of operator variables have a positive and significant effect on e-Budgeting implementation in achieving a good governance. Meanwhile, formal education, experience, training, and income-work balancing variables also have a positive impact but insignificant. By using IPA method based on WebQual 4.0 questions, this research revealed that some attributes related to information system security are included in the e-Budgeting performance attribute group with a high level of importance but the actual performance is low. These results are also in line with the results of the strategy design using the SWOT method which recommends some strategies, such as: (1) preparation of job position analysis (anjab) for staffing of e-Budgeting; (2) improving understanding of direct supervisors; (3) adjusting requirement of eBudgeting operators; (4) Socialization and facilitation of ASN functional transfer (5) increasing of supporting facilities and infrastructure; and (6) strengthening internet accessibility and network security.

8. Nama : Risfayanti Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Universitas linkage : Ritsumeikan University Negara : Jepang
Judul tesis : *Employee Readiness for Knowledge Management Implementation in the Audit Board of The Republic of Indonesia*
Keywords : *Knowledge management, Employee readiness, SECI processes*
-

ABSTRACT

Knowledge is a valuable resource, a source of competitive advantage, but also an asset that every organization needs to manage effectively. If the knowledge is not managed, it will lead to the loss of such valuable assets as the employees leaving the organization. The audit board of the Republic of Indonesia is a big public institution with a high rotation of employees and high employee turnover. Moreover, the current Covid19 pandemic that forces the employee to work from home will urgently need successful implementation of knowledge management. Employee readiness is one of the critical factors in the implementation of knowledge management. If employees are not ready to implement knowledge management, this will lead to the organization's failure. Therefore this research evaluates employee readiness for knowledge management implementation. What is the most affecting factors of employee readiness to implement knowledge management, and are employees ready to implement knowledge management?

This research uses hierarchical regression to answer the question about the most affecting factors among the variables; gender, age, length of work, skill and qualification, reward and punishment, support and commitment from management, and behavior. Meanwhile, to answer the level of readiness to implement knowledge management, this research will use the intention to be involved in the SECI (Socialization, Externalization, Combination and Internalization) process as one of the well-known literature of knowledge creation and sharing. The analysis was conducted by using SEM (Structural Equation Modelling).

The result of this research shows that Behavior is the most defining factor in employee readiness to implement knowledge management in the audit board of the Republic of Indonesia. This result also shows that employees are ready to implement knowledge management. This is revealed by the result of the SEM analysis, which shows there are 14 items considered as the most representative dimensions in the SECI process and by the results of descriptive statistics with high values.

The result of this research is expected to fill the gap in Knowledge Management implementation in Indonesia in terms of employee readiness in the public sector. It is also expected to help BPK and other public sector organizations to implement Knowledge Management successfully. Most of the available literature currently discussing knowledge management is in the business sector. In addition, no literature discussion about employee readiness for knowledge management in the public sector in Indonesia exists. So the results of this study are expected to be one important reference for the public sector in Indonesia in its implementation of knowledge management.

9. Nama : Wa Hesty Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Digital
Pada Pemerintah Kabupaten Buru
Kata kunci : Pengembangan kapasitas, ASN, Digital
Keywords : *capacity building, ASN, digital*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya transformasi pemanfaatan teknologi digital di segala aspek, termasuk dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan (birokrasi) secara cepat dan masif. Hal ini juga menyebabkan adanya tuntutan untuk mengubah wajah pelayanan publik (transformasi) yang selama ini menjadi “buah bibir” masyarakat khususnya di lingkup pemerintah Daerah sehingga lebih efektif, efisien, dan transparan. Sayangnya, pergerakan reformasi birokrasi yang dilakukan tidak didukung oleh kualitas kapasitas pegawai pemerintah. Pemerintah kabupaten Buru merupakan salah satu dari daerah yang masih tertinggal dalam hal pengembangan *e-government*.

Penulisan Tesis dengan Judul “Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Berbasis Digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru” merupakan sebuah studi dengan kajian khusus terhadap kegiatan pengembangan ASN dengan memanfaatkan teknologi digital sebagai perwujudan upaya kesiapan dalam menerapkan reformasi birokrasi melalui transformasi pelayanan publik. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah model inovasi, apa saja kegiatan, dan faktor pendukung serta penghambat dalam kegiatan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) berbasis digital pada Pemerintah Daerah Kabupaten Buru berdasarkan teori pelayanan publik berbasis elektronik (E-Service)?. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah dengan memberikan penjelasan dan menganalisis rumusan masalah tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data yang dilakukan secara tematik, dimulai dari menarasikan data primer yang didapatkan di lapangan dan kemudian diuraikan dan disesuaikan dengan rumusan masalah dan fokus penelitian.

Hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa model inovasi bahwa pengembangan kapasitas ASN berbasis digital belum dilakukan secara optimal dan dipengaruhi oleh beberapa hal. Kegiatan pengembangan kapasitas ASN berbasis digital disesuaikan dengan arah kebijakan masing-masing OPD yang menerapkan pelayanan publik berbasis elektronik (*e-service*). Inovasi pengembangan kapasitas ASN disesuaikan dengan sistem layanan publik dengan memanfaatkan aplikasi/platform yang tersedia. Secara teknis, pengembangan kapasitas melibatkan kemampuan teknis, pengelolaan, dan integritas. Sedangkan dalam

kegiatan pengembangan pelayanan publik berbasis whatsapp hanya melibatkan pengembangan kemampuan teknis dan pengelolaan, sedangkan kemampuan integritas ASN tidak dikembangkan dengan baik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat yang mengeluh akan pelayanan publik yang diberikan khususnya pada pemanfaatan whatsapp. Dalam pemanfaatan aplikasi dalam *e-service*, pengembangan kapasitas ASN digital yang terjadi meliputi peningkatan kemampuan teknis dan integritas, sedangkan hanya LPSE yang melibatkan kemampuan manajerial. Berdasarkan fungsi *e-government* melalui *e-service*, layanan SIAK dan LPSE meliputi fungsi informasional, transaksional, dan operasional sedangkan fungsi kongregasional tidak dilibatkan karena partisipasi masyarakat belum dianggap penting. Beberapa faktor yang mendukung dan menghambat kelancaran pengembangan kapasitas ASN berbasis digital diantaranya adalah sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran.

ABSTRACT

Background of this research is the transformation of the digital technology using in all aspects, including in the aspect of governance (bureaucracy) quickly and massively. This has also led to demands to change the face of public service (transformation) which has been the "buah bibir" of the community, especially in the scope of local government so that it is more effective, efficient, and transparent. Unfortunately, the bureaucratic reform movement carried out is not supported by the quality of the capacity of government employees. Buru local government is one of regions that still lagging behind in terms of e-government development.

Thesis writing with the title "Capacity Building of Digital - Based State Civil Apparatus (ASN) in Buru Local Government" is a study with a special study on ASN development activities by utilizing digital technology as a manifestation of readiness efforts in implementing bureaucratic reform through the transformation of public services. The problem statements in this research : How is the innovation model, what are the activities, and the supporting and inhibiting factors in the digital-based state civil apparatus (ASN) capacity building activity at Buru local government based on the theory of electronic-based public service (eservice) ?. While the purpose of this study is to answer the problem formulation by providing an explanation and analyzing the problem formulation.

Method of the research is qualitative with descriptive approach. The techniques of data collection are interviews, observations, and document studies. The data analysis was carried out thematically, starting from narrating the primary data obtained in the field and then describing and adjusting it to the formulation of the problem and the focus of the research.

The findings in the field show that the innovation model that digital-based ASN capacity development has not been carried out optimally and is influenced by several things. Digital-based ASN capacity building activities are adjusted to the policy direction of each OPD that implements electronic-based public services (eservice). ASN capacity building innovation is adapted to the public service system by utilizing available applications/platforms.

Technically, capacity building involves technical capability, management and integrity. Meanwhile, WhatsAppbased public service development activities only involve developing technical and management capabilities, while ASN integrity capabilities are not developed properly. This can be seen from the many people who complain about the public services provided, especially on the use of WhatsApp. In utilizing applications in e-services, the development of digital ASN capacity that occurs includes increasing technical capabilities and integrity, while only LPSE involves managerial capabilities. Based on e-government functions through e-services, SIAK and LPSE services include informational, transactional, and operational functions, while congregational functions are not involved because community participation has not been considered important. Several factors that support and hinder the smooth development of digital-based ASN capacity include human resources, infrastructure, and budget.

10. Nama : Sophan Mahdiyana Tahun masuk : 2017
Jenjang / Program : Doktor (S-3) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Padjajaran
Judul disertasi : Pengaruh Reaksi Penilaian Kinerja terhadap Kinerja Pegawai yang Dimediasi oleh Variabel Keterikatan Pegawai” (Studi tentang E-kinerja pada Pemerintah Kabupaten Ciamis)
Kata kunci : Reaksi Penilaian Kinerja, Keterikatan Pegawai, Kinerja Pegawai
Keywords : *Performance Appraisal Reaction, Employee Engagement, Employee Performance*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya fenomena teoritis yaitu variabel keterikatan pegawai yang berpotensi sebagai variabel mediasi pada hubungan antara reaksi penilaian kinerja dengan kinerja pegawai; dan adanya fenomena empiris yaitu reaksi pegawai atas penilaian kinerja yang belum positif, keterikatan pegawai PNS yang masih rendah dan kinerja PNS belum sesuai harapan. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh reaksi penilaian kinerja terhadap kinerja pegawai yang dimediasi oleh variabel keterikatan pegawai mengacu pada teori keadilan organisasi (French, 1964).

Penelitian menggunakan metode penelitian campuran sekuensial eksplanatori yaitu metode kuantitatif diikuti dengan metode kualitatif. Metode kuantitatif dengan teknik survey melalui angket. Sampel diambil secara probability sampling secara sistematis sebanyak 96 responden dari populasi sebanyak 2.808 orang. Pengukuran menggunakan Keeping dan Levy (2000) untuk reaksi penilaian kinerja, Rich et. al.(2010) untuk keterikatan pegawai, dan Gomes (2003) untuk kinerja pegawai. Skala pengukuran menggunakan Likert dengan 5 poin skala. Data diolah dengan SEM-PLS dan dianalisis melalui analisis statistik deskriptif dan inferensial. Metode kualitatif melalui wawancara terhadap 8 informan meliputi 1 Kasubid Penilaian Kinerja Aparatur, 1 orang pengelola kepegawaian OPD, 1 orang pejabat penilai dan 5 orang pegawai, serta observasi melalui pengamatan langsung di OPD Pemerintah Kabupaten Ciamis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel berada pada kategori tinggi, reaksi penilaian kinerja mendapatkan nilai 3,71, keterikatan pegawai mendapatkan nilai 3,63 dan kinerja pegawai mendapatkan nilai 3,51. Pengujian outer model menyatakan bahwa seluruh dimensi mencerminkan variabel dan seluruh indikator mencerminkan dimensi. Model hubungan antar variabel yang diajukan pada penelitian ini sudah sangat baik (GoF = 0.736), large predictive relevance ($Q^2 = 0.793$), dan variabilitas moderate ($R^2 > 0.50$). Hasil penelitian kualitatif melalui observasi dan wawancara mendukung dan memperdalam hasil penelitian kuantitatif.

Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa reaksi penilaian kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan pegawai, keterikatan pegawai berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kinerja pegawai, reaksi penilaian kinerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai sehingga memunculkan temuan atau konsep baru bahwa reaksi penilaian kinerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai dimediasi oleh keterikatan pegawai. Saran penelitian terdiri atas saran akademik yaitu penelitian pada lokus yang berbeda, penelitian tentang variabel lain yang terkait, dan penelitian untuk mengoptimalkan dimensi dan indikator yang harus ditingkatkan, serta saran praktis yaitu merencanakan dan melaksanakan penilaian kinerja yang dipersepsikan baik oleh pegawai, menetapkan standar penilaian yang jelas, penilaian kinerja yang mendorong inisiatif pegawai, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi penilaian kinerja.

ABSTRACT

The background of this research based on a theoretical phenomena, that is the employee engagement variable as a potential mediating variable on the relationship between performance appraisal reactions and employee performance; and based on empirical phenomena, that is employee reactions to performance appraisals that have not been positive, civil servant employee engagement is still low and civil servant performance has not met expectations. This study aims to examine the effect of performance appraisal reactions on employee performance mediated by employee engagement variables referring to organizational justice theory (French, 1964).

The research uses a mixed method sequential explanatory that is quantitative methods followed by qualitative methods. Quantitative methods use survey techniques through questionnaires. Samples are taken by systematic probability sampling as many as 96 respondents from a 2,808 population. Measurements using Keeping and Levy (2000) for performance appraisal reactions, Rich et. al., (2010) for employee engagement, and Gomes (2003) for employee performance. The measurement scale uses a Likert with a 5-point scale. The data were processed by SEM-PLS and analyzed through descriptive and inferential statistical analysis. Qualitative methods through interviews with 8 informants include 1 Head of Apparatus Performance Appraisal, 1 OPD personnel manager, 1 appraiser official and 5 employees, as well as observation through direct observation at the Ciamis Regency Government OPD.

Results showed that all variables were in the high category, the performance appraisal reaction got a value of 3.71, employee engagement got a value of 3.63 and employee performance got a value of 3.51. The outer model test states that all dimensions reflect variables and all indicators reflect dimensions. The relationship model between variables proposed in this study is very good (GoF = 0.736), large predictive relevance (Q2 = 0.793), and moderate variability (R2 > 0.50). The results of qualitative research through observation and interviews support and deepen the results of quantitative research.

This study concludes that performance appraisal reactions have a positive and significant effect on employee engagement, employee engagement has a positive and significant effect on employee performance, performance appraisal reactions have a positive and significant effect on employee performance so that new findings or concepts emerge that performance

appraisal reactions affect employee performance. mediated by employee engagement. Research suggestions consist of academic suggestions, that is research at different loci, research on other related variables, and research to optimize dimensions and indicators that must be improved, as well as practical advice, that is planning and implementing performance appraisals that are perceived as good by employees, setting clear and appropriate assessment standards., performance appraisals that encourage employee initiative, and training to improve performance appraisal competencies.

KEPEMIMPINAN DAN KEPALA DAERAH

1. Nama : Yudistira Pratama Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Kapasitas Kepemimpinan Kepala Daerah Dalam Pengembangan Inovasi Sektor Publik (Studi Kasus Inovasi Aspal Karet Berbasis Lateks Pravulkanisasi di Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019-2020)
Kata kunci : Kepemimpinan, Kepala daerah, Desentralisasi, Inovasi sektor publik
Keywords : *Leadership; Regional Head; Decentralization; Public Sector Innovation*
-

ABSTRAK

Inovasi pada organisasi sektor publik yang bertugas mengurus segala kebutuhan, kepentingan dan hajat hidup orang banyak pada seluruh bidang kehidupan bermasyarakat menjadi sebuah keharusan karena permasalahan yang dihadapi oleh publik (masyarakat) semakin kompleks dan beragam. Sayangnya inovasi pada sektor publik masih tergolong minim dikarenakan tidak adanya kompetitor dan segala kegiatan operasionalnya dibiayai oleh APBN/APBD sehingga membuat iklim kerja dan inovasi pada sektor publik kurang kompetitif dan cenderung bersifat business as usual. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor terpenting dalam merealisasikan sebuah inovasi, terlebih pada era desentralisasi kepala daerah sebagai top leader diberikan kewenangan yang sangat luas sehingga dapat memanfaatkan semua sumber daya dan instrumen yang ada untuk mengakselerasi inovasi berbasiskan pada kebutuhan dan potensi lokal. Inovasi aspal karet berbasis lateks pravulkanisasi di Kabupaten Muba merupakan salah satu bentuk inovasi yang berhasil menjadi solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh petani karet di Kabupaten Muba. Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa realisasi inovasi ini tidak terlepas dari peran penting kepemimpinan kepala daerah sebagai top leader dengan memanfaatkan segala sumber daya dan instrumen yang ada.

ABSTRACT

Innovation in public sector organizations tasked with taking care of all the needs, interests, and livelihoods of many people in all sectors of social life is a must because the issues faced by the public (society) are increasingly complex and diverse. Unfortunately, innovation in the public sector is still relatively minimal, due to the absence of competitors, and all operational activities are financed by the State Budget/Regional Budget, thus making the work climate and innovation in the public sector less competitive and tend to be 'business as usual' in nature. Leadership is one of the most important factors in realizing an innovation, especially in the decentralization era, regional heads as top leaders are given very broad authority, which enables them to utilize all available resources and instruments to accelerate innovation based on local needs and potential. The innovation of pre-

vulcanized latex-based rubber asphalt in Muba Regency is one form of innovation that has succeeded in becoming a solution to the problems faced by rubber farmers in Muba Regency. The results of this qualitative study indicate that the realization of this innovation was inseparable from the important role of the regional head as the top leader by utilizing all available resources and instruments.

2. Nama : Niswah Wara Pratidina Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Pengaruh Beban Kerja dan Keterlibatan Individu terhadap Kinerja Anggota Polri Satker Staf Sumber Daya Manusia (SSDM) Dengan *Servant Leadership* Sebagai Variabel Moderating
Kata kunci : Kinerja individu, Bebas kerja, Keterlibatan individu, Kepemimpinan yang melayani
Keywords :
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban kerja dan keterlibatan individu terhadap kinerja individu dengan kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) sebagai variabel moderasi. Secara spesifik, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh antar variabel tersebut pada organisasi kemiliteran yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dimana jumlah sampel yang digunakan adalah 100 responden yang dipilih dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi linier berganda dan regresi moderasi dengan bantuan *software* SPSS 26. Berdasarkan analisis kuantitatif yang dilakukan, didapat hasil bahwa: a) beban kerja individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu ($\beta=0,318$, $\text{sig}=0,000<0,05$), b) keterlibatan individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja individu ($\beta=0,605$, $\text{sig}=0,000<0,05$) dan c) kepemimpinan yang melayani (*servant leadership*) bukanlah variabel moderasi yang dapat memberikan pengaruh (memperlemah/memperkuat) hubungan beban kerja dan keterlibatan individu terhadap kinerja individu (nilai signifikan interaksi antara kepemimpinan yang melayani dengan beban kerja individu= $0,105>0,005$ dan nilai signifikan interaksi antara kepemimpinan yang melayani dengan keterlibatan individu= $0,969>0,005$).

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of individual workload and employee engagement on individual performance with servant leadership as moderating variable. Specifically, this research was conducted to see the effect of these variables in the military organization, namely Indonesian National Police. This study uses a quantitative approach using survey method. The number of samples used is amounted to 100 respondents who were selected by purposive sampling. The analytical method used to test is Multiple Linear Regression and Moderation Regression with SPSS 26 software. Based on the quantitative analysis, the results show that: a) individual workload has a significant positive effect on individual performance ($\beta=0,318$, $\text{sig}=0,000<0,05$), b) employee engagement has a significant positive effect on individual performance ($\beta=0,605$, $\text{sig}=0,000<0,05$) and c) servant leadership is not a moderating variable that can influence (weaken/strengthen) the relationship between individual workload and employee engagement (significant value of the interaction between servant leadership and individual workload= $0,105>0,005$ and significant value of the interaction between servant leadership and employee engagement= $0,969>0,005$).

3. Nama : Vetaroy Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Strategi Kepemimpinan Dan Peningkatan Kinerja: Studi Kasus
Organisasi Sektor Publik (BKKBN RI)
Kata kunci : Strategi kepemimpinan, Peningkatan kinerja
Keywords : *Leadership Strategy, Performance Improvement*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji jenis strategi kepemimpinan yang tepat dan sesuai untuk meningkatkan kinerja di organisasi sektor publik. Jenis strategi kepemimpinan yang diteliti adalah [1] goal-setting and performance review, [2] effective communication, [3] training, coaching, and counseling, dan [4] good working environment and teamwork. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner pada 203 orang pejabat eselon II, III, dan Koordinator Bidang di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia (BKKBN RI) yang berada di BKKBN Pusat dan Perwakilan BKKBN di Provinsi, diuji dengan analisis faktor dan structural equation model – partial least square (SEM PLS) untuk menjawab lima pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang membentuk strategi kepemimpinan yakni [1] goal-setting and performance review, [2] effective communication, [3] training, coaching, and counseling, dan [4] good working environment and teamwork. Keempat faktor strategi kepemimpinan tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja organisasi sektor publik.

ABSTRACT

This study aims to examine the right type of leadership strategy to improve performance in public sector organizations. The types of leadership strategies studied are [1] goal-setting and performance review, [2] effective communication, [3] training, coaching, and counseling, and [4] good working environment and teamwork. This study uses a survey method by distributing questionnaires to 203 echelon II, III, and Field Coordinators at representatives of the Central and Provincial Population and Family Planning Board of the Republic of Indonesia (BKKBN RI). The data were tested by factor analysis and structural equation model – partial least square (SEM PLS) to answer five research questions. The results show that there are four factors that shape the leadership strategy, namely [1] goalsetting and performance review, [2] effective communication, [3] training, coaching, and counseling, and [4] good working environment and teamwork. The four factors of leadership strategy have a positive and significant impact on the performance of public sector organizations.

4. Nama : Fredo Tiwery Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Rendahnya Ambisi Politik Masyarakat Dalam Pencalonan Jabatan Politik (Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Margoluwih Kecamatan Seyegan Kabupaten Sleman Tahun 2020)
Kata kunci : Jabatan politik, Ambisi politik, Kepala desa, Pilkades
Keywords : *Political Position, Political Ambition, Village Head, Pilkades*
-

ABSTRAK

Pilkades dianggap hal yang strategis karena dapat mencegah, mengontrol lahirnya pemimpin yang otoriter, oligarki serta kepemimpinan dinasti. Pilkades juga sebagai cerminan demokrasi di tingkat akar rumput, pemerintah terus membenahi dan meningkatkan kualitas kebijakan dalam pemilihan kepala desa. Namun tampaknya beberapa fenomena di lapangan masih menunjukkan minimnya ambisi politik masyarakat untuk mencalonkan diri dalam kontestasi pemilihan kepala desa dan semakin meningkatnya model majunya pasangan suami istri maupun kekerabatan, seperti majunya calon suami istri pada Pilkades desa Margoluwih Tahun 2020 sehingga perlu sekiranya untuk mengkaji mengapa dan faktor apa saja yang berpengaruh pada rendahnya ambisi politik masyarakat desa khususnya desa Margoluwih.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yaitu dengan mendalami ambisi politik kandidat yang layak dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan yang mendalam dan spesifik. Berdasarkan hasil pengujian di lapangan dengan menggunakan teori ambisi politik oleh Lawless (2012) penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya ambisi politik masyarakat dalam jabatan politik dipengaruhi karena sebagian besar masyarakat mengagap keputusan untuk mencalonkan diri untuk jabatan politik akan memerlukan biaya yang tak hanya materil saja namun juga non materil agar dapat memperoleh dukungan masyarakat dan tidak jarang berdampak negatif terhadap kerukunan dan budaya yang ada di masyarakat setempat. Dan juga pertahana didukung oleh banyak pihak termasuk kandidat itu sendiri, hal ini wajar karena pertahana memiliki kepercayaan diri dengan menunjukkan kinerjanya yang baik selama menjabat. dan Faktor yang mempengaruhi rendahnya ambisi politik bisa berpengaruh negatif ataupun positif dalam ambisi politik nascent ambition maupun expressive ambition tergantung respon yang di tunjukan terhadap faktor status minoritas, Dinamika Keluarga, Pengalaman Profesional, terakhir Perilaku Politik dan Perekrutan.

ABSTRACT

Pilkades is considered a strategic matter because it can prevent and control the birth of authoritarian, oligarchic and dynastic leaders. Pilkades is also a reflection of democracy at the grassroots level, the government continues to fix and improve the quality of policies in

village head elections. However, it seems that some phenomena in the field still show the lack of community political ambition to run in the village head election contestation and the increasing model of the advancement of married couples and kinship, such as the advancement of husband and wife candidates in the Margoluwih Village Pilkades in 2020 so it is necessary to examine why and factors anything that affects the low political ambition of the village community, especially the village of Margoluwih.

This research uses a qualitative method with a case study approach, namely by exploring the political ambitions of worthy candidates with the aim of gaining in-depth and specific knowledge. Based on the results of field testing using the theory of political ambition by Lawless (2012) this study shows that the low political ambition of the community in political positions is influenced because most people perceive the decision to run for political office will require costs that are not only material but also non-material. in order to gain community support and not infrequently have a negative impact on harmony and culture in the local community. And also the incumbents is supported by many parties including the candidate himself, this is reasonable because the incumbents has selfconfidence by showing good performance during office. and Factors that affect low political ambition can have a negative or positive effect on political ambition, nascent ambition and expressive ambition, depending on the response shown to minority status factors, Family Dynamics, Professional Experience, lastly Political Behavior and Recruitment.

5. Nama : Siti Fatmawati Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Peran Kepemimpinan Dalam Sinergitas Antar SKPD Pada Program Percepatan Peningkatan Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa di Provinsi Kalimantan Barat
Kata kunci : Kepemimpinan, Sinergitas, Transformasional, Desa Mandiri
Keywords : *Leadership, Synergy, Transformational, Independent Village*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat mempengaruhi sinergitas antar SKPD dalam program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Kalimantan Barat yang menggunakan pendekatan gaya kepemimpinan transformasional.

Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Barat karna dalam dua tahun terakhir (2019-2020) dapat meningkatkan jumlah status desa mandiri sesuai target RPJMD melebihi provinsi lain di Pulau Kalimantan. Populasi penelitian adalah Tim Satuan Tugas Indeks Desa Membangun dan Tim Sinergi Program dan Kegiatan yang fokus melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Sedangkan fokus utamanya adalah kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat yaitu Bapak Sutarmidji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, studi dokumentasi dan wawancara..

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kepemimpinan Gubernur Kalimantan Barat cocok dalam menerapkan gaya kepemimpinan transformasional dengan prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Rees (2001) yaitu kepemimpinan dengan peran sebagai inovator, motivator, fasilitator dan mobilisator. Melalui peran kepemimpinan transformasional yang diterapkan oleh Gubernur Kalimantan Barat, dapat mendorong sinergitas antar SKPD dalam melaksanakan program percepatan peningkatan status kemajuan dan kemandirian desa. Yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah desa mandiri di Provinsi Kalimantan Barat dari 1 desa di tahun 2018 menjadi 214 desa ditahun 2020 dengan jumlah keseluruhan desa sebanyak 2.031 desa.

ABSTRACT

This study aims to determine how the leadership role of the Governor of West Kalimantan affects the synergy between SKPDs in the program to accelerate the improvement of the status of progress and village independence in West Kalimantan Province using a transformational leadership style approach.

In this study, using a qualitative method with a case study approach. The research was carried out in West Kalimantan Province because in the last two years (2019-2020) it could increase the number of independent village status according to the RPJMD target over other provinces on the island of Kalimantan. The study population was the Village Building Index Task Force Team and the Program and Activity Synergy Team which focused on implementing accelerated programs to improve the status of progress and village independence. Meanwhile, the main focus is the leadership of the Governor of West Kalimantan, Mr. Sutarmidji. Data collection was carried out through observation, documentation study and interviews.

The results of the study reveal that the leadership of the Governor of West Kalimantan is suitable in applying a transformational leadership style with the principles put forward by Rees (2001), namely leadership with the role of an innovator, motivator, facilitator and mobilizer. Through the transformational leadership role implemented by the Governor of West Kalimantan, it can encourage synergy between SKPDs in implementing programs for accelerating the improvement of status of progress and village independence. As evidenced by the increasing number of independent villages in West Kalimantan Province from 1 village in 2018 to 214 villages in 2020 with a total of 2,031 villages.

6. Nama : Suci Prasita Dewi Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Persepsi Kepemimpinan Inovatif Pejabat Eselon Lulusan IPDN Di Lingkungan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
Kata kunci : Kepemimpinan inovatif, Birokrasi, Pejabat eselon
Keywords : *Innovative Leadership, Bureaucracy, Echelon Officer*
-

ABSTRAK

Kepemimpinan merupakan inti dari menciptakan budaya inovatif dalam suatu organisasi, inovasi sendiri diperlukan oleh organisasi untuk dapat bertahan dalam masa ini, kepemimpinan inovatif berperan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kinerja inovatif pada organisasi, tidak terkecuali pada organisasi pemerintahan, dahulu kepemimpinan militer dan kepemimpinan birokrat senior dipilih sebagai pilihan utama, namun belakangan ditemukan bahwa latar belakang kepemimpinan yang lebih variatif membawa tingkat inovasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan model kepemimpinan militer. IPDN sebagai lembaga pendidikan kedinasan yang menganut sistem semi militerisme menghasilkan output birokrat ASN yang mengabdikan dan menduduki berbagai posisi birokrasi baik di pemerintah daerah maupun pemerintah pusat masih sering dianggap rigid, kaku dan kurang inovatif dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini berfokus pada analisis kepemimpinan inovatif pada pejabat eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan metode deskriptif, pengambilan sampel menggunakan metode Hair (2018) dengan estimasi ukuran sampel minimum adalah 5-10 observasi untuk setiap parameter yang diuji, jumlah responden adalah 140 orang dimana responden adalah subordinat/bawahan dari para pejabat eselon yang dinilai. Pengumpulan data menggunakan kuisisioner yang disusun dari *literature review* dan disebarluaskan secara online menggunakan *Google Form* karena situasi dan kondisi pandemi. Data diolah menggunakan teknik deskriptif yang kemudian diujikan menggunakan ANOVA dan Uji LSD untuk mengetahui tingkat uji beda signifikansi hasil yang didapatkan oleh tiap tingkat eselon.

Hasil penelitian dan temuan yang didapatkan dapat disimpulkan bahwa tingkat kepemimpinan inovatif pada pejabat eselon lulusan IPDN di lingkungan Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta mendapatkan nilai sangat tinggi, namun terdapat perbedaan antara tingkat kepemimpinan inovatif masing-masing eselon, dimana signifikansi ditemukan antara kepemimpinan eselon II dan eselon IV juga antara eselon III dengan Eselon IV, setelah diperkuat dengan wawancara, didapati bahwa tingkat kepemimpinan inovatif salah satunya dipengaruhi oleh kewenangan yang melekat pada masing-masing eselon.

ABSTRACT

Leadership is the core of creating an innovative culture in an organization, innovation itself is needed by organizations to survive by this era, innovative leadership plays a role in creating an environment that supports innovative performance in organizations, including

government organizations, formerly military leadership and senior bureaucratic leadership were chosen as the main choice, but recently it was found that more varied leadership backgrounds brought higher levels of innovation compared to military leadership models. IPDN as an official education institution that adheres to the semimilitarism system produces the output of ASN bureaucrats who serve and occupy various bureaucratic positions both in the regional and central government are still often considered as if rigid and less innovative in carrying out their duties.

This study focuses on the analysis of innovative leadership among echelon officials in the Yogyakarta Provincial Government, using quantitative approaches and descriptive methods, taking samples using the Hair method (2018) with an estimated minimum sample size of 5-10 observations for each parameter tested, the number of respondents are 140 people where the respondent is the subordinate of the echelon officials who are assessed. Data collection used questionnaires compiled from literature reviews and distributed online using Google Form due to pandemic situations and conditions. The data were processed using descriptive techniques which were then tested using ANOVA and LSD test to determine the level of significance difference test of the results obtained by each echelon level.

The results of the research and findings obtained can be concluded that the level of innovative leadership in echelon officials from IPDN graduates in the Provincial Government of DI Yogyakarta gets very high scores, but there is a difference between the level of innovative leadership of each echelon, where significance is found between echelon II and echelon leadership. IV is also between echelon III and Echelon IV, after being strengthened by interviews, it was found that the level of innovative leadership was influenced by the inherent authority of each echelon.

DEMOKRASI

1. Nama : Shanty Wisudarini Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Judul tesis : Pemekaran Daerah, APBD dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Pemekaran Daerah Tahun 2003 dan 2008)
Kata kunci : APBD per kapita, Daerah otonom baru, Kesejahteraan masyarakat dan pemekaran daerah
Keywords : *APBD per capita; new autonomous regions; welfare of the community and regional proliferation*
-

ABSTRAK

Sejak otonomi daerah dilaksanakan tahun 2001, banyak terbentuk Daerah Otonom Baru (DOB) sebagai hasil dari pemekaran daerah. Salah satu alasan suatu daerah dimekarkan adalah DOB hasil pemekaran dapat mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-nya) sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara pemekaran daerah, peningkatan APBD dan kesejahteraan masyarakat di daerah hasil pemekaran. Dengan menggunakan *panel data regression model* dan unit analisis DOB yang terbentuk tahun 2003 dan 2008, penelitian ini menunjukkan bahwa pemekaran memang membuat APBD per kapita DOB meningkat cukup besar, terutama setelah lima tahun pemekaran, baik pemekaran daerah yang terjadi pada tahun 2003 maupun tahun 2008. Namun, peningkatan APBD per kapita di DOB hasil pemekaran daerah tahun 2003 belum berhasil mengangkat kesejahteraan masyarakat di DOB. Sementara untuk pemekaran daerah tahun 2008, hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan APBD per kapita di DOB berasosiasi positif dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakat di DOB yang ada di daerah tertinggal, namun tidak demikian untuk daerah yang tidak tertinggal. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan bahwa jika persyaratan-persyaratannya dipenuhi, maka usulan pemekaran daerah untuk daerah tertinggal sebaiknya disetujui. Karena dengan dimekarkan, bukan hanya APBD per kapitanya yang meningkat, tetapi juga kesejahteraan masyarakatnya juga meningkat.

ABSTRACT

Since regional autonomy was implemented in 2001, many New Autonomous Regions (DOB) have been formed as a result of regional proliferation. One of the reasons for a region to be proliferated is that the new autonomous regions can manage its own Regional Income and Expenditure Budget (APBD). This study aims to analyze the relationship between regional proliferation, the increase in the Regional Income and Expenditure Budget (APBD) and the welfare of the community in the area resulting from the proliferation. By using panel data

regression models and analysis units for new autonomous regions that were formed in 2003 and 2008, this study shows that proliferation has indeed made the APBD per capita of new autonomous regions increase considerably, especially after five years of proliferation, both regional proliferation that occurred in 2003 and 2008. However, the increase in the APBD per capita in the new autonomous regions from regional proliferation in 2003 has not succeeded in raising the welfare of the community in the new autonomous regions. Meanwhile, for regional proliferation in 2008, the results of the study show that the increase in APBD per capita in new autonomous regions has a positive association with the increase in the welfare of the community new autonomous regions in underdeveloped regions, but not so for regions that are not underdeveloped. Therefore, this study suggests that if the requirements are met, then the proposed for regional proliferation in underdeveloped regions better be approved. Because with the regional proliferation, not only the APBD per capita increased, but also the welfare of the community also increased.

2. Nama : Ida Austriana Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Judul tesis : Dampak Pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 Terhadap Banyaknya Kasus COVID-19 di Indonesia
Kata kunci : Pilkada 2020, Covid-19, *Difference in Difference*
Keywords : *The 2020 Regional Election; Covid-19; Difference in Difference*
-

ABSTRAK

Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2020 yang dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19 sangat rentan terhadap penambahan kasus terkonfirmasi Covid-19, karena pada setiap tahapan Pilkada selalu berpotensi menimbulkan interaksi banyak orang dalam jarak dekat dan kerumunan massa. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak pelaksanaan Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) tahun 2020 terhadap banyaknya jumlah kasus positif Covid-19. Studi ini menggunakan pendekatan *Difference in Difference* untuk menganalisis data rata-rata harian kasus terkonfirmasi Covid-19 dari 257 kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada maupun yang tidak menyelenggarakan Pilkada pada periode Juni hingga Desember 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wilayah perkotaan yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020 mengalami penambahan rata-rata harian kasus terkonfirmasi Covid-19 yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan (kabupaten) yang menyelenggarakan Pilkada, maupun kabupaten/kota yang tidak menyelenggarakan Pilkada.

ABSTRACT

The 2020 Regional Elections (Pilkada) held amid the Covid-19 pandemic are very vulnerable to the addition of confirmed Covid-19 cases, because at every stage of the Pilkada there is always the potential to cause interaction of many people close and crowds of crowds. This study aims to analyze the impact of implementing the 2020 Regional Elections (Pilkada) on the large number of positive cases of Covid-19. This study uses the Difference in Difference approach to analyze the daily average data for Covid-19 confirmed cases from 257 districts/cities that held Pilkada and those that did not hold Pilkada in June to December 2020. The results showed that urban areas that held Pilkada in 2020 experienced an increase in the daily average of confirmed Covid19 cases which was higher than in rural areas (regencies) that held Pilkada and districts/cities that did not hold Pilkada.

3. Nama : Irfan Kurniawan Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Indonesia
Judul tesis : *Should I Bribe? Re-Examining The Greasing Hypothesis in Democratic Post-Soeharto Indonesia*
Kata kunci : Korupsi, Penyuapan, Kinerja perusahaan, Demokrasi, Desentralisasi
Keywords : *Corruption, Bribery, Firm Performace, Democracy, Decentralization*
-

ABSTRAK

Di era Orde Baru korupsi terbukti berperan sebagai pelumas di Indonesia sebagai salah satu negara terkorup di dunia. Indonesia mengalami desentralisasi dan demokratisasi masif (big-bang) paska kejatuhan orde baru. Meskipun secara umum dinilai positif, episode ini membawa dampak ikutan: regulasi yang koresif. Studi ini menggunakan data firm-level berskala besar yakni Suvey Industri Besar Sedang (IBS) dikombinasikan dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di level provinsi selama periode 2009-2015. Studi menemukan korupsi menghambat pertumbuhan output perusahaan manufaktur Indonesia sebesar 9.8% dan pertumbuhan produktivitas sebesar 12.6%. Hasil ini menunjukkan efek pelumas korupsi kini telah berkurang. Lebih jauh, studi juga menemukan bahwa perusahaan yang berlokasi di provinsi dengan kualitas demokrasi lebih baik cenderung mengalami efek buruk korupsi yang lebih ringan. Dengan kata lain, dua perusahaan yang membayar nilai suap yang sama dapat memperoleh efek yang berbeda tergantung di mana mereka berlokasi.

ABSTRACT

During the Soeharto Era corruption was considered to grease the wheels of growth in Indonesia, a country once considered to be the most corrupt country in the world. Indonesia experiences big-bang decentralization and democratization after Soeharto Era abruptly ended. While vastly celebrated, those episodes have their unintended consequence: coercive regulation. This study employs extensive firm-level Industri Besar Sedang (IBS) data combined with Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) at provincial level spanning from 2009-2015 and found that bribery hampered Indonesian firm output and productivity growth by 9.8% and 12.6%, respectively. This alarming result suggests that Indonesia is in dire needs to step up the fight against corruption and that the greasing effect has now diminished. Interestingly, this study also found that firms located in a province with a better democracy index may experience less damaging effects of corruption. In other words, two firms paying the same value of bribe may obtain different effects depending on where they are located.

4. Nama : Dina Ratih Widuri Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Demokrasi, Desentralisasi, dan Kesejahteraan Warga Di 34 Negara Eropa
Kata kunci : Demokrasi, Desentralisasi, Kesejahteraan, Eropa
Keywords : *Democracy, Decentralization, Welfare, Europe*
-

ABSTRAK

Demokrasi dan desentralisasi merupakan dua konsep penting dalam kajian administrasi publik selama dua dekade terakhir. Banyak ilmuwan administrasi publik maupun politisi menyakini bahwa dua konsep ini sebagai pendekatan terbaik untuk mewujudkan pemerintah daerah yang efektif dan efisien sekaligus mendekatkan pengambilan keputusan kepada warga. Asumsi teoritis yang sering dikemukakan adalah “bringing policy makers closer to the people” atau mendekatkan proses pengambilan keputusan pada warga lokal sehingga kebijakan atau program lebih mencerminkan keinginan dan kebutuhan warga setempat. Hasil akhir yang diharapkan tentu saja adalah kesejahteraan warga.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis apakah demokrasi dan desentralisasi yang dilaksanakan di 34 negara Eropa berhubungan dengan kesejahteraan warga. Berbeda dengan indikator kesejahteraan yang banyak ditelaah peneliti sebelumnya yang sebagian besar menggunakan indikator objektif, penelitian ini memfokuskan pada indikator subjektif kesejahteraan warga yaitu kebahagiaan dan kepuasan hidup warga. Secara khusus, penelitian ini ingin menjawab tiga pertanyaan berikut: Bagaimanakah gambaran kesejahteraan warga Eropa serta kondisi demokrasi dan desentralisasi di negara-negara Eropa?; Apakah warga Eropa yang tinggal di negara yang lebih demokratis lebih sejahtera hidupnya daripada mereka yang tinggal di negara yang kurang demokratis?; Apakah warga Eropa yang tinggal di negara yang lebih terdesentralisir lebih sejahtera hidupnya daripada mereka yang tinggal di negara yang kurang terdesentralisir?

Untuk menjawab tiga pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan data European Social Survey (ESS) tahun 2002 sampai dengan 2018 dimana melibatkan 34 negara di Eropa. Selain itu juga digunakan sumber-sumber data sekunder lainnya yang berasal dari laporan statistik CPDS, V-Dem, EIU, RAI, GFS maupun WWBI yang berisi tentang berbagai indikator desentralisasi dan demokrasi selama kurun waktu dua dekade terakhir di negaranegara Eropa. Penelitian ini menggunakan regresi multi-level untuk menguji hubungan tiap-tiap variabel desentralisasi dan demokrasi pada tingkat negara terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan warga.

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesenjangan kesejahteraan di Eropa. Dimana tingkat kesejahteraan paling tinggi ada di negara-negara Eropa Barat (nilai >7, skala 1-10).

Sedangkan tingkat kesejahteraan paling rendah ada di negara-negara Eropa Timur (nilai >6, skala 1-10). Begitu pula dengan demokrasi dan desentralisasi. Derajat demokrasi dan desentralisasi negara-negara di Eropa Barat paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya, khususnya Eropa Timur. Namun pada desentralisasi fiskal; indikator-indikator seperti pengeluaran daerah, kesenjangan vertikal pemerintah daerah, dan transfer tanpa syarat pemerintah daerah; memberikan nilai paling rendah dibandingkan dengan negara-negara Eropa lainnya. Demokrasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan (kepuasan hidup dan kebahagiaan) warga di Eropa. Adapun indikator demokrasi yang mempengaruhi kesejahteraan warga di Eropa yaitu: partisipasi politik, kebebasan sipil, adanya pemilihan, kesetaraan, usia demokrasi, dan indeks demokrasi. Begitu pula dengan desentralisasi, secara garis besar desentralisasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan (kepuasan hidup dan kebahagiaan) warga di Eropa.

ABSTRACT

Democracy and decentralization are two important concepts in the study of public administration during the last two decades. Many public administration scientists and politicians believe that these two concepts are the best approaches for realizing effective and efficient local government as well as bringing decisionmaking closer to citizens. The theoretical assumption that is often put forward is "bringing policy makers closer to the people" or bringing the decision-making process closer to local residents so that policies or programs better reflect the wants and needs of local residents. The final outcome that is expected of course is the welfare of the citizens.

In this study, the authors are interested in identifying and analyzing whether democracy and decentralization implemented in 34 European countries are related to the welfare of citizens. Unlike the welfare indicators that many previous researchers have reviewed, most of which use objective indicators, this study focuses on subjective indicators of citizen welfare, namely the happiness and life satisfaction of citizens. In particular, this research wants to answer the following three questions: What is the picture of the welfare of European citizens and the conditions of democracy and decentralization in European countries?; Are European citizens who live in more democratic countries more prosperous than those who live in less democratic countries?; Are European citizens who live in more decentralized countries more prosperous than those who live in less decentralized countries?

To answer these three research questions, this study uses European Social Survey (ESS) data from 2002 to 2018 which involves 34 countries in Europe. Apart from that, other secondary data sources were also used, which came from statistical reports from CPDS, V-Dem, EIU, RAI, GFS and WWBI which contained various indicators of decentralization and democracy during the last two decades in European countries. This study uses multi-level regression to examine the relationship of each variable of decentralization and democracy at the state level to the happiness and welfare of citizens.

The results of this study indicate a welfare gap in Europe. Where the highest level of welfare is in Western European countries (value > 7, scale 1-10). Meanwhile, the lowest level of welfare is in Eastern European countries (score > 6, scale 1-10). Likewise with democracy and decentralization. The degree of democracy and decentralization in Western European countries was the highest compared to other European countries, especially Eastern Europe. But on fiscal decentralization; indicators such as sub-national spending, regional government vertical gaps, and sub-national government unconditional transfers; give the lowest score compared to other European countries. Democracy has a positive effect on the welfare (life satisfaction and happiness) of citizens in Europe. The indicators of democracy that affect the welfare of citizens in Europe are: political participation, civil liberties, election, equality, age of democracy, and the democracy index. So as with decentralization, in general, decentralization has a positive effect on the welfare (life satisfaction and happiness) of citizens in Europe.

KOLABORASI

1. Nama : Armawadin Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Model Kolaborasi *Stakeholder* Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan
Kata kunci : Kolaborasi, stakeholder, alih fungsi, lahan sawah
Keywords : *Collaborative, stakeholders, the land use change, Rice Fields*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis mengenai model kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menggunakan analisis model Collaborative Governance dari Ansell dan Gash yang dikenal sebagai proses kolaborasi untuk menyelesaikan masalah kebijakan dan manajemen publik. Proses analisis dimulai dari Kondosi awal kolaborasi, kepemimpinan fasilitatif, desain kelembagaan dan proses kolaborasi terdiasi atas dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen dalam proses, berbagi pemahaman dan hasil sementara. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menjelaskan dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat dalam kolaborasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif yang berlokasi di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan situs penelitian pada penelitian ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura Kabupaten Bone, Lokasi Sawah Petani di Kecamatan Tanete Riattang dan Kecamatan Awangpone. Sumber data primer diperoleh peneliti dari informan meliputi Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Bone, Pegawai Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone serta petani di Kecamatan Tenete Riattang Barat dan Kecamatan Awangpone. Untuk data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, peraturan, MoU, arsip Kantor Pertanahan dan arsip dari Kantor Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, survey, observasi dan dokumentasi. Instrument penelitian yang digunakan adalah peneliti sendiri, pedoman wawancara, dan beberapa alat penunjang. Menganalisa data kualitatif dengan model interaktif terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, data penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa Kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah yang diawali dari kondisi awal kolaborasi yang terlaksana atas dasar kerjasama masa lalu serta ketergantungan daripada stakeholder sedangkan insentif dalam kolaborasi tidak memengaruhi proses kolaborasi. Kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi

lahan sawah di Kabupaten Bone telah memiliki desain kelembagaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga ada dasar dari proses kolaborasi yang dibangun, akan tetapi pada kolaborasi pembuatan peta lahan sawah dilindungi belum mengakomodir kepentingan swasta maupun masyarakat dengan kata lain kolaborasi hanya terjadi diantara stakeholder pemerintah. Kepemimpinan pada kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bone diarahkan pada kepemimpinan yang sifatnya memfasilitasi dan mengkoordinasikan segala bentuk pengendalian yang dilaksanakan. Proses kolaborasi pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bone dilaksanakan melalui dialog tatap muka, membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama serta hasil sementara yang diharapkan. Dalam proses kolaborasi ini terdapat beberapa hal yang belum dapat tercapai dengan baik, diantaranya kepercayaan masyarakat pada proses kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui pemberian insentif maupun perlindungan dan pemberdayaan petani masih sangat kurang karena pemberian insentif maupun perlindungan dan pemberdayaan dipahami hanya sebatas kewajiban pemerintah kepada petani. Selain kepercayaan, pemahaman stakeholder dalam kolaborasi pemberian insentif maupun perlindungan dan pemberdayaan petani sangat minim karena hanya didasarkan pada pemahaman tugas, fungsi dan tanggungjawab masing-masing stakeholder. Berbagai faktor yang mendukung kolaborasi stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Bone diantaranya adalah komitmen, saling ketergantungan, kesamaan tujuan serta kepercayaan diantara stakeholder. Sedangkan faktor-faktor penghambat dalam kolaborasi diantaranya adalah ketersediaan sumber daya dan masih kurangnya keterlibatan pihak swasta.

Diperlukan keterlibatan pihak swasta dan masyarakat pada proses kolaborasi pembuatan peta lahan sawah dilindungi sehingga peta yang dihasilkan secara komprehensif yang dapat mengakomodir semua kepentingan, baik kepentingan pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat. Membangun kepercayaan masyarakat terutama petani dalam pemberian insentif, perlindungan dan pemberdayaan petani melalui sosialisasi yang terus menerus, serta diperlukan pemahaman bersama dari stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui forum formal maupun informal. Selain itu perlu peningkatan pemberian apresiasi kepada stakeholder pengendalian alih fungsi lahan sawah melalui piagam penghargaan, pujian, maupun memberikan tanggungjawab lebih kepada stakeholder berprestasi dalam rangka meningkatkan keberhasilan kolaborasi.

ABSTRACT

The study aims to describe and analyze the collaborative model of stakeholders controlling the conversion of rice fields in Bone Regency, South Sulawesi Province. The author uses an analysis of the Collaborative Governance model from Ansell and Gash which is known as a collaborative process to solve public policy and management problems. The analysis process starts from the initial conditions of collaboration, facilitative leadership, institutional design and the collaboration process consists of face-to-face dialogue, building trust, commitment in the process, sharing understanding and interim results. In addition, this study also aims

to explain and analyze the factors that influence the collaboration of stakeholders in controlling the conversion of paddy fields, both supporting factors and inhibiting factors in collaboration.

The type of research used is a case study with a qualitative approach located in Bone Regency, South Sulawesi Province. While the research sites in this study are the Land Office of Bone Regency, Office of Food Crops, Horticulture, Bone Regency, Farmers' Rice Field Locations in Tanete Riattang District and Awangpone District. Primary data sources were obtained from informants, including employees of the Land Office of Bone Regency, employees of the Horticultural and Plantation Office of Food Crops, Bone Regency and farmers in Tanete Riattang Barat District and Awangpone District. For secondary data obtained from documents, regulations, MoUs, archives of the Office of Agriculture and archives from the Office of the Office of Food Crops, Horticulture and Plantations. Data collection techniques using interviews, surveys, observation and documentation. The research instrument used was the researcher himself, interview guide, and several supporting tools. Qualitative data analysis with interactive model consists of data collection, data condensation, data presentation and conclusions: drawing/verification.

Based on the research, it was found that the collaboration of stakeholders in controlling the conversion of paddy fields started from the initial conditions of collaboration which was carried out on the basis of past cooperation and dependence from stakeholders, while incentives in collaboration did not affect the collaboration process. Stakeholder collaboration controlling the conversion of paddy fields in Bone Regency already has an institutional design that is regulated in laws and regulations so that there is a basis for the collaboration process that is built, but the collaboration in making maps of protected paddy fields has not accommodated private and community interests in other words collaboration only occur among government stakeholders. Leadership in stakeholder collaboration controlling the conversion of paddy fields in Bone Regency is directed at leadership that facilitates and coordinates all forms of control carried out. The collaborative process of controlling the conversion of paddy fields in Bone Regency is carried out through face-to-face dialogue, building trust, commitment to the process, mutual understanding and expected interim results. In this collaboration process, there are several things that have not been achieved properly, including public trust in the collaboration process of stakeholders controlling the conversion of paddy fields through the provision of incentives as well as protection and empowerment of farmers is still lacking because the provision of incentives and protection and empowerment is understood only to be limited to the government's obligation to farmer. In addition to trust, the understanding of stakeholders in collaboration in providing incentives as well as protecting and empowering farmers is very minimal because it is only based on understanding the duties, functions and responsibilities of each stakeholder. Various factors that support stakeholder collaboration in controlling the conversion of paddy fields in Bone Regency include commitment, interdependence, common goals and trust among stakeholders. Meanwhile, the inhibiting factors in collaboration include the availability of resources and the lack of involvement of the private sector.

The involvement of the private sector and the community is required in the collaborative process of making maps of protected paddy fields so that a comprehensive map is produced that can accommodate all interests, both the interests of the government, the private sector and the community. Building public trust, especially farmers, in providing incentives, protecting and empowering farmers through continuous socialization, and requires a common understanding of stakeholders controlling the conversion of paddy fields through formal and informal forums. In addition, it is necessary to increase appreciation for stakeholders controlling the conversion of paddy fields through awards, praise, and giving more responsibility to outstanding stakeholders in order to increase the success of collaboration.

2. Nama : Juniyanto Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Kolaborasi Antar Perangkat Daerah di Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul
Kata kunci : Kolaborasi, Perangkat Daerah, *Governance, Administration, Autonomy, Mutuality, Norm*
Keywords : *Collaboration, Regional Apparatus, Governance, Administration, Autonomy, Mutuality, Norm*
-

ABSTRAK

Reformasi birokrasi untuk pembangunan di Indonesia menjadi isu yang nyata, dan kolaborasi menjadi alat yang paling fleksibel di antara yang lain karena model ini memungkinkan keterlibatan seluruh stakeholder tanpa ada intervensi satu sama lain, dan model yang berkelanjutan ini memungkinkan setiap stakeholder mendapatkan keuntungannya dan melakukan konsensus bersama seperti tujuan, identitas, tanggung jawab dan bekerja bersama. Namun demikian, di dalam organisasi internal perangkat daerah yang merupakan bagian dari stakeholder, terdapat keberagaman karakteristik dasar yang perlu menjadi pemahaman mendasar untuk membuat kolaborasi yang dilakukan menjadi lebih baik. Oleh karena itu, mengukur kapasitas perangkat daerah dalam melakukan kolaborasi sangat penting untuk mengetahui kemampuan masing-masing perangkat dalam melakukan kolaborasi. Di Pemda Gunungkidul, informasi mengenai kapasitas perangkat daerah dalam melakukan kolaborasi itu dikatakan baik atau tidak belum sepenuhnya ada, sehingga melalui penelitian ini, peneliti mencoba merumuskan indikator kolaborasi dan mengukur kapasitas kolaborasi perangkat daerah pemda Gunungkidul yang di definisikan dalam lima dimensi utama yaitu *governance, administration, autonomy, mutuality* dan *norm* melalui indikator-indikator yang digunakan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah —Apasajakah indikator dalam dimensi *governance, administration, autonomy, mutuality* dan *norm* yang menjadi indikator valid dan reliabel untuk mengukur kolaborasi perangkat daerah di Pemda Gunungkidul? Berapa skor total dan masing-masing skor dalam dimensi *governance, administration, autonomy, mutuality* dan *norm* kolaborasi perangkat daerah di Pemda Gunungkidul?

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pengumpulan data menggunakan sistem pengambilan sampel dari suatu populasi dan menggunakan kuesioner terstruktur sebagai alat pengumpulan data. Dengan sampel sebanyak 100 responden dengan mengisi 56 butir kuesioner menggunakan skala likert dari 1 = " tidak sama sekali " hingga 7 = " sebagian besar. " untuk 4 dimensi dan dari 1 = " tidak sama sekali " hingga 7 = " sebagian besar. " dan " sangat tidak setuju " sampai 5 " sangat setuju " untuk dimensi

Norma. Fokus dari estimasi adalah nilai koefisien lambda (λ) dari setiap indikator dan koefisien gamma (γ) yang menghubungkan linieritas kelima dimensi terhadap kolaborasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di peroleh 26 indikator yang mewakili skala multidimensional kolaborasi yang memiliki ukuran valid berdasarkan teoritis dan statistik dari kelima dimensi. Data valid tersebut dijadikan model untuk diestimasi menjadi model fit. Hasil estimasi data diperoleh model fit dengan chi-square test 7,236 (p value 0,204), GFI = 0,966, AGFI = 0,899, TLI = 0,964, CMIN/DF = 1,447, RMSEA = 0,075, CFI = 0,982, IFI = 0,983, dan NFI = 0,946. Skor total kolaborasi perangkat daerah di Pemda Gunungkidul adalah 0,73, sedangkan skor masing-masing dimensi adalah governance =0,70; administration=0,80; autonomy = 0,60; mutuality = 0,72; dan norm = 0,80. Secara keseluruhan, kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten gunungkidul sudah berjalan sangat baik, namun dilihat lebih dalam lagi, terdapat satu dimensi yaitu autonomy yang memiliki skor lebih rendah daripada dimensi lainnya. Sebagai kesimpulan, bahwa melihat hasil yang diperoleh, terdapat beberapa hal yang disampaikan untuk Pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul, yaitu (1) peningkatan hubungan in-formal, (2) peningkatan leadership dalam menjalankan peran dan tanggung jawab masing-masing perangkat daerah dalam kolaborasi, (3) menyederhanakan struktur organisasi dalam kolaborasi untuk memaksimalkan pembagian peran dan wewenang; (4) meningkatkan keterbukaan dalam membangun komitmen kolaborasi berkelanjutan; dan (5) meningkatkan kapasitas diri serta lebih membangun kepercayaan antar perangkat daerah.

ABSTRACT

Bureaucratic reform for development in Indonesia has become a real issue, and collaboration is the most flexible tool among others because this model allows the involvement of all stakeholders without intervening with each other, and this sustainable model allows each stakeholder to benefit and carry out mutual consensus. such as purpose, identity, responsibility and working together. However, within the internal organization of regional apparatus who are part of the stakeholders, there are a variety of basic characteristics that need to be a basic understanding to make the collaboration that is carried out better. Therefore, measuring the capacity of regional devices to collaborate is very important to know the ability of each device to collaborate. In the Gunungkidul Regional Government, information regarding the capacity of regional apparatus in carrying out collaboration is said to be good or not yet completely available, so that through this research, researchers tried to formulate indicators of collaboration and measure the collaborative capacity of the regional apparatus of the Gunungkidul regional government which is defined in five main dimensions, namely governance, administration, , autonomy, mutuality and norms through the indicators used. The formulation of the problem in this research is —What are the indicators in the dimensions of governance, administration, autonomy, mutuality and norms that are valid and reliable indicators to measure the collaboration of regional apparatus in the Gunungkidul Regional Government? What is the total score and each score in the dimensions of governance, administration, autonomy,

mutuality and norms of collaboration between regional apparatus in the Gunungkidul Regional Government?

The research method used is a quantitative method with data collection using a sampling system from a population and using a structured questionnaire as a data collection tool. With a sample of 100 respondents by filling out 56 questionnaire items using a Likert scale from 1 = "not at all" to 7 = "mostly." for 4 dimensions and from 1 = "not at all" to 7 = "mostly." and "strongly disagree" to 5 "strongly agree" for the Norm dimension. The focus of the estimation is the value of the lambda coefficient (λ) of each indicator and the gamma coefficient (γ) which relates the linearity of the five dimensions to collaboration.

The results showed that 26 indicators were obtained representing the multidimensional collaboration scale which had valid measures based on theoretical and statistical values of the five dimensions. The valid data is used as a model to be estimated to be a fit model. The results of the estimated data obtained by the model fit with a chi-square test of 7.236 (p value 0.204), GFI = 0.966, AGFI = 0.899, TLI = 0.964, CMIN/DF = 1.447, RMSEA = 0.075, CFI = 0.982, IFI = 0.983, and NFI = 0.946. The total score for the collaboration of regional apparatus in the Gunungkidul Regional Government is 0.73, while the scores for each dimension are governance = 0.70; administration=0,80; autonomy = 0.60; mutuality = 0.72; and norm = 0.80. Overall, the collaboration carried out by the Gunungkidul district government has gone very well, but if we look deeper, there is one dimension, namely autonomy, which has a lower score than the other dimensions. In conclusion, looking at the results obtained, there are several things that were conveyed to the Government in Gunungkidul Regency, namely (1) increasing informal relations, (2) increasing leadership in carrying out the roles and responsibilities of each regional apparatus in collaboration, (3) simplify the organizational structure to maximize the division of roles and authority; (4) increasing transparency in building commitment to sustainable collaboration; and (5) increasing self-capacity and building more trust among regional officials.

3. Nama : Nima Hikmawati Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : *Collaborative Governance* Pada Pembangunan Kampung Mina Padi Samberembe Technopark
Kata kunci : Kampung Mina Padi Samberembe Technopark, collaborative governance, Bank Syariah Mandiri, Kabupaten Sleman
Keywords : *Kampung Mina Padi Samberembe Technopark, collaborative governance, Bank Syariah Mandiri, Sleman Regency*
-

ABSTRAK

Kampung Mina Padi Samberembe Technopark merupakan sebuah desa wisata yang terbentuk dari kolaborasi sektor publik yakni Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Sleman, sektor privat yakni Bank Syariah Mandiri dan partisipasi aktif dari warga masyarakat lokal itu sendiri. Dalam upaya pembangunan desa wisata di Dusun Samberembe, karakteristik dan lokalitas suatu daerah menjadi tantangan tersendiri untuk membentuk pola kolaborasi yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di wilayah tersebut. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses *collaborative governance* diterapkan pada pembangunan Kampung Mina Padi Samberembe serta menggali apa saja hambatan yang dihadapi dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan. Tesis ini berlokus di Desa Candibinangun, Kepanewon Pakem, Kabupaten Sleman, DIY. Dalam proses penulisan, peneliti mengacu pada teori *collaborative governance* yang ditulis oleh Chris Ansell dan Alison Gash. Penelitian menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan melalui proses observasi, dokumentasi, wawancara, studi literatur dan dilanjutkan dengan penelaahan secara mendalam. Informan dalam penelitian ini terdiri dari sejumlah tokoh masyarakat di Dusun Samberembe, Petugas Penyuluh Lapangan di BP\$ Pakem-Turi serta fasilitator dari Rumah Zakat. Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara kearifan lokal sebagai modal sosial sebagai awal terbentuknya kolaborasi antara tiga sektor serta penentu keberhasilan pariwisata berkelanjutan di Dusun Samberembe. Sejumlah modal sosial yang ditemui dalam proses pembangunan KMP Samberembe diantaranya adalah budaya berkomunikasi dan bermusyawarah, sifat *melu handarbeni* (rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi) dan kebiasaan bergotong royong. Sementara faktor penghambat yang ditemui dalam proses pembangunan yang utama adalah adanya pandemi Covid 19 yang menyebabkan turunnya angka kunjungan wisata yang menyebabkan sifat egosentris, pesimis dan turunnya tingkat komitmen warga. Sedangkan untuk menjamin kesinambungan pembangunan pariwisata, diperlukan pola kerjasama yang dilembagakan secara profesional seperti misalnya pelembagaan keuangan yang mampu mengelola modal dan keuntungan secara profesional.

ABSTRACT

Kampung Mina Padi Samberembe Technopark is a tourist village formed from the collaboration of the public sector, namely Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan of Sleman Regency, the private sector, namely Bank Syariah Mandiri and the active participation of the local community itself. In an effort to develop a tourist village in Samberembe Hamlet, the characteristics and locality of an area become a challenge in itself to form a pattern of collaboration that is in accordance with the values and norms prevailing in the area. This research is intended to find out how the collaborative governance process is applied to the development of Mina Padi Samberembe Village and to explore what are the obstacles faced in sustainable tourism development. This thesis is located in Candibinangun Village, Kepanewon Pakem, Sleman Regency, DIY. In the writing process, the researcher refers to the collaborative governance theory written by Chris Ansell and Alison Gash. This research uses a qualitative approach with a case study approach. Data collection was carried out through a process of observation, documentation, interviews, literature studies and continued with an in-depth study. Informants in this study consisted of a number of community leaders in Dusun Samberembe, Petugas Penyuluh Lapangan (field extension officers) at BP\$ Pakem-Turi and facilitators from Rumah Zakat. The results of this study provide an overview of the relationship between local wisdom as social capital as the beginning of the formation of collaboration between the three sectors and the determinants of the success of sustainable tourism in Samberembe Hamlet. A number of social capitals encountered in the Kampung Mina Padi Samberembe development process include a culture of communication and deliberation, the nature of melu handarbeni (sense of belonging) and gotong royong (the habit of working together). Meanwhile, the main inhibiting factor encountered in the development process was the Covid 19 pandemic which caused a decrease in the number of tourist visits which led to egocentricity, pessimism and a decrease in the level of community commitment. Meanwhile, to ensure the sustainability of tourism development, a professionally institutionalized cooperation pattern is needed, such as a financial institution capable of managing capital and profits professionally.

4. Nama : Hari Sri Purwati Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Koordinasi Antar Unit Pada Program Kerja Sama *International Labour Organization* (ILO) Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Kementerian Ketenagakerjaan
Kata kunci : Koordinasi, Kerja sama, Peningkatan kinerja, *International Labour Organization* (ILO), Kementerian Ketenagakerjaan
Keywords : *Coordination, cooperation, performance, International Labor Organization (ILO), Ministry of Manpower*
-

ABSTRAK

Kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional Negara tersebut. Salah satu bentuknya adalah menjadi anggota pada organisasi internasional. Organisasi internasional yang memiliki keunikan adalah *International Labour Organization* (ILO) karena keanggotaannya yang bersifat tripartit. Dalam rangka menciptakan kerja sama internasional yang baik dan bermartabat, maka koordinasi internal pada Kementerian yang menjadi *focal point* kerja sama dengan ILO merupakan hal yang krusial karena koordinasi merupakan inti dari sebuah organisasi yang memungkinkan pencapaian tujuan organisasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis koordinasi antar unit pada kerja sama *International Labour Organization* dalam meningkatkan kinerja organisasi di Kementerian Ketenagakerjaan menggunakan Teori Winardi (1990) dan Model Koordinasi *Hierarchy Type Mechanism/* HTM (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010), faktor pendukung dan penghambat koordinasi antar unit yang dianalisis menggunakan Teknik Analisa Medan Kekuatan (*Force Field Analysis/* FFA), serta indikator peningkatan kinerja yang menunjukkan bahwa koordinasi antar unit telah berjalan dengan baik. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif dan model analisis data Miles, Huberman dan Saldana (2014).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antar unit dalam kerja sama ILO di Kementerian Ketenagakerjaan telah memenuhi seluruh elemen pada Model Koordinasi *Hierarchy Type Mechanism* (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010) dan elemen pada dimensi koordinasi vertikal (Winardi, 1990), namun tidak pada koordinasi horizontal, yaitu pada pembentukan departementalisasi matriks dan tim fungsional silang. Adapun faktor pendukung koordinasi antar unit pada kerja sama ILO adalah tersedianya sumber dana, sarana dan prasarana yang memadai, adanya SDM yang cepat tanggap, kepatuhan SDM yang tinggi terhadap arahan pimpinan dan aturan serta jumlah SDM yang cukup. Sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan koordinasi antar unit antara lain: kurangnya pemahaman SDM, adanya permasalahan pada manajemen organisasi, belum tersedianya aturan dan kebijakan terkait kerja sama ILO yang komperhensif serta belum optimalnya penggunaan *e-office* dalam memberikan disposisi oleh pimpinan. Berdasarkan analisis

medan kekuatan / *Force Field analysis*, prioritas kekuatan pendorong adalah jumlah SDM yang cukup dan prioritas kekuatan penghambat adalah permasalahan pada manajemen.

Hasil penelitian mengenai indikator peningkatan kinerja yang menunjukkan bahwa koordinasi antar unit dalam program kerja sama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan ILO telah berjalan dengan baik, antara lain: a). produktivitas; b). kepatuhan terhadap tahapan kerja; c). kualitas pelayanan bagi stakeholder; d). upaya monitoring dan evaluasi; e). *Standard Operational Procedures* (SOP); f). ketersediaan *database*; g) kepedulian/ kepekaan unit teknis terhadap Biro KLN.

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah: penyusunan Surat Keputusan tentang pembentukan suatu Tim harus memuat tugas dan pola pelaporan yang jelas serta memastikan bahwa SK tersebut diterima oleh pihak-pihak terkait, Biro KLN perlu menyusun Buku Pedoman yang merupakan kodifikasi seluruh aturan teknis kerja sama luar negeri, khususnya kerja sama ILO, perlu adanya inovasi penyempurnaan *e-office* agar lebih ramah pengguna, mengoptimalkan fungsi Biro KLN sebagai koordinator dalam kerja sama ILO, penyusunan mekanisme monitoring dan evaluasi oleh Biro KLN dalam pelaksanaan kerja sama ILO.

ABSTRACT

International cooperation is a relationship between a country and another country with the aim of achieving the national goals of that country. One form is becoming a member of an international organization. An international organization that is unique is the International Labor Organization (ILO) because of its tripartite membership. In order to create good and dignified international cooperation, internal coordination at the Ministry which is the focal point for cooperation with the ILO is crucial because coordination is the core of an organization that enables the achievement of organizational goals.

This study aims to analyze the coordination between units in the cooperation of the International Labor Organization in improving organizational performance in the Ministry of Manpower using Winardi's theory (1990) and the Hierarchy Type Mechanism / HTM Coordination Model (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010), supporting factors and obstacles to coordination. between units analyzed using Force Field Analysis Technique (FFA), as well as performance improvement indicators which indicate that coordination between units has been going well. The research was conducted through a qualitative approach and data analysis models by Miles, Huberman and Saldana (2014).

The results showed that coordination between units in the ILO cooperation in the Ministry of Manpower had fulfilled all the elements in the Hierachy Type Mechanism Coordination Model (Bouckaert, Peters & Verhoest, 2010) and elements in the vertical coordination dimension (Winardi, 1990), but not horizontal coordination, namely in the formation of the matrix departmentalization and cross functional teams. The supporting factors for coordination between units in ILO cooperation are the availability of sources of funds, adequate facilities and infrastructure, responsive human resources, high human resource compliance with leadership directives and regulations and a sufficient number of human

resources. While the inhibiting factors in the implementation of coordination between units include: lack of understanding of human resources, problems in organizational management, the absence of comprehensive rules and policies related to ILO cooperation and the inadequate use of e-office in providing dispositions by the leadership. Based on the force field analysis, the driving force priority is a sufficient number of human resources and the priority of the inhibiting force is a problem in management.

The results of research on performance improvement indicators show that coordination between units in the cooperation program between the Ministry of Manpower and the ILO has been going well, among others: a). productivity; b). compliance with work stages; c). service quality for stakeholders; d). monitoring and evaluation efforts; e). Standard Operational Procedures (SOP); f). database availability; g) concern / sensitivity of the technical unit to the International Cooperation Bureau.

Suggestions that can be given from the results of the research are: the preparation of a Decree regarding the formation of a Team must contain clear tasks and reporting patterns and ensure that the Decree is accepted by the parties concerned, the International Cooperation Bureau needs to compile a Guidebook which is the codification of all technical rules of cooperation. abroad, especially ILO cooperation, there needs to be an innovation in improving the eoffice to make it more user-friendly, optimizing the function of the International Cooperation Bureau as a coordinator in ILO cooperation, drafting a monitoring and evaluation mechanism by the KLN Bureau in implementing ILO cooperation.

5. Nama : Mariana Sole Agusta Nope Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Collaborative Governance Dalam Kelembagaan Adat (Studi Pada Penetapan Status Hukum Bagi Perkawinan Adat Suku Dawan Di Kabupaten Timor Tengah Utara)
Kata kunci : Inkulturasi, *Collaborative Governance*, Hukum perkawinan
Keywords : *Inculturation, Collaborative, Governance, Marriage Law*
-

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah adanya gesekan-gesekan dalam masyarakat suku Dawan dalam kaitannya dengan syarat-syarat sahnya perkawinan adat yang menghambat sah perkawinannya menurut UU No. 1 Tahun 1974. Inkulturasi menjadi dasar dan modal yang kuat untuk dilaksanakannya suatu *collaborative governance* dalam kelembagaan adat pada penetapan status hukum bagi perkawinan adat suku Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara). Lembaga agama, lembaga pemerintah, dan lembaga adat sebagai pemangku kepentingan bersama-sama melakukan perencanaan aksi kolaborasi; mulai dari identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi.

Tesis dengan judul “Collaborative Governance Dalam Kelembagaan Adat (Studi Pada Penetapan Status Hukum Bagi Perkawinan Adat Suku Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara)” merupakan sebuah studi dengan kajian khusus terhadap dinamika adat perkawinan suku Dawan yang mengakibatkan rendahnya perlindungan hukum terhadap perkawinan adat. Hal ini terjadi karena belum adanya pengesahan secara hukum agama dan negara. Keadaan ini telah mendorong terciptanya suatu kolaborasi antar lembaga. Rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimanakah *System Contexts* Kebijakan dan Kerangka Hukum Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Kelembagaan Adat (Studi Pada Penetapan Status Hukum Bagi Perkawinan Adat Suku Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *System Contexts* Kebijakan dan Kerangka Hukum Pelaksanaan *Collaborative Governance* Dalam Kelembagaan Adat (Studi Pada Penetapan Status Hukum Bagi Perkawinan Adat Suku Dawan di Kabupaten Timor Tengah Utara).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Tehnik pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literasi. Kemudian, dilakukan kajian dengan pendekatan fenomenologi hermeneutik transformatif.

Hasil temuan lapangan menunjukkan terjadi inkulturasi lembaga agama dalam hal ini Gereja melalui adanya gerakan 3 BER. Gerakan yang menjadi cikal bakal terjadinya kolaborasi dalam kelembagaan adat yang memiliki tiga *drivers* utama yaitu lembaga agama, lembaga adat, dan lembaga pemerintah. Kemudian, adanya *leader* sektor yaitu Dinas

Dukcapil, dan juga *interdependence* sektor yang terkait dengan ketiga lembaga *driver* yaitu Dinas Sosial, Dinas P3A, Pemerintah Desa, Dekenat, Paroki, Lingkungan, KUB, Na'i, Usif, Fukun, Tobe, Mafefa, Kapitan, Feo dan Atoin Amaf.

Ditemukan fakta bahwa untuk dapat mengatur masyarakat adat, tetap harus mempertimbangkan serta menggunakan kearifan lokal yaitu dengan menempatkan lembaga adat sebagai penggerak utama pada tingkat akar rumput. Sedangkan untuk dapat mendorong masyarakat adat mengesahkan perkawinannya, maka lembaga agama yaitu gereja dapat bergerak sebagai inisiator sekaligus mediator bagi lembaga adat dan lembaga pemerintah. Setiap lembaga tersebut memiliki kesamaan kepentingan dan program yang hanya dapat terlaksana dengan baik dengan aksi kolaborasi.

Tata kelola dalam kelembagan adat memiliki tiga dampak. Pertama, dampak sementara berupa: 1) adanya ketakutan sekelompok masyarakat menyikapi gerakan 3 BER; 2) adanya kecurigaan tokoh-tokoh adat atas kolaborasi yang terjadi; 3) adanya kekhawatiran dan ketakutan terjadinya kolaborasi yang dimotori oleh gerakan 3 BER akan menghilangkan wibawa tokoh adat dan juga mengakibatkan kerugian baik secara moril maupun materi. Kedua, adanya adaptasi sementara yaitu: 1) penolakan dari sekelompok masyarakat dan tokoh adat, cenderung memilih melihat dari jauh; 2) membuka diri dan menerima aksi kolaborasi namun menolak melaksanakan apa yang menjadi tujuan kolaborasi; 3) membuka diri dan ikut melaksanakan apa yang menjadi tujuan aksi kolaborasi namun dengan mengajukan syarat-syarat tertentu. Ketiga, dampak utama berupa: 1) tercipta pemahaman yang sama, saling percaya, saling mempengaruhi, hingga adanya saling ketergantungan antar lembaga; 2) berubahnya cara pandang masyarakat terhadap berbagai ritual dan tuntutan adat, terutama adat perkawinan dan adat kematian. Perubahan ini juga membawa pengaruh pada tingkat perekonomian, kesehatan, dan pendidikan masyarakat; 3) terlaksananya kolaborasi antar lembaga yang mampu memotivasi masyarakat untuk mengesahkan perkawinan sesuai yang diamanatkan dalam UU No. 1 Tahun 1974.

ABSTRACT

The background of the research is the fact that there are frictions among the Dawan community in relation to the legal requirements of customary marriages that hinder the validity of their marriages according to Law no. 1 of 1974. Inculturation has become a strong basis and the capital for the implementation of collaborative governance in customary institutions to determine the legal status of traditional marriages of the Dawan people in North Central Timor Regency. The institutions of religion, government, and customary as stakeholders carry out together the collaborative actions: starting from problem identification, planning, implementation, to evaluation.

This thesis is entitled "Collaborative Governance in Customary Institutions (A Study on Legal Status Determination for the Dawan's Indigenous Marriage in North Central Timor Regency)". This is a study focusing to look at the dynamics of the customary marriages among the Dawan people which result in low legal protection for customary marriages

because there is no legal legitimacy of religion and state. This situation has encouraged the creation of a collaboration between institutions. The formulation of the research problem is "How is the Policy Contexts System and Legal Framework for the Implementation of Collaborative Governance in Customary Institutions (A Study on the Legal Status Determination for Dawan Indigenous Marriages in North Central Timor Regency)". The purpose of the study is to determine the Policy Contexts System and Legal Framework for the Implementation of Collaborative Governance in Customary Institutions (Study on Legal Status Determination for Dawan's Customary Marriages in North Central Timor Regency). The research is carried out using a qualitative research method. Data collection techniques were obtained by methods of interviews, observation, documentation, and literacy studies. Then, the study was conducted using a transformative hermeneutic phenomenology approach. The findings in the field show that there is an inculturation of religious institutions, in this case, the Church through the 3 BER movement. The movement that becomes the forerunner of collaboration in traditional institutions which has three main drivers: religious institutions, traditional institutions, and government institutions. Then, there are sector leaders, namely the Dukcapil Office, as well as interdependence sectors related to the three driver institutions; namely the Social Service, P3A Office, Village Government, Deacon, Parish, Lingkungan, KUB, Na'i, Usif, Fukun, Tobe, Mafefa, Kapitan, Feo and Atoin Amaf.

It was found that in order to be able to regulate indigenous peoples, it is necessary to consider and use local wisdom by placing customary institutions as the main driver at the grassroots level. Meanwhile, to be able to encourage indigenous peoples to ratify their marriage, religious institutions, namely the church, as the initiator as well as mediator for traditional institutions and government institutions. Each institution has the same interests and programs that can only be implemented properly through collaborative action.

Governance in customary institutions has three impacts. Firstly, temporary impacts in the form of: 1) there is a fear of a group of people responding to the 3 BER movement; 2) the suspicion of traditional leaders over the collaboration that occurred; 3) there are concerns and fears that collaboration driven by the 3 BER movement will eliminate the authority of traditional leaders and also result in moral and material losses. Secondly, there are temporary adaptations, namely: 1) rejection from a group of people and traditional leaders who tend to choose to see from afar; 2) open up and accept collaborative action but refuse to carry out the goal of collaboration; 3) open themselves up and participate in carrying out the purpose of the collaborative action but by proposing certain conditions. Thirdly, the main impacts are: 1) the creation of a common understanding, mutual trust, mutual influence; therefore, there is interdependence between institutions; 2) changes in people's perspectives on various rituals and customary demands, especially on marriage and death customs. These changes also have impacts on the level of the economy, health, and education of the community; 3) the implementation of interinstitutional collaboration that is able to motivate the community to legalize marriages as mandated in Law no. 1 of 1974.

PARTISIPASI

1. Nama : Fazhurrahman, M.AP Tahun masuk : 2020
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Pemanfaatan Dana Kelurahan di Kota Bima
Kata kunci : Dana kelurahan, Partisipasi masyarakat
Keywords : *Urban Village funds, Community Participation*
-

ABSTRAK

Latarbelakang penelitian ini adalah adanya kebijakan alokasi dana kelurahan dari pemerintah pusat pada akhir tahun 2018 melalui dana alokasi umum tambahan bagi pemerintahan daerah yang memiliki wilayah kelurahan, hal ini dilakukan dalam upaya menstimulus pemerintah daerah termasuk Kota Bima untuk mendukung pembangunan kelurahan melalui alokasi APBD sebesar 5% setelah dikurangi dana alokasi khusus sebagaimana tertuang didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kebijakan dana kelurahan memang sepintas terlihat sebagaimana lahirnya dana desa yang dikucurkan pada tahun 2015 lalu, mengingat desa dan kelurahan sebagai level pemerintahan terkecil, akan tetapi jika dicermati dengan seksama terdapat perbedaan yang besar antara keduanya. Perubahan kedudukan kelurahan dari organisasi perangkat daerah menjadi perangkat kecamatan membawa konsekuensi pada aspek hubungannya dengan organisasi perangkat daerah lainnya, serta besarnya intervensi organisasi fungsional perencana daerah meminimalkan peran dan fungsi perencanaan yang bersifat partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Menganalisa perencanaan pembangunan dalam pemanfaatan dana kelurahan; (2). Mengetahui peran perangkat daerah dan kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima; (3) mengetahui efektif dan efisiensi pengelolaan dana kelurahan; (4) mengetahui faktor yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan. Untuk menjawab tujuan dari penelitian ini, peneliti merumuskan masalah penelitian: Bagaimanakah perencanaan pembangunan kelurahan di Kota Bima dalam pemanfaatan dana kelurahan; Bagaimanakah peran perangkat daerah dan kecamatan dalam perencanaan pembangunan dan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima; Bagaimanakah efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana kelurahan di Kota Bima; Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi pengelolaan dana kelurahan di Kota Bima.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, menganalisa fenomena yang ditemukan dilapangan dalam hal ini berkaitan dengan pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima serta faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Hasil penelitian ini secara garis besar menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan dana kelurahan di Kota Bima, hal ini terlihat dari belum adanya pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada lurah sehingga ruang gerak lurah sangat terbatas, dominasi bappeda sangat besar dalam hal penentuan kegiatan yang dilaksanakan di kelurahan, masyarakat kurang berdaya dalam keterlibatannya didalam perencanaan maupun pelaksanaan dana kelurahan, jika digambarkan berdasarkan tangga partisipasi yang disampaikan oleh Arstein berada pada partisipasi semu (tokenisme) pada tahap konsultasi artinya bahwa pada tahap ini sudah dilakukan konsultasi dan dengar pendapat masyarakat terhadap kebijakan yang akan diambil, namun tidak diberikan jaminan apakah pendapat masyarakat akan dipertimbangkan didalam pengambilan kebijakan atau tidak. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengeloaan dana kelurahan di Kota Bima yaitu: dominasi perangkat daerah; sumber daya manusia; perubahan struktur organisasi yang cepat; ketidaktepatan memahami perencanaan dana kelurahan; kurangnya transparansi dan penyebaran informasi.

Saran yang penulis berikan pada penelitian ini adalah: (1) adanya penguatan kedudukan kelurahan dengan pelimpahan kewenangan melalui peraturan daerah maupun peraturan Walikota, diharapkan lurah akan mampu secara langsung memberdayakan sumber daya yang dimilikinya. (2) peningkatan kegiatan-kegiatan pelatihan bagi aparatur birokrat dan masyarakat. (3) pemanfaatan media massa sebagai media komunikasi dan informasi.

ABSTRACT

The background of this research is the policy of allocation of urban village funds from the central government at the end of 2018 through additional general allocation funds for local governments that have sub-sub-district areas. This is carried out to stimulate local governments, including Bima City to support subdistrict village development through local government budget (APBD) allocation of 5% after deducting special allocation funds as stipulated in the Constitution No. 23 of 2014 on Local Government. The urban village fund policy is indeed at first glance seen as the birth of village funds disbursed in 2015, considering villages and urban villages as the smallest level of government. However, if you look closely there is a slight difference between the two. The aims of this research are (1). Analyzing development planning in the utilization of village funds; (2). Knowing the role of regional and sub-district apparatus in development planning and utilization of village funds in Bima City; (3) knowing the effectiveness and efficiency of village fund management; (4) knowing the factors that affect the management of village funds. To find out the implementation of urban village funds in Bima City, the researcher formulated research problems: How is the planning of village development in Bima City in the utilization of urban village funds? What is the role of regional and sub-district agencies in the planning of development and utilization of urban village funds in Bima City? What is the efficiency and effectiveness of urban village fund management in Bima City? What factors affect the management of urban village funds in Bima City?

This research is qualitative research by describing, interpreting, and analyzing the phenomena found on the ground in this case related to the utilization of village funds in Bima City, and the factors affecting it.

e funds in Bima City. This is seen from the lack of authority (decentralization) given to the chief of the administrative village with limited space and role. The dominance of the Regional Body for Planning and Development (BAPPEDA) is very large in terms of determining the activities carried out in the village, the community is less empowered and involved in the planning and implementation of village funds, and if it is described based on the participation stage by Arstein is at the pseudo-participation (tokenism) at the consultation stage. It means that there has been consultation and public hearings on the policies to be taken, However, there is no guarantee whether the public opinion will be considered in policymaking or not. Meanwhile, the factors affecting the management of the village funds in Bima City are the dominance of regional agencies; human resources; rapid changes in the organizational structure; the inaccuracy of understanding the planning of village funds; Lack of transparency and dissemination of information.

The are some suggestions that the authors address for this study, namely: (1) the position of urban village needs to be strengthened by delegating authority through regional and mayoral regulations, so that the chief of the village will be able to directly empower its resources. (2) increasing training activities for bureaucratic apparatus and the societies (3) the use of mass media as a medium of communication and information.

2. Nama : Ivo Timbul Siboro Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Yang Bersumber Dari APBN (Studi Kasus Kelurahan Bitauuni Kabupaten Timor Tengah Utara)
Kata kunci : Partisipasi, Dana Kelurahan, Pembangunan daerah
Keywords : *Participation, Urban Village Budgeting, Local Development*
-

ABSTRAK

Dalam rangka membantu mengatasi masalah perkotaan, dan menjaga harmonisasi penganggaran antara Desa dan Kelurahan, Pemerintah melalui mekanisme Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan memberikan dukungan pendanaan untuk kelurahan dari APBN yang dimulai sejak tahun 2019. Dana kelurahan yang bersumber dari APBN ini dikhususkan untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan mengingat sebelumnya terjadi fenomena kesenjangan antara Desa dengan Kelurahan. Pemilihan jenis kegiatan dan pengelolaannya dikembalikan kepada keputusan bersama masyarakat Kelurahan untuk disesuaikan dengan kondisi di kelompok masyarakat, menjadikan hal ini menarik untuk meneliti bagaimana partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan dimaksud.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019-2021. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Kelurahan Bitauuni dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019-2021. Untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat kelurahan Bitauuni dalam pengelolaan dana kelurahan, digunakan tangga partisipasi Arnstein (1969) untuk melihat tingkat partisipasi masyarakat dan Tipologi partisipasi Cohen dan Uphoff (1980) untuk melihat bentuk partisipasi serta tahapan partisipasi. Untuk melihat hal yang mempengaruhi partisipasi masyarakat digunakan faktor sosial ekonomi, desain kelembagaan dan modal sosial (Lowndes, 2006).

Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat Kelurahan Bitauuni dalam pengelolaan dana kelurahan Tahun 2019-2021 berada pada tingkat tokenisme. Partisipasi masyarakat dilakukan melalui perwakilan dan tidak dapat dijangkau luas oleh masyarakat, dan pada akhirnya pemerintah yang menentukan prioritas dan keputusan akhir. Metode pelaksanaan kegiatan yang dipilih pemerintah mengakibatkan masyarakat kurang dapat terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, namun tidak serta – merta menyurutkan niat masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Masyarakat berinisiasi untuk dapat ikut berpartisipasi secara tidak langsung untuk mendukung suksesnya program kegiatan dalam aspek lain, yakni menghadiri rapat, memberikan ide, saran dan masukan, hibah tanah untuk lokasi pengerjaan serta pemanfaatan hasil kegiatan. Hal yang mendasari adanya inisiasi dari

masyarakat untuk sedapat mungkin ikut terlibat dalam mendukung suksesnya program kegiatan meskipun jenis metode pelaksanaan kurang memungkinkan dan sosial ekonomi masyarakat rendah, yakni adanya anggapan bahwa sudah menjadi kewajiban bersama sebagai anggota masyarakat untuk ikut serta dan bertanggungjawab dalam membangun daerahnya, keinginan atas fasilitas publik yang memadai dan mata pencaharian yang lebih tinggi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana kelurahan adalah desain kelembagaan dan modal sosial. Masyarakat tidak memiliki kontrol akan hasil keputusan karena kurangnya keterbukaan dari pemerintah, struktur organisasi publik mengurangi produktivitas kelurahan, dan minimnya anggaran yang tersedia untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan yang dapat lebih melibatkan masyarakat, serta menurunnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah karena merasa pemerintah tidak dapat menjamin aspirasi mereka akan diterima dan diakomodir yang menyebabkan masyarakat kurang dapat mengikuti proses partisipatif dengan maksimal.

ABSTRACT

In order to resolved urban's problems and maintained the budgeting harmony between Village and Urban Village, the Government through Additional General Allocation Fund (DAU) mechanism, supported the Urban Village budgeting from the Indonesian Budget (APBN) since 2019. This fund was specialized not only for facilities and infrastructure development but also for community empowerment in the Urban Village while there was a gap phenomenon between Village and Urban Village previously. The selection of the activity's type and its management was decided by societies based on the each Urban Village conditions. The government through regulations, expected the societies get involved in the budgeting implementation so that it was attracted to examine public participation managing the Urban Village budgeting.

This study was conducted to find out the public participation in managing the Urban Village budgeting from 2019 to 2021. Furthermore, it aimed to identify and analyze factors that affect public participation of Bitauuni Urban Village in managing the Urban Village budgeting from 2019 to 2021. The Arnsteins' Ladder of Citizen Participation (1969) and The Cohen and Uphoff Participation Typology (1980) were applied to examining the extent of public participation of Bitauuni Urban Village in managing the Urban Village budgeting. Moreover, Social-Economic Status, Institutional Design, and Social capital (Lowndes, 2006) were applied to examining factors that affect the public participation.

Based on the result, it showed that public participation of Bitauuni Urban Village in managing the Urban village budgeting from 2019 to 2021 was a tokenism participation. Public participation was arranged by a representatives and cannot be independently attained by the societies, and in the end the government determines the priorities and final decisions. The method of implementing the activities chosen by the government resulted in the community being less able to be directly involved in the implementation of the activities,

but it did not necessarily discourage the community from participating. The community takes the initiative to participate indirectly to support the success of the program in other aspects, by attending meetings, providing ideas, suggestions, granting land for construction sites and utilizing the results of activities. The thing that underlines the initiation of the community to be involved as much as possible in supporting the success of the program even though the type of implementation method is less possible and the socio-economic is inadequate, because they feel it is the responsibility of all community members to participate and be responsible for developing their area, the desire for adequate public facilities and higher income.

The factors that affect the public participation in managing the Urban Village budgeting were institutional design and social capital. The societies had no control of final decisions due to lack of openness and responsive of the government, public organizational structures reduced Urban Village productivity and insufficiency of budgeting which can be implemented to the community empowerment activities also decline of public trust to the government because they cannot guarantee public aspirations will be accepted or not. It caused the societies was disappointed and reluctant to participate.

3. Nama : Ganda Sibarani Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Peran Website Desa Terhadap Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Desa (Kasus: Desa Nglanggeran dan Desa Girijati Kabupaten Gunungkidul)
Kata kunci : TIK, Partisipasi Masyarakat, Jurnalisme Warga
Keywords : *ICT, Community Participation, Citizen Journalism*
-

ABSTRAK

Desa sebagai wilayah administrasi terluar pada konstelasi pembangunan daerah mempunyai karakteristik unik dibanding dengan wilayah lain karena membangun desa berarti memberdayakan masyarakat desa untuk mandiri dengan segala potensi dan tantangan. Program dan kegiatan pembangunan desa harus disusun berdasarkan basisdata mutakhir dan informasi akurat sehingga program dan kegiatan tepat sasaran dan meningkatkan partisipasi pembangunan warga desa karena memiliki rasa kewajiban dan hak untuk turut dalam berbagai keputusan penting yang menyangkut pembangunan desa melalui pengambilan keputusan berdasarkan arus data dan informasi. Penetrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) seperti Sistem Informasi Desa (SIDA) melalui pemanfaatan website desa agar beragam data dan informasi terkait kebijakan desa dengan cepat dan rutin disebarkan serta mudah diakses warga. Lokasi penelitian adalah Desa Nglanggeran dan Desa Girijati yang mempunyai karakteristik wilayah yang kontras di Kabupaten Gunungkidul dan memiliki keunikan kasus karena telah menerapkan SIDA sebagai komponen dalam penanggulangan kemiskinan daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana website desa berperan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Metodologi yang digunakan ialah *Mix methods sequential explanatory designs* dengan metode pengumpulan data kuesioner yang dilanjutkan dengan wawancara mendalam dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kuantitatif statistik non parametrik. Hasil analisis tersebut selanjutnya dibawa kembali ke lapangan untuk digunakan sebagai dasar wawancara dan dianalisis secara kualitatif untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu berdasarkan perspektif partisipatori. Hasil temuan berupa deskripsi kasus dan faktor-faktor dugaan penelitian yang disimpulkan dalam ringkasan temuan dan kontribusi terhadap pengetahuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi website desa pada level penyelenggaraan pemerintahan cukup efektif. Namun pada peningkatan partisipasi masyarakat, website desa belum dapat menimbulkan efek kognitif, kognitif afektif dan konatif pada peningkatan kesadaran dalam pembangunan dan partisipasi masyarakat. Beberapa faktor penyebabnya seperti Nilai Berita, Konsistensi dan Variasi Program SIDA, Konektivitas Internet dan

Kepemilikan Perangkat Akses, Modal Sosial, Budaya Lisan, dan Misleading Kebijakan Pemerintah Daerah. Untuk memaksimalkan keberadaan website, masyarakat perlu diberikan penguatan jurnalisme warga agar peran aktif masyarakat dalam proses pengumpulan, pelaporan, penganalisisan, dan penyajian berita semakin baik dan menggiatkan komunikasi warga dengan Pemerintah Desa.

ABSTRACT

Village, as the outermost administrative area in the constellation of regional development, has unique characteristics compared to other regions because building a village means empowering village communities to be independent with all the potentials and challenges. Rural development activities and programs must be prepared based on up-to-date databases and accurate information so that programs and activities are right on target and increase development participation of villagers because they have a sense of duty and right to participate in various essential decisions related to village development through decision making based on data and information flows. Penetration of Information and Communication Technology (ICT) such as the Village Information System (SIDA) uses village websites so that various data and information related to village policies are quickly and routinely disseminated and easily accessible to residents. The research locations are Nglanggeran and Girijati Villages, which have contrasting regional characteristics in District of Gunungkidul and have a unique case because they have implemented SIDA as a component in regional poverty reduction.

This research aims to describe how village websites play a role in increasing community participation in village development decision-making. The methodology used is mixed-method sequential explanatory designs with questionnaire data collection methods followed by in-depth interviews and observations. The data obtained were analyzed by non-parametric statistical quantitative analysis. The analysis results are then brought back to the field to use as a basis for interviews and are analyzed qualitatively to build certain theories or patterns of knowledge based on participatory perspectives. The findings are in the form of a description of the case and the study's suspected factors, which are summarized in the summary of the findings and the contribution to knowledge.

The results showed that the existence of village websites at the level of government administration was quite effective. However, in increasing community participation, village websites have not been able to cause cognitive, affective and conative cognitive effects on increasing awareness in development and community participation. Some of the contributing factors are News Value, Consistency and Variety of SIDA Programs, Internet Connectivity and Ownership of Access Devices, Social Capital, Oral Culture, and Misleading Local Government Policies. To maximize the website's existence, the community needs to be given strengthening citizen journalism so that the active role of the community in collecting, reporting, analyzing, and presenting news is getting better and intensifying communication between citizens and the Village Government.

4. Nama : Nur Yusriana Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Peran Stakeholder Dalam Program Konsolidasi Tanah Desa
Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul
Kata kunci : Penataan Ruang, Konsolidasi Tanah, Peran, *Stakeholders*
Keywords : *Spatial Planning, Land Consolidation, Role, Stakeholders*
-

ABSTRAK

Lahan mempunyai luas yang relatif tetap, sementara kebutuhan akan lahan terus meningkat. Ketersediaan lahan yang terbatas dan semakin meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan ketidakteraturan dalam penggunaan ruang. Permasalahan kepadatan penduduk yang tinggi yang tidak dibarengi dengan penataan ruang sebagai tempat tinggal, akan menimbulkan permasalahan lain yaitu kurangnya fasilitas sarana dan prasarana bagi masyarakat dan lingkungan terbangun secara tidak teratur. Menghadapi konflik pertanahan tersebut, maka perlu dilaksanakan program konsolidasi tanah sebagai upaya menata ulang penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pengadaan tanah yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan dengan mengikutsertakan stakeholders untuk berperan secara aktif. Pelaksanaan Program konsolidasi tanah Desa Gadingsari merupakan konsolidasi tanah di area permukiman yang telah dilaksanakan mulai tahun 2009 sampai dengan 2018, kecuali tahun 2012, 2014 dan 2016 dengan 2.034 bidang telah tertata dengan jumlah luas 1.168.793 m². Konsolidasi tanah dilaksanakan pada satu hamparan dan dilanjutkan dengan hamparan di sebelahnya sehingga menghasilkan wilayah yang tertata baik secara fisik ataupun secara administrasi pertanahannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk peran *stakeholder* pada program konsolidasi tanah di Desa Gadingsari serta mengungkap faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian induktif kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Gadingsari Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul. Ruang lingkup penelitian ini adalah kegiatan konsolidasi tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara, serta pengumpulan data sekunder. Selanjutnya data tersebut dianalisa melalui tahapan konseptualisasi. Informasi yang didapat di lapangan dianalisa sampai menemukan peran stakeholders dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Unit-unit informasi dianalisa secara induktif sehingga membentuk suatu tema, selanjutnya tema-tema akan membangun konsep dan teori deskriptif mengenai bentuk peran stakeholders dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Hasil penelitian menemukan enam peran stakeholders dalam program konsolidasi tanah, yaitu (1) pembuat kebijakan, (2) perencana, (3) koordinator, (4) fasilitator, (5) pelaksana dan (6) mediator. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi peran stakeholders dalam

program konsolidasi tanah yaitu: (1) kepemimpinan, (2) Sumberdaya, (3) Motivasi, (4) tanggungjawab, (5) Kemampuan Learning Approach, (6) Komunikasi.

ABSTRACT

The land has a relatively fixed area, while the need for land continues to increase. The limited availability of land and the increasing number of residents have resulted in irregularities in the use of space. The problem of high population density which is not accompanied by spatial planning as a place to live will cause other problems, namely the lack of facilities and infrastructure for the community and the environment is built irregularly. Facing these land conflicts, it is necessary to implement a land consolidation program as an effort to reorganize land tenure, land use, and land acquisition which aims to improve environmental quality by involving stakeholders to play an active role. Gadingsari land consolidation has been carried out from 2009 until 2018, except in 2012, 2014, and 2016 recorded 2.034 parcels have been arranged with a total area of 1.168.793 m². Land consolidation was implemented on a single stretch and continued another contiguous stretch, to result in an area that is physically or administratively organized. This study aims to find out the typology of the stakeholder's role and uncover the factor affecting the stakeholder's role.

The research method was using an inductive qualitative research method. This research took place in Gadingsari sub-districts, Sanden, Bantul. This research scope was on the role of stakeholders and the factor affecting the involvement of stakeholders to support land consolidation. Data collection was conducted through field observations, interviews, and secondary data collection. Then the data was analyzed through the conceptualization stage until a typology of stakeholder's roles and the factor affecting behind them would be found. Information unit was analyzed to themes and then the themes that have the same intention to form one sub-concept. Then the sub-concept will build a descriptive concept and theories about the stakeholder's roles and the factor affecting them.

The result of the study found six typology roles of stakeholders are : (1) policy creator, (2) planner, (3) coordinator, (4) facilitator, (5) implementer, dan (6) Mediator. Factors Affecting the role of stakeholders are (1) Leadership, (2) resources, (3) motivation, (4) responsibility, (5) Learning Approach Ability, (6) communication.

5. Nama : Anthon Michael Martin Sinaga Tahun masuk : N/A
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Erasmus University Rotterdam Negara : Belanda
Judul tesis : *Assessing the Participatory Budgeting Process in Kutai Kartanegara Local Government, Indonesia*
Kata kunci : Penganggaran Partisipatif, Musrenbang, Akuntabilitas, Transparansi, Efektivitas & Efisiensi
Keywords : *Participatory Budgeting, Musrenbang, Accountability, Transparency, Effectiveness & Efficiency*
-

ABSTRAK

Indonesia melakukan lima pendekatan perencanaan dalam sistem perencanaannya: pendekatan politik, teknokratis, partisipatif, *top-down*, dan *bottom-up*. Metode perencanaan pembangunan *bottom-up* di Indonesia umumnya dilaksanakan melalui penganggaran partisipatif dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Metode penganggaran partisipatif digunakan untuk menghimpun aspirasi dan membangun rasa memiliki di antara para pemangku kepentingan tersebut dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan program dan proyek pembangunan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara proses penganggaran partisipatif dan proses proyek pembangunan. Untuk mencapai tujuan ini, karakteristik penganggaran partisipatif dipelajari dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap proyek-proyek pembangunan. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian utama dari tesis ini adalah: 'Apa dampak penganggaran partisipatif terhadap proses proyek-proyek pembangunan Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara?'. Enam variabel dinilai dalam penelitian ini: dimensi keuangan, partisipatif, hukum dan regulasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas dan efisiensi.

Wawancara semi-terstruktur mendalam dilakukan dengan sepuluh responden dari aparat pemerintah daerah Kutai Kartanegara, kepala desa, dan seorang anggota LSM, yang terlibat dan memiliki pengalaman dalam Musrenbang Kutai Kartanegara. Selain itu, untuk melengkapi data primer, penulis juga memperoleh dan menganalisis data sekunder yang dikumpulkan dari instansi pemerintah daerah. Temuan utama penelitian menunjukkan bahwa: (1) pemerintah daerah masih mengalokasikan sebagian kecil dari APBD untuk mengakomodasi proyek-proyek yang diusulkan melalui Musrenbang; (2) proses penganggaran partisipatif merupakan model partisipatif representatif; (3) proses penganggaran partisipatif dibakukan dan diatur, serta berkaitan dengan instrumen perencanaan lainnya; (4) penganggaran partisipatif berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi dalam proses proyek pembangunan; (5) tidak ada hubungan antara

penganggaran partisipatif dengan efektivitas dan efisiensi proyek pembangunan karena tidak ada perbedaan antara proyek *bottom-up* dan *top-down*.

ABSTRACT

Indonesia conducts five planning approaches in its planning system: political, technocratic, participatory, top-down, and bottom-up approaches. Indonesia's bottom-up development planning method is generally implemented through participatory budgeting with the Development Planning Forum (Musrenbang; Musyawarah Perencanaan Pembangunan). The participatory budgeting method is used to gather aspirations and build a feeling of belonging among these stakeholders by including all stakeholders in implementing development programs and projects.

The research aims to explore the relationship between the participatory budgeting process and the process of development projects. To attain this objective, the characteristics of participatory budgeting are studied and analyzed to find its influence on development projects. Therefore, the main research question of the thesis is: 'What impact does participatory budgeting have on the process of development projects Kutai Kartanegara Local Government?'. Six variables are assessed in this research: financial, participatory, legal and regulatory dimensions, accountability, transparency, and effectiveness and efficiency.

Semi-structured in-depth interviews are conducted with ten respondents from Kutai Kartanegara local government officials, head of villages, and an NGO member, who are involved and have experiences in the Kutai Kartanegara Musrenbang. In addition, to complement the primary data, the author also obtains and analyses the secondary data gathered from the local government agencies. The main findings of the research show that: (1) the local government still allocates a small percentage of the local budget to accommodate projects proposed through Musrenbang; (2) the process of participatory budgeting is a model of representative participatory; (3) the process of participatory budgeting is standardized and regulated, which relates to other planning instruments; (4) the participatory budgeting has a relation with accountability and transparency in the process of development projects; (5) there is no link between participatory budgeting and development project effectiveness and efficiency because there is no distinction between bottom-up and top-down projects.

SMART CITY DAN SMART GOVERNANCE

1. Nama : Rima Permata Sari Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Kesiapan *E-government* Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Layanan *E-government* Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Madiun)
Kata kunci : E-readiness, e-Government, Pemerintah daerah
Keywords : *e-readiness, e-government, local government*
-

ABSTRAK

Tujuan – Tujuan dari penelitian ini untuk melihat kesiapan e-government pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dalam konteks transformasi layanan publik melalui empat indikator penilaian yaitu akses pengguna, infrastruktur TIK, kapasitas sumber daya manusia dan anggaran. **Desain/metodologi/pendekatan** – Desain penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. **Temuan** – Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun dinilai cukup siap dalam mengimplementasikan layanan e-government. Hasil temuan lapangan menunjukkan beberapa item penilaian telah siap mendukung layanan e-government di kota Madiun. **Orisinalitas/value** – Penelitian ini mengisi celah literatur dimana penentuan indikator penelitian didasarkan pada hambatan-hambatan e-government serta saran dari penelitian sebelumnya. **Implikasi** – Implikasi dari penelitian ini menekankan pada pentingnya penilaian kesiapan e-government sebagai perbaikan dan pengembangan layanan e-government untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

ABSTRACT

Objectives - The purpose of this study is to see the readiness of e-government at the Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun in the context of public service transformation through four assessment indicators, namely user access, ICT infrastructure, human resource capacity and budget. **Design / methodology / approach** - Descriptive qualitative research design with a case study approach. **Findings** - The findings of this study indicate that Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun is considered quite ready to implement e-government services. The results of the field findings indicate that several assessment items are ready to support e-government services in Madiun city. **Originality / value** - This study fills the literature gap where the determination of research indicators is based on the constraints of e-government as well as suggestions from previous research. **Implications** - The implications of this study emphasize the importance of assessing e-government readiness as an improvement and development of e-government services for good governance.

2. Nama : Retno Sawitri Listyabratarini Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Evolusi Kelembagaan menuju *Smart Government* Kabupaten
Treggalek Tahun 2003 - 2020
Kata kunci : *e-Government, Smart Government*, Kabupaten Treggalek, Evolusi
kelembagaan
Keywords : *e-government, smart government, Treggalek Regency, evolution of
smart government institutions*
-

ABSTRAK

Teknologi informasi dan telekomunikasi (TIK) yang berkembang pesat secara global mendorong pemanfaatannya dalam pemerintahan. TIK diimplementasikan ke dalam pemerintahan untuk memperbaiki tata kelola pemerintah, mengubah pola-pola birokrasi konvensional menjadi lebih efektif dan efisien, penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, reformasi birokrasi dan untuk meningkatkan pelayanan publik. Pemanfaatan TIK dalam pemerintahan menggunakan *platform e-government*.

Kabupaten Treggalek memulai implementasi *e-government* pada tahun 2003. Dalam perjalanannya hingga saat ini, tercatat dua kali perubahan kelembagaan pengelola *e-government* menuju *smart government*. Kelembagaan diidentifikasi sebagai kunci suksesnya penyelenggaraan *e-government* dan hal ini menjadi menarik untuk dikaji bagaimana perubahan kelembagaan menuju *smart government* tersebut terjadi dan apa saja faktor-faktor yang berpengaruh terhadap evolusi kelembagaan tersebut.

Penelitian dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, eksploratif. Periode amatan mulai dari *e-government* diimplementasikan di Kabupaten Treggalek yakni Tahun 2003 hingga tahun 2020. Analisa data menggunakan analisis deret waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 3 (tiga) periode kelembagaan selama kurun waktu tujuh belas tahun. Periode Ke 1 KPDE Tahun 2003 – 2007 merupakan periode implementasi awal *e-government* melalui transformasi elektronik dan digitalisasi data, juga merupakan tahap awal pengembangan sistem manajemen pemerintah menggunakan TIK. Periode Ke 2 Bagian Humas dan Dishubkominfo Tahun 2008 – 2015 merupakan periode pengembangan transformasi digital dalam pemerintahan, publikasi data dan proses pembangunan sebagai bentuk transparansi penyelenggaraan pemerintahan dan perbaikan layanan publik. Periode Ke 3 Diskominfo Tahun 2016 – 2020 merupakan periode pengembangan *smart government* melalui *Smart Regency* dan perbaikan serta manajemen data menuju One Data dan Big Data. Kemudian teridentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap evolusi kelembagaan menuju *smart government* yakni pemerintahan (*governance*), regulasi, kebijakan, urusan pemerintahan dan evolusi kelembagaan di tingkat pusat.

ABSTRACT

Information and telecommunications technology (ICT) which is growing rapidly globally encourages its use in government. ICT is implemented into government to improve governance, change patterns of government to be more effective and efficient, governance is transparent, and to improve public services. Utilization of ICT in government using the e-government platform.

Trenggalek Regency started the implementation of e-government in 2003. In its journey to date, there have been two changes in the institutional management of e-government towards smart government. Institutions are identified as the key to the success of e-government implementation and it is interesting to study how the institutional changes towards smart government are and what are the factors that influence the evolution of these institutions.

The research was conducted using qualitative research methods with case study methods, exploratory. The observation period starts from the implementation of e-government in Trenggalek Regency, namely 2003 to 2020. Data analysis uses time series analysis. The results showed that there were 3 institutional periods over a period of seventeen years. The 1st period of KPDE on 2003 – 2007 was the initial implementation period of e-government through electronic transformation and digitalization of data, it was also the initial stage of developing a government management system using ICT. The second period of Public Relations Divisions and Communications and Informatics Department on 2008 – 2015 was a period of developing digital transformation in government, publication of data and development processes as a form of government transparency and improvement of public services. The 3rd period of Communications and Informatics Department on 2016 – 2020 is a period of developing smart government through Smart Regency and improvement and data management towards One Data and Big Data. Then the factors that influence the evolution of smart government institutions, regulations, policies, government affairs and institutions at the central level.

3. Nama : Rahmat Tri Hariadi Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Takushoku University Negara : Jepang
Judul tesis : *Indonesia Smart Cities Assessment Using Boyd Cohen Indicators :
The Importance of Performance Comparison*
Keywords : *Smart city, Boyd Cohen, City performance, City evaluation*
-

ABSTRACT

In the coming decades, cities globally are estimated to generate more than 80% of global GDP and almost 67% of the global population will inhabit the urban regions. Cities will face significant challenges, such as population growth, pollution, congestion, lack of physical and social infrastructures, while expected to manage their limited resources while responding to the people's needs and expectation by harnessing technology through a sustainability solution for the social and economic conditions (Smart City). As there are now various refinements of what is a smart city, it is becoming an obstacle for policy makers to recognize the smart city, measure its "smartness" performance or to make an evaluation, and set appropriate policies to develop those smart cities. Indonesia Smart City Project which began in only 2018 as the ASEAN Smart Cities Network initiated on the other hand the city has different characteristic in geographical, demography, economy, culture, laws and regulations which could lead in different smart city performance. Based on that note, this study provides comparison between four smart cities in Indonesia and the Singapore state using the Boyd Cohen Smart City index and Singapore as the benchmark. This study found, the lack of database availability in Indonesia Smart City compared to Singapore and the Indonesia central government also needs to prepare base-line statistical data to evaluate various smart city performance and make adjustments for monitoring and evaluation.

4. Nama : Perdani Budiarti Hayuningtyas Tahun masuk : 2018
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Universitas linkage : Kobe University Negara : Jepang
Judul tesis : *Urban Governance Innovation, A Case of Surakarta City, Indonesia*
Kata kunci : Inovasi, Pembangunan Perkotaan, Tata Kelola Kota, Pemerintah Daerah, Kota Surakarta
Keywords : *Innovation, Urban development, Urban governance, Local government, Surakarta City*
-

ABSTRAK

Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia berubah dari sistem pemerintahan terpusat menjadi desentralisasi. Dengan dikeluarkannya Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 tahun 2010, inovasi tidak dapat diabaikan karena kebutuhan akan pendekatan baru, inovatif, adaptif, dan kewirausahaan terhadap reformasi birokrasi dan pencapaian tata kelola kota yang baik. Berbagai inovasi telah dihasilkan pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerjanya. Kota Surakarta diakui sebagai kota yang inovatif, menghasilkan program-program inovatif, sering menjadi contoh praktik yang baik dalam inovasi tata kelola kota, dan ditetapkan sebagai Laboratorium Inovasi pada tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan inovasi di Kota Surakarta dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan pengumpulan data melalui wawancara dan analisis dokumen.

Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa sebagian besar inovasi di Kota Surakarta merupakan inovasi berbasis TIK dan memberikan manfaat dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari realisasi target dokumen perencanaan pembangunan yang baik dan pencapaian berbagai penghargaan dari kota ini. Meski terjadi pergeseran kepemimpinan, namun kepemimpinan visioner yang didukung oleh *upper-middle managers* tetap memegang peranan penting dalam mendorong inovasi di pemerintahan daerah, diikuti oleh regulasi yang mendukung baik dari pemerintah pusat maupun daerah, serta partisipasi dan kerjasama yang kuat antar sektor.

Lebih lanjut, kajian ini menghasilkan beberapa rekomendasi untuk membuat kebijakan yang terintegrasi untuk memperkuat, mengevaluasi, dan memelihara keberlanjutan inovasi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah dapat memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan LSM untuk menciptakan inovasi tata kelola kota.

ABSTRACT

After the fall of the New Order regime in 1998, Indonesia changed from a centralized government system to decentralization. By the issuance of Grand Design of Bureaucratic Reform Year 2010-2025 in 2010, innovation cannot be neglected due to the need for new, innovative, adaptive, and entrepreneurial approaches to bureaucratic reform and the achievement of good urban governance. Many innovations have been produced in local

government to improve their performance. Surakarta City is recognized as an innovative city, produces innovative programs, often become examples of good practice in urban governance innovation, and appointed as Innovation Laboratory in 2017. This study aims to describe innovation in Surakarta City and what factors influencing it. The study was conducted using qualitative research methods with a case study approach and collecting data from interviews and document analysis.

The findings of this study reveal that most of innovation in Surakarta City are ICT based innovation and provides benefits in improving the performance of local governments. It can be seen by the good realization of development planning documents target and the achievement of various awards by this city Even though there is shifting leadership, the visionary leadership supported by upper-middle managers still plays a crucial role in encouraging innovation in local government, followed by supportive regulations from both central and local government, as well as participation and strong cooperation between sectors.

Further, this study draws some recommendations to create an integrated policy to strengthened, evaluate, and maintain the sustainability of innovation in the local government. The local government may provide opportunities to collaborate with NGOs to create urban governance innovation.

LAINNYA

1. Nama : Triansyah Putera Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Dampak Aktivitas Industri Terhadap Perkembangan Wilayah (Kasus: PT. Donggi Senoro LNG Di Kecamatan Batui Dan Kintom Kabupaten Banggai)
Kata kunci : Dampak industri, Perkembangan wilayah, Sosial, Ekonomi, Lingkungan
Keywords : *Industrial Impact, Regional Development, Social, Economy, Environment*
-

ABSTRAK

Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Banggai yang mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan perkembangan wilayah tersebut adalah hadirnya PT. Donggi Senoro LNG yang terletak diantara dua kecamatan tersebut. Selain itu, adanya industri tersebut telah memberikan dampak terhadap kondisi Sosial, Ekonomi, dan Perubahan fisik lingkungan wilayah. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji dampak keberadaan industri PT. Donggi Senoro LNG, baik dampak positif maupun negatif berdasarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan perubahan lingkungan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan spasial. Berdasarkan hasil analisis, menunjukkan bahwa PT. Donggi Senoro LNG memberikan dampak positif dan juga negatif. Dampak positif dari keberadaan industri terdapat pada aspek ekonomi dan juga fisik wilayah. Sedangkan dampak negatif terdapat pada aspek sosial. Dampak–dampak tersebut tentunya akan mempengaruhi arah perkembangan wilayah dari Kecamatan Batui dan Kecamatan Kintom. Olehnya itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pada pemerintah dalam merencanakan kawasan industri dan wilayah sekitarnya sebagai upaya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan.

ABSTRACT

Batui District and Kintom District are some of the sub-districts in Banggai Regency that have experienced very significant growth. One of the factors that led to the increased development of the area was the presence of PT. Donggi Senoro LNG is located between the two sub-districts. In addition, the existence of the industry has had an impact on the social, economic, and physical changes of the regional environment. The purpose of this study was to examine the impact of the existence of the PT. Donggi Senoro LNG, both positive and negative impacts based on the socio-economic conditions of the community and environmental changes.

This study uses a qualitative approach with descriptive and spatial analysis methods. Based on the results of the analysis, shows that PT. Donggi Senoro LNG has both positive and negative impacts. The positive impact of the existence of the industry is on the economic and physical aspects of the region. While the negative impact is on the social aspect. These impacts will certainly affect the direction of regional development from Batui District to Kintom District. Therefore, the results of this study are expected to be input to the government in planning industrial areas and surrounding areas to realize sustainable and equitable development.

2. Nama : Ratna Ayu Maruti Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Brawijaya
Judul tesis : Model Kebijakan Publik yang Mengarusutamakan Kebahagiaan Warga
Kata kunci : Model Kebijakan Publik, Bhutan, Skandinavia, Eropa Barat, Amerika Serikat, Eropa Timur, Kebahagiaan
Keywords : *Public Policy Model, Bhutan, Scandinavia, Western Europe, United States, Eastern Europe, Happiness*
-

ABSTRAK

Kebijakan publik dengan pendekatan ekonomi dianggap gagal menangkap realitas yang terjadi dalam masyarakat, cenderung mengabaikan aspek pemerataan. Contohnya pendapatan per kapita tidak selalu linear dengan pemerataan pendapatan penduduknya (rasio gini). Ekonomi pasar global tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kerusakan lingkungan dan ketidaksetaraan yang semakin meluas. Data sejumlah penelitian menunjukkan tingkat kebahagiaan beberapa negara maju dalam kondisi konstan meskipun pendapatan riil per kapita mereka naik hingga dua kali lipat, di mana kondisi ini dikenal sebagai Easterlin Paradox (Jason, 2010). Perlu pendekatan non ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan dan menggambarkan kondisi masyarakat dengan lebih komprehensif. Kebahagiaan sebagai bagian dari kesejahteraan dapat digunakan sebagai panduan kebijakan publik di samping ekonomi karena dianggap meningkatkan kesejahteraan dan memperbaiki kondisi masyarakat (Diener & Ryan, 2009) serta dianggap semakin penting di era paska materialistik di mana kebahagiaan merupakan tujuan hidup paling penting (Diener & Oishi, 2004).

Jawaban terhadap pertanyaan —model kebijakan apakah yang membuat warga bahagia|| masih menjadi sebuah pertanyaan besar baik bagi pembuat kebijakan (*policy makers*) maupun para ilmuwan kebijakan publik. Untuk sampai pada jawaban pertanyaan tersebut perlu dikaji apa sajakah dan bagaimanakah model kebijakan publik yang dilakukan oleh negara-negara selama ini yang ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan warganya serta model kebijakan yang manakah yang berhubungan dengan kebahagiaan warga. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah: Model kebijakan seperti apakah yang selama ini dilakukan oleh pemerintah di berbagai belahan dunia yang ditujukan untuk mewujudkan kebahagiaan warga? Dan apakah berbagai kebijakan tersebut mampu membahagiakan warganya ataukah justru sebaliknya?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dilakukan penelitian dengan menggunakan data *World Development Indicators (WDI)* dari *World Bank*, *Human Development Report* dari *United Nations Development Programme (UNDP)*, *Worldwide Governance Indicators* dari *World Bank*, *ILOSTAT* dari *International Labour Organization (ILO)*, *OECD Data* atau *OECD Stat*, dan *World Value Survey (WVS)*. Penelitian ini menggunakan analisis multilevel model

untuk menguji hubungan model kebijakan publik lima negara yaitu Bhutan, Skandinavia, Eropa Barat, Amerika Serikat, dan Eropa Timur terhadap kebahagiaan warga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan publik yang berpengaruh positif terhadap kebahagiaan antara lain GDP; stabilitas politik dan absennya kekerasan/terorisme; efektivitas pemerintah; supremasi hukum; dan didorongnya sektor sukarela dan NGO. Sedangkan kebijakan publik yang berpengaruh negatif terhadap kebahagiaan antara lain pertumbuhan ekonomi lokal; pertumbuhan berkeadilan; intensitas emisi karbondioksida; pengendalian korupsi; dan privatisasi layanan sosial.

ABSTRACT

Public policy with an economic approach is considered to fail to capture the reality that occurs in society, tends to ignore the aspect of equity. For example, per capita income is not always linear with the distribution of income for the population (Gini ratio). The global market economy has not only accelerated economic growth, but also environmental degradation and widespread inequality. Data from a number of studies show that the happiness level of several developed countries is in constant condition even though their real per capita income has doubled, which is known as the Easterlin Paradox (Jason, 2010). A non-economic approach is needed to create welfare and describe the condition of society more comprehensively. Happiness as part of welfare can be used as a guide for public policy in addition to the economy because it is considered to improve welfare and improve the condition of society (Diener & Ryan, 2009) and is considered increasingly important in the post-materialistic era where happiness is the most important life goal (Diener & Oishi, 2004).

The answer to the question "what policy model makes citizens happy" is still a big question for both policy makers and public policy scientists. To arrive at the answer to this question, it is necessary to examine what and how are the models of public policies carried out by countries so far aimed at realizing the welfare and happiness of their citizens and which policy models are related to the happiness of citizens. Therefore, the research questions that will be answered in this study are: What kind of policy models have been carried out by governments in various parts of the world aimed at realizing people's happiness? And Are these various policies able to make the citizens happy or is it the opposite?

To answer this question, a study was conducted using World Development Indicators (WDI) data from the World Bank, Human Development Report from the United Nations Development Program (UNDP), Worldwide Governance Indicators from the World Bank, ILOSTAT from the International Labor Organization (ILO), OECD Data or OECD Stat, and the World Value Survey (WVS). This study uses a multilevel model analysis to examine the relationship between the public policy models of five countries, namely Bhutan, Scandinavia, Western Europe, the United States, and Eastern Europe on the happiness of citizens.

The results show that public policies that have a positive effect on happiness include GDP; political stability and absence of violence / terrorism; government effectiveness; rule of law; and encouragement of the voluntary sector and NGOs. Meanwhile, public policies that have a negative effect on happiness include local economic growth; equitable growth; carbon dioxide emission intensity; corruption control; and privatization of social services.

3. Nama : Eka Bagus Prasetyo Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Diwak Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang)
Kata kunci : Pengelolaan keuangan desa, Pembangunan, Pemberdayaan
Keywords : *Village Financial Management, Development, Empowerment*
-

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan desa, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Diwak Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dalam menunjang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa di desa Diwak. Tahapan pengelolaan keuangan desa di desa Diwak meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Jumlah anggaran yang dikelola pemerintah desa Diwak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Diwak tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.585.239.437,00. Dari total jumlah anggaran tersebut, sebanyak Rp 841.221.500,00 dialokasikan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat desa. Faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa di desa Diwak diantaranya adalah kapasitas aparat desa, pemanfaatan teknologi informasi, serta peran kecamatan dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

ABSTRACT

This research aims to determine the process of village financial management, and the factors that influence the implementation of village financial management in Diwak Village, Bergas Sub-district, Semarang Regency. The research method used is descriptive qualitative with a case study approach. The results showed that the implementation of village financial management in supporting the development and empowerment of rural communities in Diwak village. The stages of village financial management in Diwak village include the planning, implementation, and accountability stages. The total budget managed by the Diwak village government through the 2020 Diwak Village Revenue and Expenditure Budget is Rp. 1,585,239,437.00. Of the total amount of the budget, as much as Rp. 841,221,500, 00 was allocated for the development sector and the village community empowerment sector. Factors that affect village financial management in Diwak village include the capacity of village officials, utilization of information technology, and the role of sub-districts in fostering and supervising village financial management.

4. Nama : Abi Teguh Kurniawan Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Dalam Negeri Bahasa : Indonesia
Perguruan Tinggi : Universitas Gadjah Mada
Judul tesis : Pengaruh Kepadatan Campuran Aspal Terhadap Kerusakan Perkerasan Lentur Selama Masa Layanan (Studi Kasus Jalan Ngalang – Nguwot – Gading, Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta)
Kata kunci : Perkerasan Jalan, Rongga Udara, Kondisi Perkerasan, Kualitas Campuran
Keywords : *Road Pavement, Air Voids, Pavement Condition, Mixture Quality*
-

ABSTRAK

Kualitas lapis campuran beraspal dipengaruhi oleh kualitas material, komposisi material, dan kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lokasi pengerjaan. Pemeriksaan atas hasil pelaksanaan pekerjaan seringkali tidak sesuai standar dan spesifikasi yang ditentukan sehingga lapis campuran beraspal cenderung tidak mencapai masa layanan rencana. Salah satu indikator kualitas campuran beraspal ialah kepadatan yang tidak sesuai standar yang ditentukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh tingkat kepadatan terhadap tingkat kerusakan yang terjadi selama masa layanan jalan dengan memperhitungkan persentase nilai rongga udara pada campuran beraspal dengan melakukan pengambilan contoh benda uji menggunakan pengujian *coredrill*, evaluasi tingkat kerusakan dengan metode *Pavement Condition Index* (PCI) dan analisis hubungan tingkat kepadatan dengan kondisi perkerasan dengan menggunakan analisis statistik.

Hasil penelitian menunjukkan rata-rata persentase rongga udara sebesar 7,91% dengan kepadatan rata-rata 96,43% atau dibawah kepadatan rata-rata yang disyaratkan (98%). Nilai rata-rata PCI lapis perkerasan beraspal 92,96 atau lebih kecil 0,8 dari kondisi rencana selama masa pelayanan dua tahun sebesar 93,76. Analisis hubungan dan pengaruh tingkat kepadatan dan nilai PCI lapis perkerasan beraspal pada ruas Jalan Ngalang – Nguwot – Gading menunjukkan tidak terdapat hubungan atau pengaruh tingkat kepadatan terhadap nilai PCI sangat kecil.

ABSTRACT

Quality of the asphalt mixture layer influenced by the material quality, material composition, and the suitability of the execution of the work at the construction site. Inspection the results of the implementation the work often does not meet the specified standards and specifications so that the asphalt mix layer tends not to reach the planned service life. One indicator of the quality of the asphalt mixture is the density that does not meet the specified standards.

This study aims to identify the effect of density level on the level of damage that occurs during the service life of the road by calculating the percentage of air voids in the asphalt mixture by taking samples of the test object using coredrill testing, evaluating the level of

damage using the Pavement Condition Index (PCI) method and analyzing the relationship. density level with pavement conditions using statistical analysis.

The results showed that the average percentage of air voids was 7.91% with an average density of 96.43% or below the required average density (98%). The average PCI value of the asphalt pavement layer is 92.96 or 0.8 smaller than the planned condition during the two-year service period of 93.76. Analysis of the relationship and effect of density level and PCI value of asphalt pavement on Jalan Ngalang – Nguwot – Gading shows that there is no significant relationship or effect of density level on PCI value.

5. Nama : Ronny Christanto Tahun masuk : 2019
Jenjang / Program : Magister (S-2) / Linkage Bahasa : Inggris
Perguruan Tinggi : Institut Teknologi Bandung
Universitas linkage : Ritsumeikan University Negara : Jepang
Judul tesis : *How To Avoid Inconsistent Implementation Of Government Plan For Border Area -Application Of Analytic Hierarchy Process (AHP) In Border Area Development Program-*
Kata kunci : Analytical Hierarchy Process (AHP), Rencana Anggaran, Batas Negara
Keywords : *Analytical Hierarchy Process (AHP), Plan, Budget, National Border*
-

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia berupaya mengubah arah kebijakan pembangunan yang semula cenderung *inward looking* menjadi *outward looking* melalui RPJMN tahun 2010-2014. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan perbatasan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sesuai dengan RPJMN 2015-2019 (PP Nomor 2 Tahun 2015), dan peningkatan kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi sebagai salah satu prioritas pembangunan dalam RPMN 2020-2024 (PP Nomor 18 Tahun 2020). Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sebagai Lembaga Non Struktural, bertindak sebagai perwakilan pemerintah pusat dengan visi "Terwujudnya Tata Kelola Batas Negara dan Kawasan Perbatasan yang aman, tertib, maju dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang menjamin kesejahteraan rakyat dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia". Badan ini telah menyusun Rencana Induk (Renduk) dan Rencana Aksi 2015-2019 untuk pengelolaan pembangunan perbatasan agar lebih fokus dan menyeluruh. Salah satu masalah yang ada adalah belum adanya mekanisme evaluasi keterlibatan anggota badan perbatasan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan perbatasan (Master Plan dan Action Plan). Berdasarkan laporan audit dari BPK-RI (Badan Pemeriksa Keuangan), diketahui banyak infrastruktur yang dibangun oleh kementerian teknis tidak sesuai dengan Rencana Induk pembangunan perbatasan. Kondisi ini berarti bahwa terlepas dari tingginya persentase realisasi anggaran, tingkat rencana yang dapat dieksekusi dalam program perbatasan negara sangat rendah. Dugaan penulis hal ini disebabkan karena tidak efektifnya komunikasi antar anggota instansi yang mengakibatkan rendahnya presentase pencapaian kegiatan. Oleh karena itu tujuan penulisan thesis ini adalah untuk dapat mengidentifikasi beberapa faktor yang diduga berpengaruh dalam efektivitas organisasi untuk dapat lebih meningkatkan terlaksananya rencana kegiatan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP), metode ini digunakan untuk menyusun rekomendasi yang diprioritaskan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi anggota untuk melanjutkan pembangunan perbatasan secara efektif dan efisien. Hasil dan kesimpulan dari penelitian diketahui bahwa komunikasi politik lintas kementerian merupakan kriteria paling

tinggi dalam menentukan efektivitas pencapaian kegiatan organisasi. Dan untuk menunjang hal tersebut salah satu program utama yang diusulkan adalah untuk menerbitkan peraturan atas Rencana Induk dan Action Plan yang memiliki kewenangan lebih tinggi dari yang sudah ada sebelumnya.

ABSTRACT

The Indonesian government is trying to change the direction of development policies that initially tended to be inward looking to outward looking through the 2010-2014 RPJMN. Followed by the development of border areas as National Strategic Activity Centers (PKSN) in accordance with the 2015-2019 RPJMN (PP Number 2 of 2015), and increasing border areas, rural areas and transmigration as one of the development priorities in the 2020-2024 RPMN (PP Number 18 of 2015). 2020). The National Border Management Agency (BNPP), as a NonStructural Institution, acts as a representative of the central government with the vision of "The realization of a safe, orderly, advanced, and advanced Governance of State Boundaries and becomes a center of economic growth that ensures the welfare of the people and the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. " This agency has prepared a Master Plan (Renduk) and Action Plan 2015-2019 for the management of border development to be more focused and comprehensive. One of the existing problems is the absence of an evaluation mechanism for the involvement of border agency members in the implementation of border area development (Master Plan and Action Plan). Based on an audit report from the BPK-RI (Financial Audit Agency), it is known that many infrastructures built by the technical ministry are not in accordance with the Master Plan for border development. This condition means that despite the high percentage of budget realization, the level of plans that can be executed in the national border program is very low. The author's assumption is that this is due to ineffective communication between members of the agency which results in a low percentage of achievement of activities. Therefore, the purpose of writing this thesis is to identify several factors that are thought to have an effect on the effectiveness of the organization in order to further improve the implementation of the previously determined activity plans. The research method used in this study is the Analytical Hierarchy Process (AHP), this method is used to develop prioritized recommendations in order to improve the effectiveness of member communication to continue border development effectively and efficiently. The results and conclusions of the study are known that cross-ministerial political communication is the highest criterion in determining the effectiveness of achieving organizational activities. And to support this, one of the main programs proposed is to issue regulations on Master Plans and Action Plans that have higher authority than those that existed previously.

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

